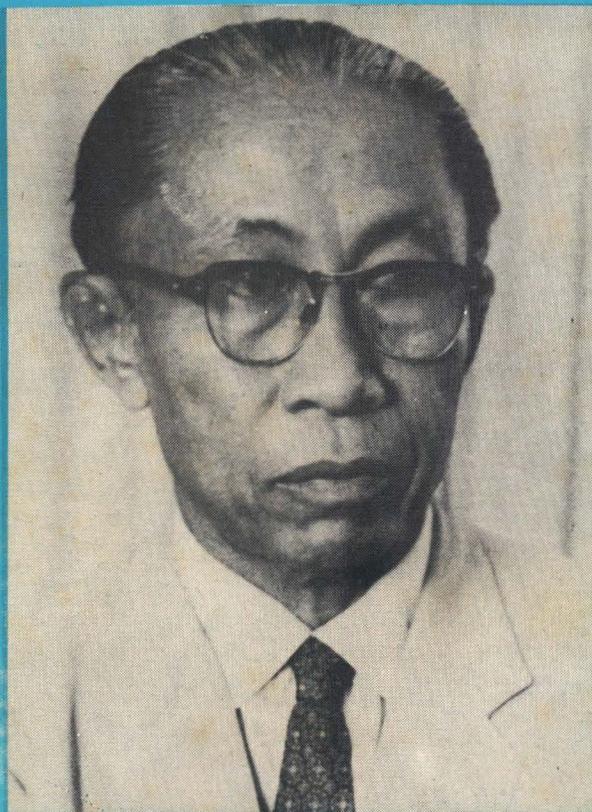


PROF.DR. BAHDER DJOHAN

Karya dan Pengabdianya



Oleh
Mardanas Safwan

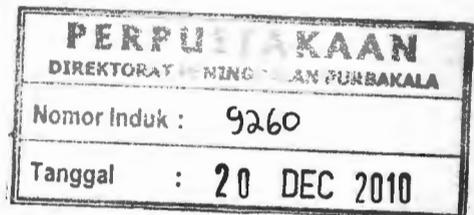
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1985

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

PROF.DR. BAHDER DJOHAN

Karya dan Pengabdianya

Oleh
Mardanas Safwan



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1985**



Penyunting :

1. Sutrisno Kutoyo
2. Tashadi

**Gambar kulit oleh :
M.S. Karta**



SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Agustus 1985
Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang antara lain mengerjakan penulisan biografi tokoh yang telah berjasa dalam masyarakat.

Adapun pengertian "tokoh" dalam naskah ini ialah seseorang yang telah berjasa atau berprestasi di dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan, pengabdian, ilmu pengetahuan, keolahragaan dan seni budaya nasional di Indonesia.

Dasar pemikiran penulisan biografi tokoh ini ialah, bahwa arah pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahir, melainkan juga mengejar kepuasan batin, dengan membina keselarasan dan keseimbangan antara keduanya.

Tujuan penulisan ini khususnya juga untuk merangsang dan membina pembangunan nasional budaya yang bertujuan menimbulkan perubahan yang membina serta meningkatkan

mutu kehidupan yang bernilai tinggi berdasarkan Pancasila, dan membina serta memperkuat rasa harga diri, kebanggaan nasional, dan kepribadian bangsa.

Jakarta, Agustus 1985
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN .	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PENDAHULUAN	1
Bab I Riwayat Hidup Bahder Djohan	5
1.1 Masa Muda	45
1.2 Masa Dewasa	16
Bab II Perjuangan Bahder Djohan	30
2.1 Pemimpin Gerakan Pemuda	30
2.2 Perjuangan Bahder Djohan Dalam Masa Kemerdekaan	50
Bab III Pengabdian Bahder Djohan Pada Masa Kemerdekaan	63
3.1 Menjadi Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan	63
3.2 Pengabdian Bahder Djohan Selama Masa Pensiun	83
PENUTUP	95
LAMPIRAN	104



PENDAHULUAN

Sebagian besar tokoh yang pernah penulis susun riwayat hidup dan pengabdianya, baru penulis kenal secara pribadi setelah penulis menyusun riwayat hidup mereka; dan tokoh yang masih hidup biasanya baru penulis kenal sesudah penulis mengadakan wawancara. Selama ini hanya Prof. Dr. Hamka yang telah kenal lebih dahulu sebelum menulis riwayat hidup dan pengabdianya.

Tokoh yang ditulis riwayat hidup dan pengabdianya sekarang ini adalah Prof. Dr. Bahder Djohan. Tokoh ini penulis kenal secara pribadi pada tahun 1970, yaitu ketika ia menjadi ketua *Steering Committee* Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau di Batusangkar. Pada waktu itu penulis termasuk salah seorang peserta dari Jakarta sebagai utusan kantor Lembaga Sejarah dan Antropologi Direktorat Jenderal Kebudayaan, tempat penulis bekerja.

Sebelum berangkat ke Padang dan Batusangkar penulis sudah sering menghadiri pertemuan dan diskusi mengenai seminar yang dipimpin oleh Prof. Dr. Bahder Djohan. Dalam seminar di Batusangkar itu Prof. Dr. Bahder Djohan selain memimpin seminar, juga memberikan piasarannya. Pada waktu itu penulis juga menyiapkan sebuah kertas kerja yang berjudul "Pengungkapan Sejarah Tokoh-tokoh Minangkabau". Penulis

juga menjadi anggota dalam sidang *Steering Committe* yang dipimpin oleh Prof. Dr. Bahder Djohan.

Setelah kembali ke Jakarta Prof. Dr. Bahder Djohan mendirikan Yayasan Kebudayaan Minangkabau sebagai kelanjutan dari seminar di Batusangkar. Sesudah berhasil mendirikan yayasan tersebut pada akhir tahun 1972, pada permulaan tahun 1974 yayasan menerbitkan majalah *Kebudayaan Minangkabau*. Penerbitan majalah tersebut dipimpin oleh Prof. Dr. Bahder Djohan, sedangkan penulis termasuk salah seorang anggota redaksinya.

Pada tahun 1973 penulis juga ikut membantu Prof. Dr. Bahder Djohan menjadi salah seorang tenaga pengajar (dosen) pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Ibnu Khaldun dalam mata kuliah Antropologi Budaya dan Ilmu Politik. Dalam hubungan dengan kegiatan inilah penulis memperoleh banyak kesempatan bertemu dengan Prof. Dr. Bahder Djohan di rumahnya, Jalan Kimia No. 9 Jakarta. Kebetulan kantor tempat penulis bekerja pada waktu itu juga berada di Jalan yang sama sehingga hubungan kerja di antara kami dapat terlaksana dengan baik, baik melalui telpon maupun datang ke rumahnya. Dalam tahun 1973 ini pula penulis mengadakan wawancara dengan Prof. Dr. Bahder Djohan dalam rangka penulisan Gedung Sumpah Pemuda. Selanjutnya dalam tahun 1974 penulis juga sering mengadakan wawancara secara santai baik menyangkut riwayat hidupnya maupun mengenai masalah lain.

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi tentang kebudayaan, dalam tahun 1975 penulis juga mengadakan wawancara dengan Prof. Dr. Bahder Djohan. Selanjutnya, atas saran Bapak Sutrisno Kutoyo dan Bapak Sagimun MD, kami melakukan wawancara secara intensif dengan Prof. Dr. Bahder Djohan, karena sebagai bekas menteri pendidikan dan kebudayaan, suatu saat pasti ditulis riwayat hidupnya. Dalam hubungan ini, wawancara dengan Prof. Dr. Bahder Djohan penulis lanjutkan hingga tahun 1977.

Sebenarnya banyak sekali bahan-bahan yang penulis peroleh dari Prof. Dr. Bahder Djohan, baik melalui wawancara maupun tertulis. Tetapi sayang, bahan yang telah terkumpul banyak itu sebagian tidak berhasil diketemukan sewaktu penulis pindah rumah tahun 1978. Bahan yang ditemukan adalah bahan yang mencatat yang pokok-pokok saja, sehingga hasil tulisan ini tidak begitu lengkap; apa lagi sewaktu tulisan ini disusun, Prof. Dr. Bahder Djohan telah tiada.

Bahan-bahan tertulis antara lain berupa *Memori Bung Hatta* yang banyak membicarakan perjuangannya pada masa muda bersama Bapak Bahder Djohan, dan buku *45 Tahun Sumpah Pemuda* yang membicarakan peranan Bahder Djohan dalam Kongres Pemuda I. Kecuali itu buku *Almanak Nasional 1951–1955* juga banyak membantu, karena semuanya memuat bahan periode zaman kemerdekaan. Buku-buku lain yang dipergunakan dalam tulisan ini dicantumkan dalam daftar sumber.

Uraian tentang riwayat hidup dan pengabdian Prof. Dr. Bahder Djohan ini penulis bagi menjadi 3 bab:

Bab I membicarakan riwayat hidup Bahder Djohan sejak masa muda sampai dewasa.

Bahder Djohan dilahirkan di Padang tanggal 30 Juli 1902. Ia menyelesaikan sekolah HIS di Bukittinggi, dan kemudian melanjutkan sekolah MULO di Padang. Selama bersekolah di Padang Bahder Djohan telah mulai tertarik kepada pergerakan pemuda. Pada tahun 1919 Bahder Djohan melanjutkan pelajarannya ke STOVIA di Jakarta, dan berhasil lulus sebagai dokter pada tahun 1927. Semenjak bersekolah di Jakarta, perhatian Bahder Djohan terhadap pergerakan pemuda makin besar. Sesudah menjadi dokter, Bahder Djohan menikah dengan Siti Zairi Yaman. Semenjak menjadi dokter ia mencurahkan perhatiannya dalam bidang kesehatan sampai saat terakhir pendudukan Jepang.

Bab II membicarakan perjuangan Bahder Djohan dalam gerakan pemuda dan dalam perang kemerdekaan.

Sewaktu bersekolah MULO di Padang, Bahder Djohan dipilih menjadi "Sekretaris" *Jong Sumatranen Bond* (JSB) cabang Padang. Sewaktu bersekolah di STOVIA, Bahder Djohan diangkat menjadi sekretaris PB JSB di Jakarta. Pada Kongres Pemuda I tahun 1926, Bahder Djohan diangkat menjadi wakil ketua kongres, dan dalam kongres ia juga menyampaikan pidatonya. Dalam masa perang kemerdekaan (1945–1950) Bahder Djohan juga mempunyai andil yang besar. Ia diangkat menjadi anggota KNIP, dan sebagai seorang dokter, Bahder Djohan juga menyumbangkan tenaganya dalam bidang itu dan juga aktif dalam PMI sebagai ketua PMI cabang Jakarta.

Bab III membicarakan pengabdian Bahder Djohan sesudah pengakuan kedaulatan, dan pengabdiannya selama masa pensiun.

Pada tahun 1950, dalam Kabinet Natsir, Bahder Djohan diangkat menjadi menteri PPK, dan kemudian tahun 1952 dalam Kabinet Wilopo diangkat kembali menjadi menteri PPK. Tahun 1953–1954 diangkat menjadi direktur RSUP Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Selanjutnya dari tahun 1954–1958 diangkat menjadi presiden (rektor) Universitas Indonesia (UI) di Jakarta. Pada tahun 1958 Bahder Djohan memasuki masa pensiun. Dalam masa ini Bahder Djohan aktif memimpin Universitas Ibnu Khaldun di Jakarta. Ia juga aktif memimpin Yayasan Kebudayaan Minangkabau di Jakarta guna memajukan kebudayaan nasional.

Pada bagian penutup dibicarakan kesan dan pengalaman penulis dengan Prof. Dr. Bahder Djohan, mulai tahun 1970 sampai ia meninggal dunia.

Kemudian juga ditampilkan beberapa lampiran yang memperkuat keterangan yang dimuat pada bagian penutup.

BAB I RIWAYAT HIDUP BAHDER DJOAN

1.1 *Masa Muda*

Bahder Djohan dilahirkan pada tanggal 30 Juli 1902 di Padang, Sumatra Barat. Ayahnya bernama Moh Rapal St. Burhanuddin, berasal dari Koto Gadang, Bukittinggi, Sumatra Barat, sedangkan ibunya bernama Lisah berasal dari Kota Padang. Moh Rapal mempunyai kedudukan sebagai jaksa; suatu jabatan yang sangat terpandang pada waktu itu. Bahder Djohan mempunyai saudara kandung sebanyak 10 orang, terdiri atas 5 laki-laki dan 5 perempuan. Bahder Djohan adalah anak kelima.¹⁾

Pada tahun 1908, ketika usianya mencapai 6 tahun, Bahder Djohan dimasukkan oleh orang tuanya ke sekolah dasar yang waktu itu terkenal dengan nama "Sekolah Melayu" di Padang. Pada waktu itu sangat sedikit anak Indonesia mengenyam pendidikan. Hanya anak orang kaya dan anak orang berpangkat ataupun orang terpandang di masyarakat. Anak orang kebanyakan jarang yang masuk sekolah, walaupun dia mempunyai otak yang cerdas.

Sekolah untuk bumiputra (orang Indonesia asli) mulai didirikan di Sumatra Barat pada tahun 1853 yaitu Sekolah Kelas Dua di Padang yang kemudian terkenal dengan nama Sekolah Melayu. Kemudian pada tahun 1856 di Kota Bukittinggi juga

dibuka sebuah sekolah untuk anak bumiputra yang terkenal dengan nama Sekolah Raja. Pada waktu itu baru di Padang dan Bukittinggi saja didirikan sekolah oleh Pemerintah Hindia Belanda.²⁾

Dalam tugasnya sebagai seorang jaksa, ayah Bahder Djohan dipindahkan ke Payakumbuh, dan selanjutnya dipindahkan lagi ke Pariaman. Dengan demikian Bahder Djohan juga harus berpindah sekolah mengikuti kepindahan ayahnya. Kepindahan ayahnya ini bagi Bahder Djohan juga membawa pengaruh dan manfaat, karena dengan demikian bertambah pula pengalaman hidupnya.³⁾

Pada waktu ayah Bahder Djohan ditugaskan di Pariaman, ia dimasukkan oleh ayahnya di sebuah sekolah di Bukittinggi pada tahun 1913. Waktu itu di daerah Sumatra Barat Pemerintah Hindia Belanda telah mulai mendirikan *I Klasse Inlandsche School*, yaitu sekolah kelas satu untuk anak-anak bumiputra. Sekolah itu pertama kali didirikan pada tahun 1910. Kemudian pada tahun 1912 oleh Pemerintah Hindia Belanda juga didirikan *Volk School* yang berarti Sekolah Rakyat atau Sekolah Desa. Pada tahun 1916 untuk pertama kali juga dibuka *Vervolgschool*, dan pada saat yang bersamaan juga didirikan *Normaalschool* di Padangpanjang. Selanjutnya pada tahun 1918 di Padangpanjang didirikan *Normaalschool* khusus untuk wanita. Seterusnya pada tahun 1921 di Padangpanjang juga didirikan *Schakel-school*.⁴⁾

Demikianlah gambaran perkembangan pendidikan di daerah Sumatra Barat sampai tahun 1920. Walaupun perkembangan ini tidak begitu menggembarakan, tetapi kalau dibandingkan dengan daerah lain terutama daerah luar Jawa, kemajuan pendidikan di daerah ini sangat berarti. Bahder Djohan sebagai seorang anak Jaksa, anak orang terpandang di masyarakat, beruntung dapat memasuki sekolah kelas satu. Di sekolah kelas satu ini diajarkan bahasa Belanda, bahkan dalam perkembangannya

nya kemudian bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar di sekolah ini.

Selama bersekolah di Bukittinggi, Bahder Djohan terpaksa *indekost* (bayar makan dengan sekalian tempat tinggal) di rumah suatu keluarga yang tempatnya tidak jauh dari sekolah. Dalam pada itu Bahder Djohan sering berhubungan dengan keluarga ayahnya dari Kota Gadang yang letaknya berdekatan dengan Bukittinggi. Paling kurang dua kali dalam seminggu, yaitu hari Rabu dan Hari Sabtu, Bahder Djohan berjumpa dengan saudara ayahnya yang dalam bahasa Minang dinamai "*induk bako*".⁵⁾

Pada waktu itu Kota Bukittinggi hanya ramai dua kali seminggu, yaitu hari Rabu dan hari Sabtu. Pada hari itu pasar Bukittinggi ramai sekali, karena orang dari daerah sekitarnya berdatangan ke Kota Bukittinggi untuk berbelanja dan menjual barang dagangannya. Pada hari yang lain kota Bukittinggi tetap seperti biasa yang hanya menampung kegiatan penduduk kota saja. Begitu juga kota-kota yang lain di Sumatra Barat seperti Payakumbuh hanya ramai pada hari Minggu saja. Padangpanjang ramai pada hari Jum'at dan Batusangkar pada hari Kamis. Berbeda dengan kota-kota lainnya, maka Kota Padang tetap ramai setiap hari.

Kota Gadang tempat asal dan lahir ayah Bahder Djohan adalah suatu desa atau nagari yang terletak di seberang Ngarai Sianok, Bukittinggi. Berbeda dengan nagarai-nagari lainnya di Sumatra Barat, maka penduduk nagari ini mempunyai keinginan yang besar untuk memasukkan anaknya ke sekolah Belanda. Mereka juga mempunyai keinginan yang besar untuk merantau meninggalkan kampung halamannya. Sebagian besar penduduk Kota Gadang hidup dari berdagang terutama menjadi tukang mas dan menjadi pegawai negeri.⁶⁾

Hanya dengan melalui sekolah Belanda anak-anak mereka kemudian dapat menjadi dokter, ahli teknik dan pegawai negeri lainnya pada tingkat menengah ke atas. Mungkin perjuangan

untuk hidup mendesak mereka berpikir ke jurusan itu; sawah yang ada di Koto Gadang tidak cukup hasilnya untuk dimakan. Ada pula di antara sawah itu sudah tergadai pula penduduk kampung di sebelahnya yaitu Sianok. Nagari Sianok banyak melahirkan saudagar yang kuat, berani bertindak dan juga gemar merantau.⁷⁾

Anak-anak Koto Gadang itu bersekolah di Kota Bukittinggi. Pagi-pagi pukul 06.00 mereka sudah berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Jalan yang mereka lalui turun naik Ngarai yang dalamnya kira-kira 100 meter, dan menyeberang sungai yang mengalir di sana. Kira-kira pukul 07.00 baru mereka sampai di tepi pasar Bukittinggi. Mereka singgah sebentar di emper toko untuk berganti pakaian dan memakai sepatu. Pukul 13.00 mereka baru pulang ke rumah melalui jalan yang sama. Dua kali sehari mereka turun naik Ngarai Sianok melalui jalan yang curam dan itu dikerjakan sekurang-kurangnya 7 tahun berturut-turut oleh anak Koto Gadang. Di antara putra Koto Gadang yang berhasil dalam sekolahnya dan mencapai reputasi nasional maupun internasional adalah *Grand Old Man* H. Agus Salim dan Bung Kecil Sutan Syahrir.⁸⁾

Selama bersekolah di Bukittinggi (1913–1915) Bahder Djohan banyak mempunyai teman dan kenalan, baik teman di sekolah maupun teman di masyarakat. Salah seorang teman yang kemudian menjadi teman akrab Bahder Djohan adalah Mohammad Hatta yang juga berasal dari Kota Bukittinggi. Dalam pada itu kehidupan di Kota Bukittinggi juga banyak memberikan kenangan dan pengalaman kepada Bahder Djohan. Pada usia 11 tahun ia sudah harus berpisah tempat tinggal dengan orang tuanya, hidup sebagai anak *indekost*, mengatur kehidupan dan pergaulan sendiri. Salah satu keuntungan yang diperoleh Bahder Djohan selama di Bukittinggi adalah hubungan yang akrab dengan saudara ayahnya. Ia lebih mendalam menyelami dan menghayati perasaan dan adat istiadat orang Koto Gadang.

Pada tahun 1915 oleh orang tuanya Bahder Djohan dipindahkan sekolahnya ke Padang, walaupun orang tuanya masih tetap bekerja di Pariaman. Di Padang, Bahder Djohan terpaksa *indekost* lagi pada satu keluarga untuk dapat melanjutkan sekolahnya di *Hollands Inlandsche School* (HIS).⁹)

Sekolah HIS yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda adalah kelanjutan dari Sekolah Kelas Satu yang telah lebih dahulu didirikan. Sekolah HIS ini didirikan di Padang dan Bukittinggi, murid yang diterima adalah anak Belanda dan anak Indonesia yang berasal dari orang bangsawan atau orang terpadang di masyarakat seperti keluarga demang dan jaksa. Di samping HIS, Pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan *Europese Lagere School* (ELS) yang diperuntukkan bagi orang Belanda keturunan Belanda dan orang Timur Asing. Selain itu untuk orang Cina juga didirikan *Hollandsche Chinese School* (HCS), yang juga boleh dimasuki oleh anak-anak Timur Asing.¹⁰)

Sewaktu sekolah di HIS, seorang gurunya pernah bertanya pada Bahder Djohan, ia mau jadi apa kalau sudah besar nanti. Bahder Djohan menjawab bahwa ingin menjadi geolog. Mendengar jawab itu dengan mencemooh guru itu berkata : "Masa seorang pribumi akan menjadi geolog". Mendengar jawaban itu darah Bahder Djohan mendidih, hatinya merasa ditusuk karena rendahnya pandangan orang Belanda terhadap anak pribumi. Bahder Djohan bertekad menjadi orang dan mengusahakan agar sekolahnya selesai.¹¹)

Dua tahun kemudian yaitu tahun 1917, Bahder Djohan memperoleh kesempatan untuk memasuki sekolah menengah yang dalam bahasa Belanda disebut *Meer Uitgerbreid Lagere Onderwijs* (MULO) di Padang. Sewaktu memasuki sekolah MULO Bahder Djohan bertemu dengan kawan-kawannya di Bukittinggi kembali, di antaranya Mohammad Hatta.

Selain sebaai teman sekolah, Bahder Djohan dan Mohammad Hatta juga bersama dalam perkumpulan sepakbola yang

benama *Swallow*. Yang menjadi anggota perkumpulan ini umumnya murid sekolah MULO. Mereka sering mengadakan pertandingan dengan murid-murid sekolah lain di antaranya dengan murid-murid Sekolah Raja dari Bukittinggi.^{1 2})

Sewaktu mengikuti pelajaran di sekolah MULO, Bahder Djohan dan Mohammad Hatta mengikuti pelajaran agama Islam yang diikuti secara intensif. Sebelumnya, di Bukittinggi Bahder Djohan juga pernah mendapat pelajaran mengaji Al Qur'an, tetapi kegiatan mempelajari agama pada waktu itu belum teratur.

Keinginan agar anak-anak sekolah MULO di Padang diajarkan pelajaran agama telah lama dicita-citakan oleh orang tua dan tokoh masyarakat di Padang. Keinginan itu diperjuangkan oleh "Sarekat Usaha" yaitu suatu perkumpulan yang bergerak dalam bidang Sekretaris Sarekat Usaha yaitu Taher Marah Sutan tidak jemu-jemunya mendatangi pembesar daerah, supaya kehendak itu dikabulkan. Menurut beliau pemerintah tidak akan rugi apa-apa kalau memberikan pelajaran agama Islam kepada anak-anak yang memerlukan agama tersebut. Taher Marah Sutan juga mengusulkan agar kepada murid yang beragama Katholik dan Protestan juga diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti pelajaran agamanya.

Sesudah kita-kira 8 bulan memperjuangkan, akhirnya tercapailah cita-cita itu. Pada pertengahan tahun 1918 datanglah keputusan pemerintah yang memberi kesempatan kepada murid-murid MULO di Padang untuk mengikuti pelajaran agama. Pelajaran agama itu diberikan satu jam dalam seminggu dan diajarkan menurut kepercayaan masing-masing di luar tanggung jawab pimpinan sekolah.

Pada jam pelajaran agama yang telah ditentukan itu murid-murid Islam mendapat pelajaran agama dari Haji Abdullah Ahmad. Murid yang beragama Protestan dari seorang domine, dan murid yang beragama Katholik dari seorang pastor. Domine

dan pastor yang akan mengajar ditunjuk oleh gereja mereka masing-masing.¹³⁾

Haji Abdullah Ahmad mengajarkan agama Islam dengan memberi diktat. Ia adalah seorang ulama terkemuka di Minangkabau yang membawa paham pembaharuan dalam agama Islam. Haji Abdullah Ahmad mendirikan sekolah yang berdasarkan agama Islam yang bernama "Adabiah", dengan menggunakan metoda seperti di sekolah Belanda. Selain itu beliau juga diminta untuk mengajarkan agama Islam di berbagai sekolah swasta termasuk HIS Swasta. Semenjak mendapat pelajaran agama secara khusus itu, Bahder Djohan bertambah perhatiannya terhadap agama, dan ia makin rajin mengikuti suruhan agama lebih-lebih mengerjakan sembahyang.¹⁴⁾

Semenjak "Sarekat Usaha" memperjuangkan pelajaran agama bagi murid sekolah MULO, maka para pemuda mulai tertarik akan kegiatan Sarekat Usaha. Taher Marah Sutan adalah seorang idealis yang juga tertarik kepada kegiatan kemasyarakatan di samping menjadi pengusaha. Kantor Sarekat Usaha menjadi pusat pertemuan antara orang terkemuka dan kaum cerdik pandai di Padang.

Taher Marah Sutan ikut mendorong kemajuan pelajaran anak-anak di Padang, termasuk Bahder Djohan dan Mohammad Hatta. Menurut beliau hanya dengan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki anak-anak, mereka menjadi dewasa yang bertanggung jawab di kemudian hari. Pendidikan Taher Marah Sutan sendiri hanya sekolah rakyat 5 tahun, karena waktu beliau kanak-kanak sekolah HIS belum ada. Kemudian bahasa Belanda dipelajari sendiri oleh beliau, dan sewaktu menjadi Sekretaris Sarekat Usaha beliau sudah pandai berbahasa Belanda.¹⁵⁾

Bulan Januari 1918, Nazir Dt Pamuncak datang ke Padang sebagai utusan *Jong Sumatranen Bond* yang didirikan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1917. Atas bantuan Taher Marah Sutan, maka Nazir Dt. Pamuncak berhasil membentuk *Jong Sumatranen Bond* cabang Padang. Dalam pengurus cabang

Padang itu duduk Anas Munaf sebagai ketua, Bahder Djohan sebagai sekretaris, Mohammad Hatta sebagai bendahara dan Ainsyah Yahya serta Malik Hitam sebagai komisaris.^{1 6})

Walaupun Bahder Djohan telah aktif memimpin organisasi pemuda, dia tidak melupakan tugas pokoknya yaitu belajar. Ia dapat membagi waktu antara belajar dan memimpin organisasi dan mengikuti kegiatan lainnya seperti main sepakbola. Bahder Djohan telah terlatih hidup sendiri, semenjak ia bersekolah di Bukittinggi, dan kemudian pindah ke Padang. Ketika Bahder Djohan menunggu kenaikan kelas ke kelas III di MULO pada tahun 1918, ia mendapat tawaran untuk memasuki STOVIA (*School Tot Opleiding Voor Indische Artsen*) yaitu sekolah dokter bagi anak-anak bumiputra.^{1 7}) Tawaran untuk melanjutkan di STOVIA ini akhirnya diterima oleh Bahder Djohan. Dengan demikian ia terpaksa memutuskan sekolahnya hanya sampai kelas II MULO untuk melanjutkan ke STOVIA di Jakarta. Dalam pada itu kegiatannya berorganisasi juga terpaksa dihentikan oleh Bahder Djohan. Ia mengundurkan diri dari pengurus *Jong Sumatranen Bond*. Pada waktu yang bersamaan Anas Munaf juga terpaksa mengundurkan diri dari ketua *Jong Sumatranen Bond* cabang Padang, karena ia juga melanjutkan ke STOVIA. Dengan kepindahan dua tokoh ini, *Jong Sumatranen Bond* kemudian menyusun pengurus baru dengan Hussein sebagai ketua dan Mohammad Hatta sebagai sekretaris dan bendahara.^{1 8})

Pada tahun 1919 berangkatlah Bahder Djohan dari kampung halamannya, Padang, (Sumatra Barat) ke Jakarta yang waktu itu bernama Batavia atau Betawi. Bagi Bahder Djohan berpisah dengan orang tua tidak terlalu berat, karena selama bersekolah di Bukittinggi dan Padang ia juga sudah berpisah dengan orang tuanya dan hidup *indekost*.

Setelah menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan sekolah, Bahder Djohan mengurus tempat tinggalnya. Mengenai tempat tinggal ini Bahder Djohan tidak mengalami kesulitan, karena semua murid STOVIA harus ting-

gal dalam asrama yang terdapat di dalam kompleks perguruan itu. Semua perlengkapan yang diperlukan dalam asrama ini juga disediakan oleh sekolah seperti tempat tidur dan lain-lain.¹⁹⁾

Gedung STOVIA merupakan sebuah kompleks yang terdiri atas beberapa bangunan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Sekeliling gedung ini dipagar rapi, sehingga tidak mudah orang keluar masuk, terutama para pelajar yang tinggal dalam kompleks ini. Gedung STOVIA ini dapat berdiri atas jasa Dr. H.F. Roll yang waktu itu menjabat direktur sekolah. Atas usaha Dr. H.F. Rool, pada tahun 1899 mulailah dibangun gedung STOVIA dan baru selesai tahun 1902.²²⁾

Selain dari itu Dr. H.F. Roll juga berjasa meningkatkan Sekolah dokter Jawa yang sudah berdiri pada waktu itu menjadi *School Toot Opleiding Van Inlandsche Artsen* (STOVIA). Kemudian ia juga berjasa mengumpulkan uang dari orang swasta Belanda untuk membangun gedung STOVIA, dan uang yang dapat dikumpulkannya berjumlah £ 178.000. Untuk mengenang jasa-jasanya pantaslah rasanya Dr. H.F. Roll dianggap sebagai "Bapak STOVIA".

Gedung STOVIA kemudian memegang peranan penting dalam sejarah pergerakan pemuda Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 1908 di Gedung STOVIA berdiri organisasi Budi Utomo yang kemudian dianggap sebagai pelopor pergerakan nasional Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 7 Maret 1915 di Gedung STOVIA berdiri organisasi Tri Koro Dharmo yang kemudian menjelma menjadi *Jong Java*. Kemudian pada tanggal 9 Desember 1917 di Gedung STOVIA berdiri pula *Jong Sumatranen Bond*.²¹⁾

Pada tahun 1919 Bahder Djohan mulai memasuki STOVIA belajar dan tinggal dalam asrama di kompleks STOVIA. Kehidupan di asrama menimbulkan persahabatan yang mendalam di antara para pelajar. Mereka merasa sebagai satu keluarga. Faktor inilah yang menjadi pendorong bagi para pelajar untuk bersatu, dan kemudian mendirikan organisasi. Para pelajar STOVIA berhasil menarik para pelajar lainnya di Jakarta untuk

memasuki organisasi pemuda seperti *Jong Java*, *Jong Sumatranen Bond* dan organisasi pemuda lainnya.^{2 2)}

Dalam pada itu, mulai tahun 1919 mulai dibuat gedung STOVIA yang baru di Salemba. Gedung itu selesai tahun 1920, tetapi belum seluruhnya. Klinik beserta pendidikan klinis dipindahkan ke CBZ Salemba (sekarang Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Cipto Mangunkusumo) yang terletak di Jalan Diponegoro.

Pada tahun 1923 STOVIA mengadakan perbaikan kurikulum dengan dimulainya sistem ujian semester. Ujian penghabisan bagian I diselingi dengan perpanjangan waktu satu tahun dengan ujian penghabisan bagian II. Mata pelajaran klinis juga diperpanjang waktunya setengah tahun dengan menambahkannya pada tingkat persiapan. Kedudukan para dosen klinis yang bekerja di rumah sakit diatur secara resmi. Pada tahun 1926 gedung baru STOVIA yang terletak di Salemba telah selesai seluruhnya. Seluruh kegiatan STOVIA telah pindah ke Salemba.^{2 3)}

Selama mengikuti pelajaran di STOVIA, Bahder Djohan tidak melupakan kegiatannya dalam organisasi khususnya *Jong Sumatranen Bond*. Di Jakarta ia juga aktif memimpin organisasi ini dengan tidak melupakan tugas pokoknya yaitu menuntut ilmu. Tidak lama Bahder Djohan tinggal di Jakarta, ia telah diutus oleh *Jong Sumatranen Bond* untuk menghadiri kongres pertama organisasi tersebut pada bulan Juni 1919.

Dalam kongres pertama ini diadakan pergantian Pengurus Besar *Jong Sumatranen Bond* (PB JSB). Dalam kepengurusan yang baru ini Amir terpilih sebagai ketua dan Bahder Djohan sebagai sekretaris serta Mohammad Hatta sebagai bendahara.^{2 4)}

Sesudah sama-sama menuntut pelajaran di Jakarta dan sama-sama menjadi anggota PB JSB, hubungan antara Bahder Djohan dan Mohammad Hatta semakin akrab. Tiap hari Sabtu sore Mohammad Hatta mengunjungi Bahder Djohan di STOVIA dan mereka pergi berjalan-jalan. Kadang-kadang Amir juga ikut

menemui mereka, dan mereka pergi bertiga berjalan-jalan. Tetapi yang tetap mengunjungi Bahder Djohan tiap sabtu sore adalah Mohammad Hatta, kecuali kalau hari hujan.²⁵)

Dari gedung STOVIA, Bahder Djohan dan Mohammad Hatta berjalan kaki ke Pasar Baru. Setelah makan-makan dan minum-minum, mereka berdua pergi menonton bioskop. Selesai menonton bioskop, mereka berjalan-jalan sampai pukul 23.00 dan sebelum pulang ke asrama STOVIA, mereka singgah dulu di warung kopi di Senen. Warung kopi itu juga sering dikunjungi oleh pelajar STOVIA yang waktu itu terkenal dengan nama "klepek". Sesudah mengantarkan Bahder Djohan pulang ke STOVIA, Mohammad Hatta pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda.

Kebiasaan seperti ini berlangsung selama 2 tahun semenjak Hatta bersekolah di Jakarta. Selain dari hari hujan kebiasaan itu juga diundurkan kalau Bahder Djohan menghadapi ujian anatomi. Guru yang mengajarkan anatomi Dr. Vogelpoel begitu ditakuti oleh murid-murid STOVIA. Tidak ada di antara murid yang berani mengabaikan pelajaran ini lebih-lebih waktu akan menempuh ujian.²⁶)

Selama berjalan-jalan di malam hari yang itu, Bahder Djohan dan Mohammad Hatta selalu membicarakan berbagai hal. Mereka bertukar pikiran mengenai tanah air Indonesia, mengenai perkumpulan pemuda, dan mengenai perkembangan serta kemajuan *Jong Sumatranen Bond* yang mereka pimpin. Pada waktu itu Bahder Djohan di samping mempelajari ilmu kedokteran juga telah mulai tertarik kepada masalah kebudayaan. Sedangkan Mohammad Hatta di samping mempelajari ilmu ekonomi juga tertarik kepada masalah politik.

Pada tahun 1921, Mohammad Hatta berangkat melanjutkan pelajarannya ke Negeri Belanda. Setelah Hatta meninggalkan Jakarta, Bahder Djohan merasa kesepian ditinggalkan oleh teman akrabnya. Tetapi walaupun begitu Bahder Djohan berhasil mengalihkan perhatiannya pada usaha memajukan *Jong*

Sumatranen Bond. Walaupun berpisah tempat hubungan Bahder Djohan dengan Mohammad Hatta tidak terputus. Mereka masih saling berkirim surat, dan sekali-sekali Mohammad Hatta juga mengirimkan tulisannya-tulisannya mengenai ekonomi melalui Bahder untuk dimuat di Indonesia.²⁷⁾

Kegiatan Bahder Djohan dalam politik khususnya pergerakan pemuda, meningkat kepada cakrawala yang lebih luas. Bahder Djohan ikut berusaha dan mendorong persatuan organisasi pemuda yang ada waktu itu ke arah persatuan Indonesia. Untuk mewujudkan persatuan itu, maka pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan kerapatan besar pemuda, yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I yang dihadiri oleh wakil organisasi pemuda seperti *Jong Java*, *Jong Sumatranen Bond*, *Jong Ambon*, *Sekar Rukun*, *Jong Islamieten Bond*, *Stedeerende Minahasaers*, *Jong Bataks Bond*, dan *Pemuda Kaum Theosofi*.²⁸⁾

Pengundang dari Kongres Pemuda I ialah suatu panitia yang terdiri atas pengurus organisasi pemuda. Kongres ini dipimpin oleh Mohammad Tabrani sebagai ketua, Bahder Djohan sebagai wakil ketua, dan beberapa anggota pengurus lainnya dari organisasi pemuda yang duduk dalam panitia. Dalam kongres yang bersejarah ini Bahder Djohan menyampaikan pidato yang berjudul *De Positie Van De Nrouw In De Indonesische Samneving* (Kedudukan Wanita Dalam Masyarakat Indonesia).²⁹⁾

Walaupun Bahder Djohan aktif dalam pergerakan pemuda menuju kemerdekaan bangsa dan tanah air, tetapi dia tidak melupakan pelajarannya. Pada tanggal 12 Nopember 1927 Bahder Djohan dapat menyelesaikan pelajarannya dan berhasil lulus dengan memuaskan dengan memperoleh gelar *Indische Art*.³⁰⁾

1.2 *Masa Dewasa*

Setelah menyelesaikan pelajarannya di STOVIA, Bahder Djohan berhak memakai gelar *Indische Arts*, yang berarti dokter

pribumi. Sedangkan teman-teman Belandanya yang sama-sama lulus, cukup memakai gelar *Arts* saja tanpa embel-embel. Bahder Djohan kemudian diterima bekerja di CBZ (*Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting*) yang sekarang menjadi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Cipto Mangunkusumo. Ia menjadi asisten penyakit dalam dari Prof. de Langen.^{3 1)}

Sebagai *Indische Arts* gajinya hanya 250 gulden sebulan, sedangkan temannya yang Belanda mendapat gaji 500 gulden, walaupun keahlian dan diplomasnya sama dengan Bahder Djohan. Kepincangan yang diterima oleh Bahder Djohan ternyata lebih mempertebal semangat kebangsaannya.^{3 2)}

Selama bekerja pada Pemerintah Hindia Belanda banyak suka-duka yang dialami. Sukanya, ia mendapat penghargaan dan pujian dari pembimbingnya, Prof. de Langen, dan dukanya, ia sering diejek oleh teman sekerja bangsa Belanda. Kejadian itu diterima oleh Bahder Djohan sebagai pengalaman hidup yang akan memperluas cakrawala pandangannya terhadap kehidupan.

Dalam pada itu sejarah pergerakan pemuda yang mencita-citakan persatuan Indonesia mengalami pasang naik. Pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakanlah Kongres Pemuda kedua yang menelurkan Sumpah Pemuda. Pengaruh Sumpah Pemuda ini juga terasa dalam dunia kedokteran, karena semenjak Sumpah Pemuda, sebutan *Indische Arts* diganti dengan *Indonesische Arts*.

Di samping bekerja sebagai dokter di rumah sakit umum yang waktu itu terkenal dengan nama CBZ, Bahder Djohan juga aktif dalam organisasi kedokteran. Bahder Djohan dipilih menjadi sekretaris perkumpulan para dokter yang bernama *Vereeniging van Indonesische Geneeskundigen* (VIG) dari tahun 1929–1939.^{3 3)}

Sebagai sekretaris perkumpulan para dokter, Bahder Djohan selalu memperjuangkan kepincangan peraturan gaji yang diadakan oleh pemerintah kolonial. Seorang dokter pribumi

hanya mendapat gaji 50% dari gaji dokter Belanda, walaupun keahlian dan diplamanya sama. Kepincangan ini tidak dapat diterima oleh Bahder Djohan, masalahnya bukan hanya menyangkut jumlah uang, tetapi persoalan martabat atau harga diri. Bahder Djohan merasa bahwa martabatnya sebagai pribadi maupun sebagai orang pribumi merasa direndahkan oleh pemerintah kolonial.

Walaupun waktu itu Bahder Djohan bekerja pada Pemerintah Hindia Belanda, tetapi ia tidak pernah melupakan perjuangan bangsanya. Ia tetap menjadi pejuang yang gigih di bidang kedokteran untuk menaikkan derajat bangsanya. Pada waktu itu sebenarnya terjadi pertarungan yang hebat antara dokter pribumi dengan dokter Belanda dan Pemerintah Hindia Belanda pada umumnya.

Dunia kedokteran pada saat itu menerbitkan sebuah majalah kedokteran yang bernama *Genuskundig Tijdschrift van Nederlandsch Indie*. Dokter pribumi boleh berlangganan majalah ini hanya sebagai anggota luar biasa. Peraturan ini kemudian ditentang oleh para dokter pribumi, mereka serentak akan mengundurkan diri dari ikatan majalah kedokteran jika peraturan ini tidak dicabut. Berkat ancaman ini dan kegigihan Bahder Djohan sebagai sekretaris perkumpulan para dokter, maka peraturan yang menghina ini dihapuskan oleh Pemerintah Hindia Belanda.^{3 4})

Perjuangan para dokter Indonesia tidak hanya dalam bidang kedokteran, tetapi juga dalam bidang bahasa. Bahasa yang dipergunakan dalam dunia kedokteran pada waktu itu adalah bahasa Belanda yang dianggap sebagai bahasa ilmiah. Para dokter Indonesia termasuk Bahder Djohan selalu memperjuangkan pemakaian bahasa Indonesia di samping bahasa Belanda. Baru dalam kongres perkumpulan dokter Indonesia yang dilaksanakan di Solo pada tahun 1939, dokter Gularso memberikan prasarannya dalam bahasa Indonesia. Peristiwa ini merupakan yang pertama kalinya di kalangan kedokteran di Indonesia,

dan kejadian ini mendorong para anggotanya untuk mempergunakan bahasa Indonesia di bidang ilmu kedokteran.^{3 5})

Meskipun Bahder Djohan telah menjadi dokter, tetapi belum terpikir olehnya untuk berumah tangga. Ia ingin bekerja dahulu dan mengumpulkan uang yang didapat dari gaji dan penghasilan lainnya. Setelah bekerja selama 3 tahun dan usianya telah menginjak 28 tahun, barulah Bahder Djohan memutuskan untuk berumah tangga. Wanita pilihan Bahder Djohan adalah anak Minang juga, tetapi tidak sekampung dengan ibunya maupun ayahnya. Wanita itu bernama Siti Zairi Yaman yang waktu itu menjadi guru di Padang. Ia berasal dari Talawi, Sawahlunto, dan masih kemenakan dari Mr. Moh Yamin. Pernikahan antara Bahder Djohan dan Siti Zairi Yamin dilaksanakan di Padang tanggal 2 Mei 1930.^{3 6})

Setelah menikah, Bahder Djohan membawa istrinya untuk menetap di Jakarta. Perkawinan yang bahagia itu hanya dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Ilya Waleida dengan peanggilan sehari-hari "Tita". Kehidupan rumah tangga berhasil dilalui oleh Bahder Djohan dengan pengalaman suka dan duka. Dalam soal perkawinan ini Bahder Djohan adalah seorang monogamis yang konsekuen. Sampai akhir hayatnya ia tetap mempunyai seorang istri.

Sesudah berumah tangga, karir Bahder Djohan dalam pekerjaan semakin menanjak. Ilmunya semakin dalam dan pengetahuannya semakin luas serta jiwa pengabdianya semakin besar. Pada tahun 1941 Bahder Djohan dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Semarang, dan diangkat menjadi kepala Bagian Wanita dan Anak. Dalam pada itu Bahder Djohan juga telah mempersiapkan promosinya untuk menjadi dokter, tetapi cita-citanya ini tidak kesampaian, karena Jepang telah masuk ke Indonesia. Sewaktu Jepang telah mulai masuk ke Indonesia Bahder Djohan masih berada di Semarang.^{3 7})

Pada tanggal 8 Maret 1942 tentara Hindia Belanda di bawah pimpinan Jenderal Ter Poorten menyerah tanpa syarat

kepada tentara pendudukan Jepang di bawah pimpinan Jendral H. Imamura di Kalijati, Jawa Barat. Pada permulaan bulan Maret itu juga di Kantor Residen Jakarta (Batavia) diadakan penyerahan Batavia ke tangan balatentara Jepang dengan disaksikan oleh ribuan rakyat Batavia. Semenjak itu nama Kota Batavia kembali diganti oleh Jepang menjadi Jakarta.³⁸⁾

Dengan berhasil didudukinya Indonesia oleh tentara Jepang, sebagai langkah awal diadakanlah pemerintahan pendudukan militer. Tugas memulihkan ketertiban dan keamanan serta menanamkan kekuasaan diserahkan kepada suatu pemerintahan militer yang disebut *funseibu*. Untuk sementara waktu kepala pemerintahan daerah Jakarta diserahkan kepada orang Indonesia yang bernama H. Dahlan Abdullah, dan kepala polisi diserahkan kepada Mas Sutandoko. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 1942 kedudukan kepala pemerintahan Kota Jakarta diserahkan kepada orang Jepang, dan kedudukan Jakarta ditepatkan sebagai "kotapraja istimewa".³⁹⁾

Zaman pendudukan Jepang di Indonesia memperlihatkan gambaran buruk di bidang pengajaran bila dibandingkan dengan masa akhir pemerintahan Hindia Belanda. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500, sekolah lanjutan dari 50 menjadi 20 dan semua perguruan tinggi pada mulanya ditutup oleh Pemerintah Militer Jepang. Beberapa perguruan tinggi akhirnya dibuka, di antaranya ialah Perguruan Tinggi Kedokteran (*Ika Daigaku*) di Jakarta pada tanggal 1 April 1943 Perguruan Tinggi Teknik (*Kogyo Daigaku*) Di Bandung, Perguruan Tinggi Pamongpraja (*Kenkoku Gakuin*) di Jakarta dan Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor.⁴⁰⁾

Perguruan Tinggi Kedokteran yang waktu itu bernama *Ika Daigaku*, termasuk salah satu perguruan tinggi yang masih tetap dibuka oleh Jepang. Salah seorang tenaga pengajarnya adalah dokter Bahder Djohan yang waktu itu diangkat sebagai asisten proffesor penyakit tanah panas. Pada zaman ini Bahder Djohan tetap bekerja dengan tekun sesuai dengan bidang dan keahliannya. Tetapi walaupun begitu, para dokter tetap dicuri-

gai oleh Jepang, terutama Bahder Djohan. Pada bulan Februari 1943 Bahder Djohan pernah ditangkap oleh Jepang, tetapi setelah diinterogasi akhirnya dilepaskan kembali.^{4 1)}

Satu hal yang menggembirakan pada zaman pendudukan Jepang adalah dilarangnya pemakaian bahasa Belanda, dan diizinkan penggunaannya bahasa Indonesia. Lenyapnya bahasa Belanda dari dunia perguruan tinggi dan dari pergaulan sehari-hari memberikan kesempatan yang baik bagi meluasnya pemakaian dan pengembangan bahasa Indonesia. Orang Belanda sendiri dilarang memakai bahasanya, dan kalau melanggar dituduh membantu musuh (Sekutu) yang waktu itu berperang dengan Jepang. Bahasa Belanda harus diganti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jepang.^{4 2)}

Perkembangan bahasa Indonesia tiba-tiba mengalami kemajuan yang pesat, dan boleh dikatakan agak dipaksakan. Dalam waktu secepat-cepatnya orang harus bisa berbahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia harus menjadi alat komunikasi yang dapat dipergunakan ke seluruh pelosok. Makin lama bertambah banyak orang mempergunakan bahasa Indonesia, dan bertambah erat pula hubungan persaudaraan antara sesama orang Indonesia, dan bertambah erat pula hubungan persaudaraan antara sesama orang Indonesia. Bahasa Indonesia akhirnya menjadi lambang kesatuan bangsa Indonesia.

Atas desakan beberapa tokoh Indonesia, pada tanggal 20 Oktober 1943 didirikan Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Tugas komisi adalah menentukan terminologi, yaitu istilah-istilah moderen serta menyusun tata bahasa normatif dan menentukan kata yang umum bagi bahasa Indonesia. Komisi ini dipimpin oleh Kepala Kantor Pengajaran Jepang dengan dibantu oleh beberapa tokoh politik dan tokoh sastra Indonesia. Di antara tokoh-tokoh itu adalah : Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Suwandi, Mr. S. Takdir Alisjahbana dan Abas St Pamuntjak.^{4 3)}

Penguasa Jepang merasa terpaksa harus memberi jalan terhadap hasrat bangsa Indonesia untuk menyempurnakan dan memperkembangkan bahasanya. Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia kemudian memberikan kesempatan kepada masing-masing disiplin ilmu untuk mengumpulkan istilah Indonesia dalam bidang ilmu tersebut. Bidang ilmu kesehatan juga memanfaatkan kesempatan ini. Mereka membentuk Panitia Pembinaan Bahasa Kedokteran Indonesia. Panitia ini diketuai oleh dr. Aulia, wakil ketua dr. Bahder Djohan, sekretaris dr. Ahmad Ramali dan Abas St Pamuntjak (ahli bahasa) sebagai anggota. Dokter Bahder Djohan dapat mengumpulkan 3.000 istilah kedokteran dalam bahasa Indonesia.^{4 4)}

Setelah semua istilah berhasil dikumpulkan dari bermacam-macam disiplin ilmu, maka Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia mengadakan penyaringan dan pemilihan. Sampai masa terakhir pendudukan Jepang Komisi telah berhasil menetapkan kira-kira 7.000 istilah. Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 36 ditentukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, penetapan itu sebenarnya secara formal hanya mengesahkan sesuatu yang telah berlaku dalam praktek.^{4 5)}

Jepang mengizinkan pemakaian bahasa Indonesia pada waktu itu hanyalah karena terpaksa karena maksud mereka sebenarnya adalah menggantikan bahasa Belanda dengan bahasa Jepang. Mempelajari bahasa Jepang dan kemudian mempergunakannya dalam waktu singkat adalah pekerjaan yang tidak mudah. Bahasa Jepang adalah bahasa yang sulit, penggunaannya sangat rumit, apalagi pemakaian hurufnya, tidak mungkin dipelajari dalam waktu singkat. Sebagai jalan pintas untuk menggantikan bahasa Belanda dengan bahasa Jepang, maka diizinkanlah pemakaian bahasa Indonesia. Ternyata mempelajari bahasa Indonesia tidak sukar, termasuk bagi orang Jepang sendiri.

Setelah Jepang berkuasa mutlak di Indonesia, mereka melarang semua pembicaraan dan gerakan yang bersifat organisasi dan kegiatan politik. Jepang termasuk lingkungan perguruan tinggi kedokteran. Yang diawasi oleh Jepang bukan hanya tenaga pengajar, tetapi juga mahasiswa dan tenaga administrasi. Pokoknya segala gerak-gerik dan kegiatan lingkungan perguruan tinggi kedokteran diawasi secara keras dan ketat.

Karena terus diawasi dan dicurigai, maka lingkungan kedokteran pada waktu itu bekerja dengan perasaan tertekan dan was-was, termasuk dokter Bahder Djohan. Tetapi walaupun begitu mereka tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi, karena yang dilayani oleh para petugas dengan penuh adalah bangsanya sendiri. Orang Jepang jarang yang bersedia dilayani oleh dokter Indonesia. Mereka hanya bersedia kalau dilayani oleh dokter Jepang. Mereka tetap tidak percaya dan mencurigai dokter Indonesia, walaupun sebenarnya dokter itu tidak membedakan melayani kawan maupun lawan.

Pada zaman pendudukan Jepang terjadi suatu tragedi yang memilukan dalam dunia kedokteran Indonesia. Pada pertengahan tahun 1944, kurang lebih 90 orang *romusha* dari Klender dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di Jakarta, karena menderita penyakit tetanus. Meskipun telah diberikan pertolongan yang intensif, ternyata semuanya meninggal, bersama korban lain yang tidak diketahui jumlahnya. Menurut perhitungan kemudian jumlah *romusha* yang meninggal karena penyakit tetanus mencapai 1.000 orang.^{4 a)}

Setelah diadakan penyelidikan, kemudian terbukti, bahwa para korban sebelumnya telah disuntik dengan kolera, tipus, dan disentri yang mengandung toksin tetanus. Guna mengetahui dari mana datangnya toksin tersebut, Polisi Militer Jepang (*Ken Pei Tai*) menangkap dan menahan hampir seluruh karyawan Laboratorium Eykman di Jakarta. Di antara yang ditangkap itu adalah : Prof. Dr. Ahmad Muchtar (direktur Laboratorium Eykman), dan tiga orang dokter lainnya yaitu Juhana Wiradikarta, MA Hanafiah, dan Sutarman, serta beberapa orang

dokter muda dan tenaga medis lainnya di laboratorium tersebut. Mereka yang ditangkap berjumlah 15 orang dan selama dalam tahanan mereka diperiksa dengan kejam dan diarahkan kepada sasaran yang telah ditetapkan lebih dahulu oleh Jepang.⁴⁷⁾

Setelah mengalami siksaan yang cukup berat, akhirnya *Ken Pei Tai* berhasil memaksa Prof. Dr. Ahmad Muchtar mengaku mengotori vacin yang menyebabkan kematian banyak orang. Ahmad Muchtar akhirnya dihukum mati, dua dokter lainnya yaitu Marah Ahmad Arif dan Suleman Siregar meninggal dalam tahanan akibat siksaan yang sangat berat. Tahanan lainnya kemudian dibebaskan dalam keadaan menyedihkan.⁴⁸⁾

Dokter Bahder Djohan memang tidak ikut dan tidak dilibatkan dalam masalah ini, tetapi dia mengetahui banyak mengenai persoalan ini. Pada waktu itu Bahder Djohan adalah dokter ahli penyakit dalam di Rumah Sakit Perguruan Tinggi Salemba, di samping mengajar pada perguruan Tinggi Kedokteran yang waktu itu bernama *Ika Daigaku*.

Pada pertengahan tahun 1944 dokter Bahder Djohan diperintahkan oleh Prof. Dr. Tamija (orang Jepang) yang waktu itu menjabat direktur RSUP untuk memeriksa keadaan perkembangan *romusha* di Klender. Pada masa itu diperkirakan berpuluh-puluh orang *romusha* menderita penyakit *meningitis* (radang selaput otak). Untuk melaksanakan tugasnya, Bahder Djohan menghubungi Laboratorium Eykman untuk meminta bantuan dua orang laboran. Tenaga mereka itu diperlukan untuk mengadakan "fungsi lumbal" (tusukan tulang belakang) guna mengetahui benar atau tidaknya seorang menderita penyakit meningitis.⁴⁹⁾

Rombongan dokter Bahder Djohan kemudian diperkuat lagi dengan dokter Aulia dan seorang kapten dokter Jepang yang bernama Hirosato Nakamura. Sesampai di Klender dokter Bahder Djohan dan rombongan menemui penyakit yang aneh, dan sesudah mengadakan penelitian mereka mengambil kesimpulan bahwa penderita bukan mengidap penyakit meningitis, te-

tapi adalah penyakit tetanus. Seminggu yang lalu mereka mendapat suntikan dengan vacin tipus-kolera-disentri buatan Institut Pasteur di Bandung.

Sesudah diketahui diagnosa penyakit, maka para penderita dibawa ke Jakarta yang berjumlah kira-kira 90 orang. Mereka segera diberi suntikan anti tetanus. Sewaktu dokter Bahder Djohan minta agar dikirimkan bekas botol vacin kolera disentri tipus itu, Pemerintah Militer Jepang tidak mengabulkannya. Dalam pada itu dokter Bahder Djohan beserta dokter lainnya siang malam berusaha menyelamatkan para penderita, tetapi akhirnya ke 90 penderita menemui ajalnya.⁵⁰)

Untuk lebih meyakinkan diagnosanya, dokter Bahder Djohan meminta bantuan dokter Sutomo Cokronegoro (kepala Bagian Patologi Anatomik) untuk mengadakan penyayatan (*excisi*) di tempat penyuntikan vacin tipus-kolera-disentri. Hasil penelitain tiap-tiap mayat dan sayatan itu kemudian dikirimkan kepada kepala Laboratorium Eykman Prof. Dr. Ahmad Muchtar.

Tidak lama sesudah peristiwa itu, Prof. Dr. Ahmad Muchtar dan beberapa orang dokter lainnya ditangkap oleh Jepang. Ahmad Muchtar dan kawan-kawan sengaja dikorbankan oleh Pemerintah Militer Jepang untuk melindungi seorang kapten dokter yang bangsa Jepang yang bernama Hirosato Nakamura yang juga ikut dengan Bahder Djohan ke Klender. Kapten dokter Jepang itu telah keliru mengadakan percobaan menambahkan *tetanus anektosin* ke dalam vacin kolera-tipus-disentri. Hasil percobaan yang gagal itu kemudian disuntikkan kepada para *romusha* di Klender yang akhirnya menyebabkan kematian mereka.

Kalau kekeliruan dokter Jepang ini sampai diketahui oleh dunia internasional, maka reputasi kedokteran Jepang akan jatuh di mata dunia. Untuk keperluan ini, maka perlu dicarikan kambing hitam, dan kambing hitam itu adalah Prof. Dr. Ahmad Muchtar. Ahmad Muchtar pada waktu itu adalah seorang nasio-

nalis yang anti Jepang, dan sebaliknya pihak Jepang juga mencurigainya sebagai mata-mata Sekutu. Jepang kemudian menangkap Ahmad Mughtar, dan memaksanya untuk mengaku membikin vacin tipus-kolera-disentri yang dikotori dengan basil (spora) atau dengan toksin (racun) tetanus yang disuntikkan pada ribuan romusha.⁵¹)

Jepang kemudian berhasil mempengaruhi pendapat umum yang mengatakan bahwa Prof. Dr. Ahmad Mughtar benar-benar bersalah dan pantas untuk dihukum mati. Beberapa orang tokoh politik terkemuka Indonesia termasuk Ir. Sukarno juga ikut terpengaruh. Sukarno mengatakan bahwa Ahmad Mughtar harus dihukum mati, karena ia telah membunuh ribuan orang Indonesia.⁵²)

Bahder Djohan tahu benar bahwa Ahmad Mughtar tidak bersalah, dia hanya korban yang harus memikul kesalahan yang dibuat oleh dokter Jepang. Ahmad Mughtar merupakan korban kebodohan dokter Jepang yang ceroboh dalam mengadakan penelitian. Ahmad Mughtar adalah teman sejawat Bahder Djohan. Ia kenal siapa Ahmad Mughtar, tidak mungkin Ahmad Mughtar membunuh bangsanya sendiri.

Sampai saat terakhir pendudukan Jepang, dokter Bahder Djohan tetap menyumbangkan tenaganya dalam bidang kedokteran. Di samping itu ia juga ikut mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, terutama dalam dunia kedokteran. Dalam pertarungan kultural antara dokter Jepang dan dokter Indonesia, Bahder Djohan ikut memegang peranan penting.

CATATAN BAB I

- 1). *Wawancara* dengan Prof. Dr. Bahder Djohan tanggal 29 Maret 1973 di Jalan Kimia No. 9 Jakarta, hal. 1.
- 2). Mardanas Safwan dan Sutrisno Kutoyo (editor), *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatra Barat*, Depdikbud Sumatra Barat, Padang 1983, hal 75.
- 3). *Wawancara* dengan Prof. Dr. Bahder Djohan, *opcit* hal 1.
- 4). Mardanas Safwan dan Sutrisno Kutoyo (editor), *opcit* hal 77.
- 5). *Wawancara* dengan Prof. Dr. Bahder Djohan, *opcit* hal 2
- 6). Mohammad Hatta, *Memoir*, Tintamas Jakarta 1978, hal 23.
- 7). *Ibid*, hal 25.
- 8). *Ibid*, hal 24.
- 9). *Wawancara* dengan Prof Dr Bahder Djohan, *opcit* hal 3.
- 10). Mardanas Safwan dan Sutrisno Kutoyo, *opcit*, hal 80.
- 11). Thalib Ibrahim, *Jiwa Juang Bangsa Indonesia*, Mahabudi Jakarta 1975, hal 71.
- 12). Mohammad Hatta, *opcit*, hal 36.
- 13). *Ibid*, hal 39.
- 14). *Wawancara* dengan Prof Dr Bahder Djohan, *opcit* hal 4.
- 15). Mohammad Hatta, *opcit*, hal 40.
- 16). *Ibid*, hal 44.
- 17). *Wawancara* dengan Prof Dr Bahder Djohan, *opcit* hal 5.

- 18). *Ibid*, hal 47.
- 19). Wawancara dengan Prof Dr Bahder Djohan 15-4-1974 di Jalan Kimia No. 9 Jakarta, hal 1.
- 20). SZ. Hadisutjipto, *Gedung STOVIA sebagai Cagar Sejarah*. Dinas Musium dan Sejarah DKI Jakarta 1973, hal 23.
- 21). *Ibid*, hal 25.
- 22). *Ibid*, hal 27.
- 23). *Ibid*, hal 33.
- 24). Wawancara dengan Prof Dr Bahder Djohan, *opcit*, hal 2, Mohammad Hatta, *Memoir*, hal 78.
- 25). Mohammad Hatta, *Memoir*, hal 70.
- 26). *Ibid*, hal 70.
- 27). Wawancara dengan Prof Dr Bahder Djohan, *opcit* hal 2..
- 28). Mardanas Safwan, *Peranan Gedung Kramat Raya 106 Dalam Melahirkan Sumpah Pemuda*, Dinas Musium Dan Sejarah DKI Jakarta 1973, hal 23.
- 29). Bahder Djohan, *De Positie Van de Vrouw in de Indonesische Samenleving*, verslag van het Eerste Indoneische Jengdevingres, Terjemahan Darsjaf Rahman, Yayasan Idayu Jakarta 1980.
- 30). Wawancara dengan Prof Dr Bahder Djohan, *opcit*, hal 3.
- 31). *Ibid*, hal 4.
- 32). Thalib Ibrahim, *opcit*, hal 71.
- 33). Wawancara dengan Prof Dr Bahder Djohan, *opcit*, hal 4.
- 34). Thalib Ibrahim, *opcit*, hal 72.
- 35). *Ibid*, hal 72.
- 36). Wawancara dengan Prof Dr Bahder Djohan, *opcit*, hal 5.
- 37). *Ibid*, hal 5.
- 38). Mardanas Safwan, *Peranan Gedung Menteng Raya 31 Dalam Perjuangan Kemerdekaan*, Dinas Musium dan Sejarah DKI Jakarta 1973, hal 13.
- 39). Nogroho Notosusanto (editor), *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka Jakarta 1977, hal 8.
- 40). *Ibid*, hal 175.
- 41). Wawancara dengan Prof Dr Bahder Djohan, *opcit*, hal 5.

- 42). Nugroho Notokusanto (editor), *opcit*, hal 181.
- 43). *Ibid*, hal 183.
- 44). Thalib Ibrahim, *opcit*, hal 72.
- 45). Nugroho Notokusanto, *opcit*, hal 184.
- 46). mA Harafiah SM. *Drama Kedokteran Terbesar, Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah jakarta 1976*, hal 11.
- 47). *Ibid*, hal 12.
- 48). *Ibid*, hal 12.
- 49). Bahder Djohan, *Suatu Kisah Sedih yang Menuntut Peninjauan Kembali*, Dalam Drama Kedokteran Terbesar, *opcit*, hal 29.
- 50). *Ibid*, hal 30.
- 51). *Ibid*, hal 31.
- 52). *Ibid*, hal 27.

BAB II PERJUANGAN BAHDER DJOHAN

2.1 Pemimpin Gerakan Pemuda

Pada tanggal 9 Desember 1917 di Jakarta yang waktu itu bernama Batavia didirikan *Jong Sumatranen Bond* (JSB). Rapat pembentukan organisasi ini diadakan di Gedung STOVIA yang sekarang bernama Gedung Kebangkitan Nasional. Sebelumnya, di Gedung STOVIA juga telah berdiri organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian pada tanggal 7 Maret 1915 di Gedung STOVIA juga berdiri suatu organisasi pemuda yang bernama Tri Koro Dharmo, yang akhirnya menjelma menjadi *Jong Java*.¹⁾

Anggota Pengurus Besar (PB) YSB terdiri atas tokoh-tokoh pemuda terkemuka yang berasal dari Sumatra yang bersekolah di Jakarta. Mereka itu adalah : Tengku Mansur (ketua), Anas (Sekretaris I), Amir (sekretaris II), Marzuki (bendahara), dan Munir Nasution dan Kanun (komisaris). Semua anggota pengurus besar ini terdiri atas murid-murid STOVIA.²⁾

Tujuan *Jong Sumatranen Bond* ialah :

1. Memperkuat pertalian antara pemuda Sumatra yang masih belajar serta menanamkan keinsyafan dalam jiwanya, bahwa mereka mempunyai seruan hidup untuk menjadi pemimpin dan pendidik bangsanya.

2. Menimbulkan perhatian pada anggotanya dan orang lain terhadap tanah air dan orang Sumatra serta untuk mempelajari adat istiadat Sumatra, keseniannya, bahasa-bahasanya, pertaniannya dan sejarahnya.

Jong Sumatranen Bond akan berusaha mencapai tujuan itu dengan memerangi keangkuhan suku bangsa yang merasa lebih tinggi sukunya dari suku-suku lain di antara penduduk Sumatra. Usaha itu dicapai dengan memperkuat rasa persatuan antara mereka dengan ikut berusaha mengangkat derajat penduduk Sumatra dan melakukan propaganda dengan memberikan kursus, pidato-pidato dan lain-lain.³)

Dalam pada itu di Padang telah berdiri semacam perkumpulan yang diberi nama Sarekat Usaha, di mana dalam perkumpulan ini bertemu para pelajar yang bersekolah di Padang. Mereka berkumpul dan membicarakan masalah sosial dan kemasyarakatan di luar jam pelajaran sekolah. Para pelajar ini biasanya pandai membagi waktu antara kegaitan sekolah, kegiatan dan pekerjaan rumah dan kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Perkumpulan Sarekat Usaha ini dipimpin oleh Taher Marah Sutan, seorang pengusaha di Padang. Kegiatan Sarekat Usaha pada mulanya adalah mengurus surat-surat yang datang dan mengirim surat-surat ke alamat yang dituju, terutama yang berhubungan dengan masalah perdagangan.

Taher Marah Sutan adalah seorang idealis yang giat bekerja dengan tidak kenal lelah. Kantor Sarekat Usaha juga dijadikannya menjadi pusat pertemuan antara para pemuda dengan golongan cerdik-pandai di Padang. Pagi hari Taher Marah Sutan bekerja sebagai pegawai suatu agen kapal di Teluk Bayur. Sesudah bekerja sampai pukul 15.00 ia langsung ke kantor Sarekat Usaha sampai pukul 19.00, dan pada pukul 20.00 baru sampai di rumah.

Sekolah Taher Marah Sutan hanya sampai kelas 5 Sekolah Rakyat, tetapi ia rajin belajar sendiri. Bahasa Belanda ia pelajari sendiri, begitu juga pengetahun umum lainnya, termasuk masa-

lah politik. Ia sangat rajin membaca dan mengasah pengetahuannya. Taher Marah Sutan berlangganan dua buah surat kabar terkemuka di Jawa yaitu *Utusan Hindia* yang dipimpin oleh HOS. Cokroaminoto di Surabaya dan *Neraca* yang dipimpin oleh Abdul Muis dan kemudian juga oleh H. Agus Salim di Jakarta. Ia juga mengikuti *Verslagen Volksraad* guna mengikuti pembicaraan dalam "Dewan Kolonial" itu.⁴)

Para pemuda pelajar yang sering berkumpul di Kantor Serikat Usaha, di antaranya adalah Mohammad Hatta, Bahder Djohan, Arif dan Amir. Mereka itu murid Sekolah MULO di Padang, dan umumnya mereka adalah murid yang pintar di sekolahnya. Hubungan Taher Marah Sutan dengan Bahder Djohan dan kawan-kawannya semakin akrab, sesudah Sarekat Usaha memperjuangkan pelajaran agama bagi murid Sekolah MULO sesuai dengan agamanya masing-masing. Bagi murid Sekolah MULO yang beragama Islam pelajaran agama diberikan oleh Haji Abdullah Ahmad. Murid yang memeluk agama Kristen pelajaran agama juga diberikan oleh pemuka agama mereka.

Taher Marah Sutan juga memberikan pelajaran politik kepada para pelajar yang berkumpul di Sarekat Usaha. Dia mencecitkan perjuangan HOS. Cokroaminoto dalam Sarekat Islam, menceritakan Abdul Muis dan apa tujuan Sarekat Islam yang mereka pimpin. Dalam lingkungan orang-orang terkemuka di Padang pada waktu itu Taher Marah Sutan dipandang sebagai "*primus inter pares*". Apabila Haji Abdullah Ahmad terkemuka dalam gerakan agama, maka Taher Marah Sutan terkemuka dalam urusan sosial.⁵)

Pada bulan Januari 1918 Nazir Dt. Pamuncak datang ke Padang sebagai utusan *Jong Sumatranen Bond* dari Jakarta. Ia diminta oleh PB JSB untuk menjadi propagandis ke Sumatra Barat dan mendirikan cabang perkumpulan itu di Padang dan Bukittinggi. Kedatangan Nazir Dt. Pamuncak di Sumatra Barat disambut dengan gembira oleh Taher Marah Sutan dan akan membantu usaha itu dengan sekuat tenaga. Kedatangan Nazir Dt. Pamuncak di Padang bertepatan pula dengan kedatangan

murid Sekolah Raja dari Bukittinggi yang mengadakan pertandingan sepak bola dengan murid Sekolah MULO di Padang.

Atas bantuan Taher Marah Sutan dan inisiatif dari Bahder Djohan dan Mohammad Hatta, maka diadakan pertemuan antara Nazir Dt. Pamuncak dengan para pelajar. Di samping murid Sekolah MULO Padang murid Sekolah Raja Bukittinggi juga diundang dalam rapat ini. Dalam rapat itu Nazir Dt. Pamuncak mengucapkan pidatonya dalam bahasa Belanda, ia menguraikan tujuan mendirikan *Jong Sumatranen Bond* dan cara untuk mencapai tujuan itu seperti yang telah digariskan oleh PB. JSB.

Nazir Dt. Pamuncak kemudian menguraikan peranan pemuda Sumatra dalam menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin dan pendidik, guna mengangkat derajat bangsanya yang masih terkebelakang. Kemudian ia mengajak pemuda-pemudi Sumatra Barat untuk mendirikan cabang JSB.⁶⁾

Setelah Nazir Dt. Pamuncak selesai dalam urainnya, maka tampil seorang pelajar putri Sekolah MULO yang bernama Ainsyah Yahya. Dalam pidatonya yang diucapkan dalam bahasa Belanda Ainsyah Yahya antara lain mengatakan bahwa kaum wanita harus bahu membahu dengan kaum pria dalam perjuangan pemuda dalam wadah *Jong Sumatranen Bond*. Rapat propaganda untuk mendirikan cabang *Jong Sumatranen Bond* juga diadakan di Kota Bukittinggi. Para pelajar di kota ini juga sangat antusias menyambut didirikannya cabang JSB.⁷⁾

Rapat yang kedua diadakan pada keesokan harinya di serambi muka Kantor Sarekat Usaha. Dalam rapat ini Nazir Dt. Pamuncak berhasil membentuk pengurus *Jong Sumatranen Bond* cabang Padang dengan susunan pengurus adalah : Anas Munaf (ketua), Bahder Djohan (sekretaris), Mohammad Hatta (bendahara), Ainsyah Yahya dan Malik Hitam (komisaris).⁸⁾

Rapat JSB diadakan sebulan sekali, dan rapat pengurus kalau perlu diadakan seminggu sekali, rapat itu diadakan di kantor Sarekat Usaha. Titik berat pekerjaan pengurus JSB ca-

bang Padang pada bulan-bulan pertama terletak pada Bahder Djohan. Sebagai Sekretaris ia melakukan surat menyurat dengan Pengurus Besar JSB di Jakarta.⁹⁾

Pada tahun 1918 sesudah Bahder Djohan dilantik menjadi sekretaris *Jong Sumatranen Bond* cabang Padang, dia diejek oleh gurunya, orang Belanda. Guru itu membuat gambar seorang anak yang sedang berjalan dengan memegang sebuah bendera. Sesudah membuat gambar, guru itu berkata kepada murid-muridnya, "Ini lihat Bahder Djohan memegang bendera bangsanya". Mendengar ejekan guru itu murid-murid yang lain bersorak dengan riuh-rendah. Bahder Djohan sangat malu menerima ejekan guru dan teman-temannya itu, tetapi terpaksa ia diamkan saja. Ejekan semacam ini juga sering dialami oleh pengurus dan anggota JSB lainnya, tetapi semangat mereka tidak luntur.¹⁰⁾

Untuk menggerakkan roda organisasi tentu diperlukan uang, dan tugas untuk mengumpulkan uang ini diserahkan kepada Mohammad Hatta sebagai bendahara. Uang organisasi di dapat dari iuran para anggota dan bantuan daripada donatur yang tiap bulan memberikan sumbangannya. Para anggota JSB disadarkan oleh pengurus agar setia kepada organisasi, termasuk kesetiaan membayar iuran. Para donatur harus diyakinkan tentang maksud dan tujuan JSB dan apa yang dicita-citakan. Perhatian kepada JSB harus dibangkitkan oleh para pengurus dan anggota JSB. Perhatian itu harus dihidupkan dengan mengadakan propaganda dengan memberikan penerangan tentang cita-cita dan tujuan JSB. Dengan demikian anggota JSB langsung berhubungan dengan masyarakat, dengan orang-orang tua dan cerdik-pandai dalam masyarakat.

Rapat pengurus JSB kemudian memutuskan bahwa mereka akan mengumpulkan dana pada waktu libur sekolah dengan mengunjungi berbagai kota di Sumatra Barat. Tempat-tempat yang akan dikunjungi adalah : Pariaman, Batusangkar, Solok dan Sawahlunto. Padang Panjang dan Payakumbuh dianggap

termasuk daerah JSB cabang Bukittinggi, karena di kota itu juga telah berdiri cabang JSB. Setelah diadakan pembagian tugas, maka Mohammad Hatta dan Malik Hitam bertugas di Batusangkar, Anas Munaf membantu di Payakumbuh dan Bahder Djohan mengadakan operasinya di Padang.^{1 1)}

Usaha pengumpulan uang itu berjalan lancar, donatur bertambah banyak, sehingga kas JSB cabang Padang dapat membiayai kegiatan organisasi. Dalam kegiatan JSB cabang Padang, mereka juga tidak melupakan unsur rekreasi, pengurus mengerti kebutuhan pemuda pemudi akan hiburan.

Pada bulan September 1918 Abdul Muis yang waktu itu menjabat wakil ketua Central Sarekat Islam (CSI) datang ke Sumatra Barat sebagai anggota *Volksraad* (Dewan Rakyat) yang baru diangkat. Atas anjuran Taher Marah Sutan, maka pengurus JSB cabang Padang juga ikut menjemput tokoh tersebut di Teluk Bayur. Selama Abdul Muis di Padang berkali-kali ia mengadakan rapat dengan pemuka masyarakat daerah ini, dan tiap-tiap rapat itu selalu dihadiri oleh pengurus JSB.^{1 2)}

Dalam kegiatannya JSB cabang Padang terus melakukan kegiatan kemasyarakatan, termasuk soal perkawinan dan kedudukan kaum wanita. Pada waktu Bahder Djohan memimpin JSB cabang Padang terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan masyarakat pada waktu itu. Seorang gadis Minang ingin melangsungkan perkawinannya dengan seorang pemuda dari Jawa; keluarga dari pihak wanita menentang rencana perkawinan itu. *Jong Sumatranen Bond* cabang Padang memilih memihak gadis itu sehingga akhirnya perkawinan itu dapat dilaksanakan atas bantuan JSB. *Jong Sumatranen Bond* cabang Padang juga mendesak kepada Pemerintah Hindia Belanda agar memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak wanita untuk belajar di bidang ilmu pengetahuan. Perjuangan JSB ini lambat-laun dikabulkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Perjuangan JSB sudah jauh melampaui batas-batas yang hanya mencakup soal-soal kedaerahan.^{1 3)}

Pada tahun 1919 Anas Munaf dan Bahder Djohan terpaksa meletakkan jabatan mereka sebagai ketua dan sekretaris JSB cabang Padang, karena mereka pindah belajar ke STOVIA di Jakarta. Untuk menggantikan mereka berdua, maka JSB cabang Padang memilih Hussein sebagai ketua dan Mohammad Hatta merangkap jabatan sekretaris di samping bendahara. Tugas Mohammad Hatta semakin berat, dan untuk itu ia berusaha mendidik kader untuk menggantikan kedudukan mereka.¹⁴⁾

Pada tahun 1919 berangkatlah Bahder Djohan ke Jakarta untuk melanjutkan sekolahnya di STOVIA. Di samping menjadi murid STOVIA Bahder Djohan juga tidak melupakan kegiatannya dalam organisasi khususnya *Jong Sumatranen Bond* (JSB) pusat di Jakarta. Karena kegiatannya dalam organisasi itu, maka pada akhir tahun 1919 Bahder Djohan ditunjuk menghadiri kongres pertama JSB di Padang. Utusan yang datang dari Jakarta adalah : Amir, Anas, Marzuki dan Bahder Djohan. Uang yang dipergunakan untuk melaksanakan kongres disediakan oleh JSB cabang Padang, organisasi kongres dan agenda di tangan Pengurus Besar (PB) JSB yang datang dari Jakarta.

Ketua PB JSB Tengku Mansyur tidak dapat datang ke Padang, berhubung dengan ujian semi *arts* yang akan ditempuhnya. Kongres itu dipimpin oleh Anas, Amir dan Marzuki, sebagai sekretaris I, sekretaris II dan bendahara. Kongres diadakan pada bulan Juni 1919, tetapi Mohammad Hatta tidak bisa menghadiri kongres, karena ia sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke Jakarta melanjutkan sekolahnya, walaupun sebelumnya Mohammad Hatta aktif mengumpulkan uang untuk mengadakan kongres.¹⁵⁾

Pada waktu Kongres JSB pertama dilangsungkan di Padang pada tahun 1919 itu, yang menjadi residen Sumatra Barat adalah Le Febore yang menganut paham Sosialis. Dia sangat menunjukkan simpati terhadap gerakan pemuda. Pada malam pembukaan Kongres JSB, residen itu dengan penuh perhatian

mendengarkan uraian-uraian yang sebagian diucapkan dalam bahasa Belanda.

Di waktu istirahat, residen Sumatra Barat itu menyatakan keinginannya untuk mengikuti pembicaraan sampai selesai, hanya minta sedikit pengisi perut, sehingga dia tidak usah pulang. Mendengar permintaan ini para pemuda anggota JSB, segera menyiapkan nasi goreng, dan beberapa di antara mereka menemani residen menyantap hidangan. Keesokan harinya di dalam surat kabar Belanda yang terbit di Padang disiarkan berita bahwa "Residen Makan Bersama Konconya di Dalam Waring."¹⁶)

Setelah selesai Kongres JSB pertama, maka dibuatlah sebuah tugu sebagai kenang-kenangan kepada kongres itu. Tugu itu terletak di sebuah lapangan dekat Hotel Muara di Padang, di tepi Pantai Padang. Pada satu segi dari tugu itu ditulis bahasa Belanda, *Terherinnering aan het I ste Congres van de JSB*. Tugu itu sampai sekarang masih berdiri di Padang, dan mungkin di seluruh Indonesia sebagai satu-satunya tanda peringatan terhadap gerakan pemuda. Tugu itu mirip dengan Tugu Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibangun di Jakarta pada 1946.¹⁷)

Tidak berapa lama Bahder Djohan berangkat ke Jakarta, maka pada bulan Juni 1919 berangkat pulalah Mohammad Hatta ke Jakarta melanjutkan sekolahnya. Kalau Bahder Djohan memilih bidang kedokteran, maka Mohammad Hatta memilih bidang ekonomi dalam studinya. Kedua sahabat ini kembali bertemu dan aktif untuk ikut memimpin *Jong Sumatranen Bond*, di samping menuntut pelajaran. Tiap Sabtu sore Mohammad Hatta mengunjungi Bahder Djohan di STOVIA. Mereka membicarakan berbagai masalah termasuk *Jong Sumatranen Bond*.

Dalam salah satu pertemuan mereka pada bulan Desember 1919 Bahder Djohan dan Mohammad Hatta kembali membicarakan perkembangan *Jong Sumatranen Bond* (JSB). Tengku

Mansyur dan Marzuki segera akan meninggalkan JSB, karena tidak lama lagi mereka akan menjadi *Indische Art. Jong Sumatranen Bond* harus memilih pengurus baru untuk melancarkan roda organisasi.

Pada akhir Desember 1919 diadakan Kongres JSB yang kedua dan kongres itu diadakan di Gedung Loge di pojok *Waterlooplein* (langpangan Banteng sekarang), tepatnya Gedung Kimia Farma sekarang. Tengku Mansyur membuka kongres itu dengan mengatakan bahwa pengurus JSB yang baru akan terus berjuang melaksanakan cita-cita JSB. Kesulitan yang dihadapi oleh pengurus lama hendaknya dapat diatasi oleh pengurus baru yang terdiri atas : ketua (Amir) sekretaris (Bahder Djohan) dan bendahara (Mohammad Hatta).¹⁸)

Setelah pengurus baru JSB terpilih, di mana Bahder Djohan diangkat menjadi sekretaris PB JSB, maka tugasnya dalam organisasi semakin berat. Susunan pengurus kemudian dilengkapi dengan mengangkat bendahara II yaitu Burhanuddin, dan beberapa komisaris yang akan membantu kerja ketua, sekretaris dan bendahara.

Kongres JSB yang kedua dihadiri oleh para donatur. Dalam kongres itu mereka juga ikut bicara dan memberikan nasihat. Di antara mereka adalah Pater van Rijckevorsel dan Ir. Furnier. Dalam pidatonya, Ir. Furnier menganjurkan supaya JSB giat bekerja sama dengan *Jong, Java* untuk mencapai terbentuknya *Jong Indie*¹⁹)

Pengurus Besar (PB) JSB mengadakan rapat yang pertama pada bulan Januari 1920 sesudah liburan natal. Rapat bermula dengan mengambil alih tugas PB yang lama dengan tidak banyak seremoni. Di antara pengurus besar baru diadakan pembagian pekerjaan sesuai dengan status mereka. Komisaris diberi tugas meringankan pekerjaan ketua, sekretaris dan bendahara, di sekolah mereka masing-masing, mereka dapat mengadakan pertemuan dan membantu memungut uang kontribusi.

Tugas PB JSB yang baru ternyata tidak ringan, terutama dalam mengumpulkan uang untuk melancarkan roda organisasi. Pada waktu pengurus baru PB JSB mulai melakukan tugasnya, organisasi mempunyai utang sebanyak lebih kurang Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah). Di samping itu pengurus lama juga mempunyai utang pada percetakan Evolusi yang dipimpin oleh Lanjumin Dt. Tumanggung sebanyak Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). Percetakan tidak mau lagi mencetak majalah *Jong Sumatera* apabila tidak dibayar kontan.²⁰⁾

Untuk mengatasi masalah ini, pengurus kemudian mengadakan rapat. Pengurus berketetapan hati bahwa untuk melaksanakan organisasi yang teratur sangat diperlukan uang. Rapat memutuskan dua masalah penting. Keputusan pertama ialah menyirikan nama-nama orang yang tidak membayar iuran organisasi yang diusulkan oleh bendahara Mohammad Hatta. Kebijakan ini tidak disetujui oleh Ketua JSB. Amir, karena akan menimbulkan kegoncangan di masyarakat. Daftar itu banyak memuat nama orang terkemuka dan terhormat. Namun demikian Bahder Djohan menyokong usul Hatta, demi kelancaran roda organisasi. Akhirnya dengan perasaan berat Amir terpaksa mengalah, karena ia kalah suara. Keputusan kedua adalah mendatangi orang-orang tua dan tokoh terkemuka yang berasal dari Sumatra untuk memperkenalkan pengurus baru dan meminta bantuan mereka.

Tokoh yang akan dikunjungi adalah Lanjumin Dt Tumanggung, H. Agus Salim, Abdul Muis dan Sutan Muhammad Zain. Mengunjungi Lanjumin Dt Tumanggung didahulukan, karena masalah utang JSB kepadanya. Yang diutus mengunjungi Lanjumin adalah : Amir, Bahder Djohan dan Mohammad Hatta, serta Marzuki sebagai bendahara pengurus lama. Setelah mereka memperkenalkan diri, maka diterangkan program pengurus baru JSB, dan kemudian mereka menyanggupi akan melunasi seluruh utang secara cicilan. Lanjumin dapat menyetujui kebijakan pengurus baru JSB, ia berjanji akan terus menerbitkan

majalah *Jong Sumatra* yang akan terbit tiap bulan. Pembayaran akan dilakukan dengan bayar kontan setelah majalah terbit.^{2 1})

Kunjungan terhadap Haji Agus Salim dilakukan pada bulan Februari 1920, dan yang diutus mengunjungi tokoh ini adalah: Amir, Bahder Djohan dan Mohammad Hatta. Amir dan Bahder Djohan sebelumnya telah kenal dengan H. Agus Salim, sedangkan Moh. Hatta baru pertama kali kenal. Setelah memperkenalkan diri, maka kemudian pembicaraan lebih banyak mengenai masalah politik dan kemasyarakatan.

H. Agus Salim menerangkan bahwa Nabi Muhammad Saw yang diutus oleh Tuhan mengembangkan Islam di atas dunia ini sudah 12 abad lebih dahulu dari Marx yang mengajarkan sosialisme. Perkataan sosialisme baru didapat pada abad ke-19. Sosialisme Marx anti Tuhan, tetapi tujuan yang hendak dicapai masyarakat yang berdasarkan sama rata sama rasa yang bebas dari kemiskinan sudah lebih dahulu diberitakan dalam Islam. Sayangnya ulama kita hanya mengutamakan segi ibadat dan *fiqh* dan melupakan segi kemasyarakatan, padahal segi kemasyarakatan itu juga perintah Allah dalam Al Qur'an.

H. Agus Salim juga mengeritik tabiat kaum terpelajar yang tergantung di awang-awang, karena didikan barat mereka lupa agama. Lagak hidup kebarat-baratan tetapi sikap nrasional barat tidak pernah dimiliki. Ia juga mengritik gerakan pemuda yang hidup terkurung dalam idea kedaerahan, kepualuan masing-masing, dan lupa akan tanah air yang sebenarnya yaitu Hindia. Kita harus melenyapkan Belandanya, tinggal Hindianya bagi kita.^{2 2})

Pada pertengahan bulan Maret 1920, Amir, Bahder Djohan dan Moh. Hatta mengunjungi Abdul Muis. Setelah memperkenalkan diri, maka pembicaraan beralih ke soal politik yang banyak bicara adalah Abdul Muis, Bahder Djohan dan kawan-kawan lebih banyak mendengar. Dalam pertemuan itu Abdul Muis membicarakan tentang pemerintahan sendiri bagi Hindia Belanda. Juga disinggung tentang areal sawah rakyat yang dita-

nami tebu oleh perkebunan Belanda. Abdul Muis tidak percaya bahwa Belanda akan menepati "Janji 18 November 1918". Akhirnya Abdul Muis mengharapkan agar JSB kelak dapat menyediakan tenaga muda bagi pergerakan kebangsaan menuju *home rule* dan kemajuan tanah air.^{2 3})

Sesudah mengunjungi Abdul Muis, PB JSB mengunjungi ST. Muhammad Zain, dan yang diutus menemui tokoh ini adalah : Amir, Bahder Djohan dan Mohammad Hatta. Setelah mereka memperkenalkan diri, maka mulailah membicarakan masalah sosial dan kemasyarakatan. Bahder Djohan menanyakan kepada St. Muhammad Zain mengapa orang-orang tua tidak mendirikan PB Sarekat Sumatra di daerah Sumatra yang berpusat di Padang atau Meda. Menjawab pertanyaan Bahder Djohan, maka St. Muhammad Zain mengatakan bahwa Sarekat Sumatra juga akan didirikan di Jakarta, karena orang terkemuka Sumatra rata-rata berkumpul di sini. Kemudian Amir juga membenarkan bahwa Sarekat Sumatra harus didirikan dan mempunyai wakil di *Volksraad*.

Pembicaraan selanjutnya adalah mengenai bahasa Melayu yang hendak digiatkan oleh Balai Pustaka. Bahder Djohan kemudian menanyakan pendapat St. Muhammad Zain mengenai masalah ini. Apakah perlu menjalin roman-roman modern ke dalam bahasa Melayu, dan mengarang cerita Melayu yang berasal dari daerah sendiri. Menanggapi pendapat Bahder Djohan ini, maka St. Muhammad Zain mengatakan bahwa kedua jalan itu harus ditempuh. Bahasa Melayu dan bahasa asing keduanya harus dipelajari.^{2 4})

Dengan mengunjungi keempat tokoh yang berasal dari Sumatra itu, maka pengurus baru PB JSB telah melaksanakan tugas mereka. Para pengurus mengadakan pembagian pekerjaan, sehingga tugas JSB menjadi lancar. Majalah *Jong Sumatra* mulai tetap terbit tiap bulan, iuran anggota lancar, sumbangan donatur juga masuk dan pembayaran majalah tepat, pada waktunya. Dengan keuangan yang memadai Bahder Djohan dapat menjalankan roda organisasi dengan teratur pula.

Para pengurus JSB, khususnya Bahder Djohan dan Mohammad Hatta aktif memimpin organisasi, ditambah lagi hubungan mereka sangat akrab. Dalam pertemuan formal maupun informal Bahder Djohan dan Muhammad Hatta selalu membicarakan berbagai masalah seperti masalah sosial dan kebudayaan. Mereka membicarakan perbedaan antara kultur Barat dan kultur Timur tempat bahasa Melayu di Benua Asia dan di Hindia Belanda.

Nama Indonesia pada waktu itu belum dikenal, yang dikenal baru *Indonesische*. Penduduk Hindia Belanda termasuk ke dalam lingkungan *Indonesische Volkeren*. Indonesia sebagai nama politik, nama golongan rakyat yang dijajah oleh Negerland baru dikemukakan dan dicetak oleh Perhimpunan Indonesia (PI) di Negeri Belanda pada tahun 1922. Nama yang diberikan pada diri sendiri itu kemudian diterima oleh seluruh pergerakan di tanah air, pergerakan orang dewasa dan pemuda.²⁵)

Dalam tiap pertemuan Bahder Djohan dan Mohammad Hatta selalu membicarakan kerjasama antara penduduk di Nusantara pada waktu itu. Organisasi-organisasi *Jong Sumatranen Bond*, *Jong Java*, *Jong Ambon* dan *Jong Minahasa* harus menjelma menjadi *Jong Indie*. Pendapat Bahder Djohan dan Mohammad Hatta ini juga sejalan dengan pikiran Amir dan Basuki dari *Jong Java*. Tetapi pada waktu itu cita-cita itu belum dapat diwujudkan, karena masing-masing suku masih tetap berpegang pada sukunya, hanya beberapa tokoh pemuda yang menginginkan persatuan itu seperti Bahder Djohan dan Mohammad Hatta.

Bahder Djohan juga bercita-cita untuk memajukan bahasa Melayu, dan untuk itu perlu diadakan suatu majalah berkala, mula-mula sekali tiga bulan kemudian tiap bulan. Majalah itu diberi nama Malaya. Antara Mohammad Hatta dan Bahder Djohan diadakan pembagian pekerjaan, Bahder Djohan akan mengutamakan perhatiannya kepada persiapan redaksi majalah itu dan Mohammad Hatta menumpahkan pikirannya kepada organisasi biaya penerbitan.

Bahder Djohan waktu sekolah di Padang pernah menulis satu karangan dalam bentuk roman yang dimuat sebagai *fenil-leton*. Karangan itu dimuat dalam surat kabar *Neraca* yang berjudul "Tenggelam Dalam laut Penghidupan". Roman itu melukiskan hidup suatu keluarga nelayan di pantai Padang, yang sangat modern rasanya pada waktu itu. Karena itu menurut pendapat Mohammad Hatta, tepat sekali kalau Bahder Djohan yang memimpin majalah itu, dan ia yang menyediakan biayanya.

Bahder Djohan dan Mohammad Hatta juga sering membicarakan adat Minangkabau khususnya Koto Gadang yang mereka anggap masih kolot. Gadis Koto Gadang tidak boleh kawin dengan laki-laki dari daerah lain, walaupun sama-sama Minang, apalagi dari luar daerah Minang. Bahder Djohan makin tidak mengerti lagi, adat itu juga disokong oleh pemuda terpelajar yang berasal dari Koto Gadang.

Menghadapi adat yang kolot ini, pengurus JSB tetap bersikap tegas. Pengurus JSB membela seorang gadis Koto Gadang yang kawin dengan seorang pemuda dari Jawa. Sebagai konsekuensi dari sikapnya ini pengurus JSB berhadapan dengan orang Koto Gadang termasuk kaum terpelajarnya.

Bahder Djohan yang ayahnya berasal dari Koto Gadang tidak segan-segan menghadapi orang Koto Gadang dalam masalah ini. Ia berpendapat bahwa adat itu tidak cocok lagi dengan kemajuan zaman. Bahder Djohan dan Mohammad Hatta pada waktu itu telah mempunyai keyakinan bahwa tidak ada yang tetap di dunia ini, semuanya akan berubah termasuk juga adat Minangkabau. Pertentangan antara pengurus JSB dan orang Koto Gadang ini sempat menggoncangkan masyarakat pada waktu itu. Sesudah persoalan ini selesai tidak ada lagi kegoncangan dalam JSB.²⁷⁾

Pada kongres JSB akhir Desember 1920 Mohammad Hatta meletakkan jabatannya sebagai bendahara PB JSB. Ia mencurahkan perhatiannya kepada sekolahnya, karena pada tahun

1921 Mohammad Hatta akan meneruskan pelajaran ke Negeri Belanda. Walaupun Mohammad Hatta mencurahkan seluruh perhatiannya pada pelajaran, tetapi ia masih tetap bertemu dengan sahabatnya, Bahder Djohan, tiap Sabtu malam. Pada waktu Mohammad Hatta pulang ke Padang sebelum berangkat ke Negeri Belanda ia juga berpamitan kepada Taher Marah Sultan. Waktu itu Taher Marah Sultan menyerahkan satu amplop kepada Mohammad Hatta yang berisi uang Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), sebagai sumbangan beberapa orang saudagar di Pasar Gadang Kota Padang.²⁸⁾

Sesudah Mohammad Hatta mengundurkan diri dari pengurus JSB, tugas Bahder Djohan semakin berat. Tugas Mohammad Hatta kemudian digantikan oleh Burhanuddin sebagai bendahara I dan Jalil diangkat sebagai bendahara II. Sampai berangkat ke Negeri Belanda Mohammad Hatta sebagai anggota biasa JSB tetap membayar iuran anggota dengan setia.²⁹⁾

Sepeninggal Mohammad Hatta kegiatan organisasi JSB semakin meningkat, anggota makin bertambah dan keuangan juga semakin teratur. JSB yang pada saat berdirinya hanya mempunyai anggota 150 orang, sekarang telah mendekati 1000 orang, anggotanya sebagian besar terdiri atas pelajar yang berasal dari Sumatra yang menuntut ilmu di Jakarta. Organisasi ini juga mempunyai klub pencak silat yang mengadakan kegiatan di STOVIA. Bahder Djohan termasuk salah seorang yang aktif dalam klub ini.³⁰⁾

Pada tahun 1983 JSB mengadakan lustrum pertama yang diadakan di Jakarta. Pada saat mengadakan peringatan itu masalah yang hangat dibicarakan adalah masalah bahasa, karena waktu itu bahasa pengantar adalah bahasa Belanda. Untuk memecahkan masalah ini maka muncullah tokoh JSB yang bernama Mohammad Yamin mengemukakan gagasannya. Dalam sidang itu ia mengucapkan pidato yang berjudul *De Maleische Taal in het verleden, heden en in de toekomst* (Bahasa Melayu di masa lampau, sekarang dan masa datang).

Dengan mengemukakan pidato ini, maka Mohammad Yamin telah mencanangkan kedatangan bahasa kebangsaan. Kemudian Yamin juga menggubah sajak yang berjudul "Indonesia Tanah Tumpah Darah" yang berisikan bisikan cinta yang suci murni terhadap tanah air Indonesia.^{3 1})

Kemudian Mohammad Yamin juga menyokong gagasan untuk mendirikan majalah kebudayaan yang diberi nama *Malaya*, guna merebut hati penduduk Melayu di Jazirah Malaka. Gagasan ini sebelumnya telah pernah dikemukakan oleh Bahder Djohan dan Mohammad Hatta pada tahun 1920, ketika mereka berdua menjabat sekretaris dan bendahara PB JSB. Sewaktu gagasan itu dikemukakan kembali oleh Mohammad Yamin pada lustrum pertama JSB, segera mendapat tantangan dari golongan tua. Golongan tua khawatir bahwa usaha ini akan dianggap oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai suatu usaha politik. Usaha ini akan menyulitkan kedudukan Pemerintah Hindia Belanda dimata dunia internasional.^{3 2})

Pada waktu lustrum pertama JSB itu, ditempa pula suatu *medaile* peringatan yang melukiskan, "Nyir Melambai", Nyir Melambai dan "Kembang Melati" merupakan perlambang keindonesiaan. Waktu itu juga diresmikan panji perhimpunan JSB yang bergambarkan "pelita yang menyala" dengan motto "*Pelita Bangsa Senantiasa*".^{3 3})

Memasuki tahun 1925, gerakan pemuda mulai menjurus kearah persatuan Indonesia termasuk *Jong Sumatranen Bond* (JSB) yang dipimpin oleh Bahder Djohan dan tokoh pemuda lainnya. Karena JSB berjuang dan bergerak di Jakarta, maka organisasi ini lebih cepat menanggalkan baju daerahnya dan menggantinya dengan baju Indonesia. Beberapa orang tokoh JSB seperti Mohammad Hatta kemudian menjadi ketua Perhimpunan Indonesia (PI) di Negeri Belanda. Mohammad Yamin menjadi pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPPI). Abu Hanifah kemudian ikut menjadi anggota perkumpulan "Langen Siswo" dari *Jong Java*".^{3 4})

Dalam pada itu pengaruh PI terhadap pergerakan ditanah air, khususnya pergerakan pemuda besar sekali. PI memberikan dorongan kepada pemuda Indonesia untuk bersatu dalam wadah Indonesia untuk mencapai tujuan perjuangannya. Melalui majalah *Indonesia Merdeka*, PI mempengaruhi kaum pergerakan di Indonesia, termasuk pergerakan pemuda. Suara yang ditiupkan oleh PI di negeri Belanda makin tertanam dalam sanubari pemuda Indonesia.^{3 5})

Pada tanggal 15 November 1925 para pemuda yang tergabung dalam organisasi : *Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Pelajar Minahasa, Sekar Rukun*. dan beberapa peminat perorangan mengadakan rapat di gedung *Lux Orientis* di Jakarta. Dalam rapat itu diputuskan dengan suara bulat membentuk sebuah panitia yang mempunyai tugas menyelenggarakan Kongres Pemuda Pertama yang tujuannya : "Menggugah semangat kerja sama di antara bermacam-macam organisasi pemuda di tanah air kita, supaya dapat diwujudkan dasar-dasar pokok untuk lahirnya persatuan Indonesia, di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia".^{3 6})

Dalam panitia ini duduk tokoh-tokoh pemuda seperti Bahder Djohan, Sumarto, Jan Toule Soulehuwif, Paul Pinontoan, M. Tabrani, Hamdani, Sanusi Pane, Suwarso, Djamaluddin Adinegoro dan Sarbini. Panitia yang terdiri atas 10 orang tokoh pemuda ini kemudian mengadakan pembagian tugas : M. Tabrani (Ketua), Bahder Djohan, dan Sumarto (wakil ketua), Djamaluddin Adinegoro (Sekretaris), Suwarso (bendahara).

Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda pertama ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda yaitu : *Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, Studeerende Minahasaers, Jong Bataks Bond*, dan Pemuda Kaum Teosofi.^{3 7})

Dalam Kongres Pemuda Pertama itu diucapkan pidato oleh para tokoh pemuda, baik yang duduk dalam kepengurusan maupun yang tidak duduk dalam pengurus dan panitia. Pidato pembukaan oleh M. Tabrani diucapkan sebagai ketua panitia kongres. Dalam pidatonya M. Tabrani mengatakan agar pemuda dapat memajukan pertumbuhan semangat persatuan nasional dengan menghindari segala sesuatu yang dapat menceraiberaikan pemuda. Oleh sebab itu panitia memilih acara yang mengandung unsur pemersatu dan menjauhkan diri dari benih perpecahan. Selanjutnya Tabrani mengharapkan agar kongres menyuarakan generasi muda sekarang yang nantinya terpanggil untuk bekerja, berjuang dan meninggal untuk kemerdekaan nusa dan bangsa. Rakyat di seluruh kepulauan Indonesia bersatulah.^{3 8})

Kemudian yang mengucapkan pidato adalah tokoh pemuda yang bernama Sumarto. Dalam pidatonya Sumarto mengatakan bahwa semangat kemerdekaan, mengandung cita-cita Indonesia merdeka. Menurut pendapat Sumarto, Indonesia adalah pengertian politik, bukan pengertian lain. Pada bagian akhir dari pidatonya Sumarto mengatakan, bahwa pemuda Indonesia harus bangun menuju persatuan, bangkit menuju Indonesia merdeka.^{3 9})

Pidato dari tokoh pemuda Mohammad Yamin memberi gambaran tentang kemungkinan hari depan bahasa Indonesia dan kesusastraannya. Mohammad Yamin menyatakan bahwa tanpa bermaksud mengurangi penghargaan terhadap bahasa daerah lainnya, maka menurut pendapatnya hanya dua bahasa yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu yang mengandung harapan menjadi bahasa persatuan. Namun menurut keyakinannya bahasa Melayulah yang lambat-laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan bagi rakyat Indonesia. Kebudayaan Indonesia di masa depan akan diutarakan dalam bahasa tersebut.

Selanjutnya Mohammad Yamin mengatakan bahwa sejarah kini ialah menuju nasionalisme yang dalam dan luas ke arah kemerdekaan dan tujuan yang lebih luhur, yaitu kebudayaan

yang lebih tinggi nilainya, agar Indonesia dapat mempersembahkan kepada dunia hadiah yang lebih berharga dan lebih indah, selaras dengan kebanggaan kita.⁴⁰⁾

Selanjutnya pidato dari Paul Pinontoan menyerukan saling pengertian (*tolerantie*) di antara pemeluk bermacam agama di seluruh Indonesia demi untuk memperkuat gerakan persatuan nasional. Kemudian Paul Pinontoan menganjurkan membentuk tenaga muda yang tahan uji, jadi pejuang lahir-batin tanpa mengharap belas, mengabdikan pada gerakan persatuan Indonesia.⁴¹⁾

Dalam Kongres pemuda Pertama ini Bahder Djohan menyampaikan pidatonya yang berjudul "Kedudukan Wanita Dalam Masyarakat Indonesia". Pada awal pidatonya Bahder Djohan mengatakan bahwa pemecahan persoalan wanita di negeri ini sama pentingnya dengan pelaksanaan dari sekian banyak cita-cita politik dan ekonomi. Adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap nasionalis untuk juga memperdengarkan suaranya terhadap masalah itu. Menurut Bahder Djohan, wanita Indonesia mestilah berdiri di samping pria, bagi tanah air dan bangsa.⁴²⁾

Selanjutnya Bahder Djohan mengatakan bahwa di negeri Barat perjuangan wanita dititikberatkan pada persamaan wanita dan pria dalam masyarakat, maka perjuangan wanita di Indonesia akan sulit membebaskan diri dari suatu tendensi politik nasional. Satu gerakan yang terorganisasi memang belum ada dan belum mungkin. Pemecahan persoalan wanita di Indonesia harus berakhir pada *natie* Indonesia yang sedang membentuk dirinya.

Menurut Bahder Djohan, apabila ibu Indonesia menyusui bayinya, ia telah ikut membentuk pemuda harapan bangsa. Pemuda berdiri pada garis depan untuk perjuangan bangsa dan tanah air. Pemuda telah menjabarkan ide persatuan yang menyatukan suku bangsa Indonesia.⁴³⁾

Bagi Bahder Djohan, suatu rumah tangga kedudukan wanita bukan hanya ibu dari anak-anak saja, tetapi juga merupakan kawan bagi suaminya. Kedudukannya tidak boleh tinggi dan tidak boleh rendah. Persamaan derajat pria dan wanita harus diakui sepenuhnya bagi pembentukan suatu rumah tangga yang bahagia. Apabila kepada wanita diberikan kedudukan yang memang haknya, maka bentuk perkawinan poligami dengan sendirinya tersingkir dan memberikan tempat kepada monogami. Bahder Djohan mengatakan bahwa perkawinan poligami itu hanya dimaksudkan sebagai peraturan sementara.⁴⁴⁾

Mengakhiri pidatonya Bahder Djohan mengatakan bahwa tujuan dari uraiannya adalah mencapai hak yang sama antara wanita dan pria terhadap Tuhan dan dunia. Dengan cara demikianlah bagian terbesar dari cintanya yang menggetarkan seluruh pribadinya dapat dipersembahkan kepada tanah air dan bangsa. Meluasnya lapangan bergerak yang memungkinkan pertumbuhan kekaryaan wanita, akan membuka harapan akan hari depan nusa dan bangsa. Tidak seorang pun yang menaruh keberatan jika dikatakan "Di tangan wanitalah terletak hari depan Indonesia".⁴⁵⁾ Pidato Bahder Djohan masih disampaikan dalam bahasa Belanda, seperti halnya pidato tokoh-tokoh pemuda lainnya. Pidato yang panjangnya 10 halaman itu berjudul *De Positie Van De Vrouw in de Indonesische Samenleving*.

Laporan Kongres Pemuda Indonesia pertama tahun 1926 yang juga memuat pidato Bahder Djohan pada waktu itu dilarang beredar oleh pemerintah kolonial Belanda. Tetapi untung naskah itu disimpan dan diselamatkan di Perpustakaan Museum Nasional dan Yayasan Idayu juga memiliki, yang kemudian diterjemahkan oleh Darsyaf Rahman.⁴⁶⁾

Kongres Pemuda pertama berakhir pada tanggal 2 Mei 1926, yang ditutup oleh ketua M. Tabrani, di mana Bahder Djohan sebagai wakil ketua juga menyampaikan pidatonya. Kongres telah berhasil menanamkan kemauan untuk mewujudkan persatuan Indonesia. *Jong Sumatranen Bond* (JSB) di ba-

wah pimpinan Bahder Djohan telah berhasil menanamkan cita-cita persatuan pemuda, yang kemudian menemukan wujudnya yang nyata dalam Kongres Pemuda Kedua, 28 Oktober 1928.

Jong Sumatranen Bond telah berhasil mendidik calon pemimpin bangsa yang kemudian memegang peranan dalam Republik Indonesia. Di antara mereka itu adalah : Mohammad Hatta (pernah wakil presiden dan perdana menteri), Mohammad Yamin (pernah beberapa kali menjadi menteri), Abu Hanifah (pernah menjadi menteri PP dan K) dan Bahder Djohan (pernah dua kali menjadi menteri PP dan K serta presiden (rektor) Universitas Indonesia.

2.2 Perjuangan Bahder Djohan Dalam Masa Perang Kemerdekaan.

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu telah menentukan syarat apa yang harus dipikul oleh Jepang setelah kalah perang. Syarat itu telah ditentukan oleh Sekutu di Potsdam (dekat Berlin) yang terdiri atas 13 pasal. Pasal 11 menyebutkan bahwa sesudah kalah perang, Jepang diperbolehkan memelihara industrinya kecuali industri perang. Deklarasi Postdam ini mendorong Jepang menerima syarat Sekutu untuk menghindarkan industrinya dari kehancuran total.^{4 7})

Bersamaan dengan kekalahan Jepang itu, tanggal 14 Agustus 1945 Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta juga telah kembali ke Jakarta sesudah menemui Marsekal Terautji di Saigon. Kedua pemimpin terkemuka bangsa Indonesia itu segera mengadakan pertemuan dengan para pemimpin lainnya untuk mengadakan persiapan proklamasi kemerdekaan. Persiapan yang kemudian diwarnai dengan pertentangan dengan beberapa tokoh pemuda yang berakhir dengan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok, akhirnya dapat diselesaikan. Persiapan proklamasi kemerdekaan yang berlangsung selama 3 hari (14-16 Agustus 1945) merupakan saat yang menentukan bagi kemerdekaan Indonesia.

Sejak pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 telah diadakan persiapan seperlunya di Pegangsaan Timur 56, seperti membuat tiang bendera dan menyediakan bendera merah putih. Sebenarnya di Pegangsaan Timur (rumah Ir. Soekarno) sudah ada dua tiang besi yang terletak tepat di muka kamar depan, tetapi untuk keperluan ini masih diperlukan pembuatan tiang baru. Pagi itu telah kelihatan hadir beberapa orang tokoh seperti : Suwiryo, Dr. Muwardi, Mr. Wilopo, Mr. AG Pringgodigdo, Mr. Tabrani, SK Trimurti, Dr. Suharso (dokter pribadi keluarga Soekarno), Sudiro, Sukarjo Wiryopranoto dan Suroto (wartawan Domei). Juga hadir beberapa orang anggota "Barisan Pelopor Istimewa" beberapa orang anggota Peta yang dipimpin oleh Latif Hendraningrat. Kemudian juga hadir 20 orang mahasiswa pakai mobil terbuka dan diikuti oleh mahasiswa lainnya yang berjalan kaki.⁴⁸)

Di antara tokoh-tokoh yang hadir dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan itu juga terdapat Dokter Bahder Djohan dan St. Adam Bachtiar. Kurang lebih 1000 orang telah hadir di Pegangsaan Timur No. 56 untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting ini. Mereka terdiri atas tokoh masyarakat baik pria maupun wanita, tokoh pemuda, para pemuda yang tergabung dalam barisan pelopor, para pemuda yang tergabung dalam Peta dan anggota masyarakat.⁴⁹)

Tepat pukul 10.00 acara pembacaan proklamasi kemerdekaan dimulai dengan pokok acara :

1. Pembacaan proklamasi, disambung dengan pidato singkat dari Ir. Soekarno.
2. Penarikan bendera merah putih
3. Sambutan Suwiryo
4. Sambutan dr. Muwardi sebagai kepala bagian keamanan.

Setelah penarikan bendera yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat dengan dibantu dua orang mahasiswa *Ika Daigaku* (kedokteran), secara spontan dinyanyikan lagu Indonesia Raya.⁵⁰)

Dalam waktu pendek seluruh pelosok Kota Jakarta sudah mengetahui proklamasi, kemudian menjalar ke daerah sekitarnya dengan perantaraan kereta api, mobil, telepon, dan kawat. Atas inisiatif para pemuda yang bekerja di kantor berita Domei, maka dapatlah penyiaran proklamasi itu disiarkan ke seluruh Indonesia dan ke bagian-bagian dunia dengan melalui radio gelombang pendek.⁵¹⁾

Pada tanggal 17 Agustus 1945 malam, oleh Bung Karno dan Bung Hatta, Suwiryo ditunjuk menjadi walikota Jakarta. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan berlakunya Undang-undang Dasar yang telah dipersiapkan sebelumnya. Soekarno dipilih sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta dipilih sebagai wakil presiden. Tanggal 19 Agustus 1945 oleh presiden dibentuk Kabinet Presidensial, sehingga dengan demikian lengkaplah alat Pemerintah Republik Indonesia.

Kemerdekaan yang telah diproklamasikan itu harus dipertahankan oleh seluruh rakyat. Walaupun pada waktu itu Indonesia belum mempunyai tentara yang telah tersusun rapi, tetapi perlawanan terhadap Jepang kemudian Sekutu dan Belanda tetap dilancarkan oleh seluruh rakyat bersama-sama dengan lasykar-lasykar perjuangan. Perjuangan yang akhirnya menimbulkan peperangan dengan Sekutu dan Belanda menimbulkan korban yang tiak sedikit. Untuk membantu para korban ini, maka perlu didirikan organisasi Palang Merah yang bertugas membantu manusia yang menderita.

Pada pertengahan September 1945 didirikanlah organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) yang langsung dipimpin oleh Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta. Dokter Bahder Djohan yang menonjol jiwa kemanusiaannya, juga ikut memelopori berdirinya PMI, kemudian diangkat menjadi sekretaris. Di samping kedua tokoh ini juga diangkat beberapa orang tokoh masyarakat dan beberapa orang dokter menjadi pengurus PMI. Mereka bekerja siang malam untuk membantu korban peperangan dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru diprokla-

masikan. Bahder Djohan sebagai pengurus inti PMI dan sebagai seorang dokter bekerja dengan penuh pengabdian. Dalam waktu 3 bulan saja ada 400 orang pemuda korban peperangan yang dirawatnya di Rumah Sakit Umum Pusat. Bangsal tempat merawat para korban peperangan ini dinamai bangsal pahlawan.^{5 2)}

Bahder Djohan juga mendidik tenaga muda juru rawat untuk menjadi anggota PMI. Mereka dilatih agar trampil dan mempunyai dedikasi yang tinggi untuk membantu perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan memerlukan tenaga terdidik dan mempunyai jiwa yang luhur untuk membantu sesama manusia, baik kawan maupun lawan. Para jururawat anggota PMI itu dilatih untuk merawat orang sakit, lebih-lebih yang sakit karena korban peperangan.

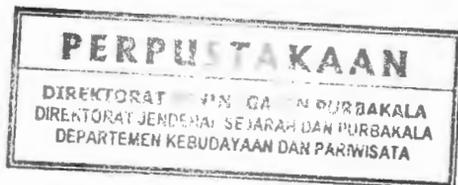
Sementara itu Pemerintah Republik Indonesia terus menyempurnakan perangkat pemerintahan untuk kelancaran roda pemerintahan. Sesudah dibentuk kabinet presidensiil pada tanggal 19 Agustus 1945, maka dibentuk pula Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berfungsi sebagai parlemen (DPR) sebelum terbentuknya DPR hasil pilihan rakyat. Anggota KNIP terdiri atas beberapa anggota PPKI beserta golongan cendekiawan dan pemuda. Salah seorang golongan cendekiawan yang diangkat menjadi anggota KNIP adalah Dokter Bahder Djohan, dan ia memegang jabatan itu dari tahun 1945–1949. Dengan demikian Dokter Bahder Djohan juga aktif dalam lapangan politik dan pemerintahan, walaupun di bidang ini tidak banyak membutuhkan tenaga dan energinya.^{5 3)}

Tantangan pertama terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia datang dari pihak Jepang. Untuk menghadapi tantangan Jepang ini, maka rakyat Jakarta bangkit mengadakan perlawanan terhadap Jepang yang masih bersenjata lengkap. Dengan mempergunakan beberapa pucuk senjata yang dirampas dari Jepang serta bambu runcing dan senjata tajam lainnya, rakyat menyerbu tempat-tempat penting yang masih diduduki Jepang.

Pada tanggal 19 September 1945 diadakanlah rapat raksasa di Lapangan Ikada Jakarta untuk menyambut Proklamasi kemerdekaan. Dengan penuh keberanian rakyat tidak menghiraukan sangkur terhunus tentara Jepang yang menghalang-halangi rakyat datang menghadiri rapat raksasa itu. Menghadapi rapat raksasa ini seluruh alat pemerintahan mencurahkan perhatiannya, lebih-lebih bidang pelayanan masyarakat seperti PMI. PMI di bawah pimpinan Bahder Djohan juga mengadakan persiapan untuk menghadapi peristiwa penting ini guna memberikan pertolongan apabila diperlukan.

Dalam pada itu Jepang makin bertindak kejam terhadap perjuangan rakyat, lebih-lebih setelah ada instruksi langsung dari Sekutu yang telah mulai mendarat di Jakarta tanggal 15 September 1945. Sesudah rapat raksasa di lapangan Ikada, Jepang menangkap beberapa orang tokoh pemuda, dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Keadaan di Jakarta semakin panas dengan mendaratnya tentara Sekutu pada tanggal 29 September 1945. Tetapi walaupun begitu pada tanggal 30 September 1945 pimpinan tentara Sekutu di Indonesia yaitu Jenderal Christison mengakui secara *de facto* kekuasaan Republik Indonesia.^{5 4})

Dengan ditariknya tentara Jepang dari Indonesia, maka musuh yang dihadapi adalah Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia. Pada tanggal 7 Oktober 1945 Belanda dengan resmi membentuk *Nederlands Indies Civil Administration* (NICA), karena mereka masih menganggap berkuasa di Indonesia. Keadaan Jakarta makin lama makin genting, karena Belanda tidak bersedia mengakui Republik Indonesia. Belanda makin bertindak kejam, banyak pemimpin yang ditawan dan banyak pula rakyat yang tidak bersalah ditembak. Jakarta sebagai pusat pemerintahan makin dirasakan tidak aman. Akhirnya pada tanggal 4 Januari 1956 pusat pemerintahan dipindahkan ke Yogyakarta. Yang pindah ke Yogyakarta adalah Presiden, Wakil Presiden beserta sejumlah besar anggota kabinet dengan kantor kementeriannya. Perdana Menteri merangkap Menteri



Luar Negeri Sutan Syahrir beserta beberapa orang staf tetap tinggal di Jakarta. Kegiatan politik dalam negeri dikendalikan di Yogyakarta, sedangkan politik luar negeri tetap diurus di Jakarta.⁵⁵⁾

Setelah ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1956. Bahder Djohan sebagai pimpinan PMI tetap tinggal di Jakarta. Ia kemudian diangkat menjadi ketua PMI cabang Jakarta. Tugas ini ternyata tidak mudah, karena sebagai ketua PMI cabang Jakarta dan juga anggota KNIP, Bahder Djohan berhadapan langsung dengan Belanda sebagai penjajah. Bahder Djohan harus pandai-pandai berjuang dan memanfaatkan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Belanda untuk membantu perjuangan rakyat Indonesia. Di samping menghadapi Belanda, Bahder Djohan juga harus menghadapi tugas dan kegiatan yang berhubungan dengan dunia internasional, lebih-lebih dalam kedudukannya sebagai ketua PMI.⁵⁶⁾

Selain dari Perdana Menteri Sutan Syahrir, anggota kabinet yang sering ke Jakarta adalah Menteri Sosial Mr. Maria ulfah. Ia ditugaskan mengurus eks Digulis dan tawanan perang khususnya wanita dan anak-anak. Selain dari itu di Jakarta masih tetap berdiri Pemerintah Kota, Pemerintah RI yang dipimpin oleh Walikota Suwiryo. Jakarta tetap menjadi kota perjuangan, para pemuda terus menghadapi tentara NICA dengan cara gerilya. Pada siang hari tentara NICA bebas bergerak, sedangkan pada malam hari mereka mendapat serangan dari pejuang Indonesia.

Untuk kepentingan perjuangan, maka dibentuk tentara penghubung yang dipimpin oleh Mayor MT. Haryono dan Mayor Wibowo yang bertugas menghubungkan daerah pedalaman Kota Jakarta. Atas inisiatif beberapa tokoh wanita, didirikanlah "Tugu Peringatan Proklamasi" yang diresmikan oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir pada tanggal 17 Agustus 1946.⁵⁷⁾

Dalam rangka ikut aktif membantu perjuangan kaum pria, maka kaum wanita Jakarta juga ikut menyumbangkan darma baktinya, baik secara perorangan maupun dalam bentuk organisasi kaum wanita dengan ikut mengadakan dapur umum dan membantu Palang Merah Indonesia (PMI). Tidak kalah pentingnya sumbangan dari PMI Jakarta berupa obat-obatan untuk para pejuang. PMI cabang Jakarta yang waktu itu dipimpin oleh Dokter Bahder Djohan, di samping ikut memberikan sumbangan obat-obatan juga memberikan tenaga juru rawat rumah sakit untuk membantu perjuangan.⁵⁸)

Pada bulan Juli 1947, Belanda melancarkan Aksi Militer I, dengan menduduki beberapa daerah. Di Jakarta Belanda juga menduduki kantor PMI sehingga pimpinan PMI Jakarta dokter Bahder Djohan terpaksa memindahkan Kantor PMI ke RSUP. Pimpinan RSUP waktu itu juga dipegang oleh Bahder Djohan, sehingga ia dengan sekuat tenaga berjuang menyelamatkan kedua badan yang merupakan alat perjuangan itu. Perguruan Tinggi Kedokteran yang terletak di Salemba kemudian dipindahkan ke Klaten, sesudah Belanda melancarkan Agresi Militer I.⁵⁹)

Sementara itu pemerintah pendudukan Belanda dalam tahun 1947 itu juga telah mendirikan *Universitas van Indonesia*, sebagai gabungan dari perguruan tinggi yang didirikan sebelum tahun 1942. *Faculteit* yang didirikan di Jakarta adalah : Hukum, Kedokteran, Ekonomi, dan Sastra.⁶⁰)

Untuk menghadapi tindakan dan kegiatan Belanda di Jakarta, maka Bahder Djohan membuka Sekolah Tinggi Kedokteran Republik. Sekolah itu ditempatkan di rumahnya sendiri yaitu di Jalan Kimia No. 9 Jakarta. Kuliah diadakan di rumah dosen masing-masing sesuai dengan mata kuliah yang mereka berikan. Dengan demikian atas inisiatif Dokter Bahder Djohan Sekolah Tinggi Kedokteran tetap dibuka di Jakarta pada masa pendudukan.⁶¹)

Sementara itu upacara peringatan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1947 tetap diadakan di halaman gedung Pegangsaan Timur No. 56, di sekitar Tugu Peringatan Proklamasi. Walaupun menghadapi resiko maut, para pelajar tidak gentar menghadapi bahaya Belanda melepaskan tembakan peringatan. Akibat tembakan Belanda itu, telah gugur seorang pelajar bernama Suprpto yang kemudian dimakamkan di Menteng Pulo, dengan diiringi oleh para pelajar dan mahasiswa.

Memasuki tahun 1948 keadaan Kota Jakarta semakin genting, gedung-gedung penting telah banyak yang diduduki oleh Belanda, tetapi gedung Pegangsaan Timur 56 masih tetap menjadi milik Republik. Pada tanggal 1 Juli 1948 gedung Pegangsaan Timur No. 56 di mana Republik Indonesia diproklamasikan, beserta Tugu Peringatan Proklamasi dengan resmi dijadikan gedung Pemerintah Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1948 di tempat bersejarah ini diadakan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan oleh para pemuda pelajar dan mahasiswa. Walaupun Belanda berusaha untuk menghalangi upacara ini, tetapi para pemuda tidak gentar menghadapinya.⁶²⁾

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II. Hampir seluruh kota di Indonesia berhasil mereka duduki, dan seluruh Jakarta juga mereka kuasai. Gedung-gedung dan tempat-tempat penting di Jakarta diduduki oleh Belanda, termasuk Gedung Pegangsaan Timur No. 56 dan RSUP Jakarta.

Sebelum RSUP diduduki, Pimpinan RSUP Dokter Bahder Djohan telah berhasil memindahkan alat-alat penting ke rumahnya. Berkat kegesitan dan kecekatan Dokter Bahder Djohan dalam waktu 3 jam ia berhasil memindahkan alat-alat kedokteran, obat-obatan, alat kantor dan para pasien dari RSUP ke rumahnya, Jalan Kimia No. 9.⁶³⁾

Tindakan itu dilakukan oleh Bahder Djohan, setelah ia mendapat kabar bahwa Belanda akan menduduki rumah sakit. Ia bersama para pembantunya mulai memindahkan alat-alat

rumah sakit, sejak pukul 21.00 dan harus selesai sebelum pukul 24.00. Waktu itu berlaku jam malam dari pukul 24.00 sampai pukul 06.00. Kalau ada yang melanggar peraturan itu, Belanda tidak segan-segan untuk menembak. Dengan mengerahkan segala kemampuan, akhirnya Bahder Djohan bersama para pembantunya dapat menyelesaikan tugas itu sebelum pukul 24.00.

Pada keesokan harinya Bahder Djohan mengorganisasi pengungsian para dokter, perawat dan pegawai rumah sakit. Mereka berhasil menyelamatkan sebanyak 2000 orang penderita, dan menempatkan mereka secara terpencar di rumah-rumah dokter Republik yang waktu itu masih tinggal di Jakarta, dan sebagian dikirim ke daerah Republik. Tugas itu ternyata tidak ringan, lebih-lebih pada waktu itu segalanya susah, alat pengangkutan boleh dikatakan tidak ada, karena hampir semuanya telah dikuasai oleh Belanda.

Sebagai ketua PMI, Bahder Djohan juga berusaha menyelamatkan badan ini. Ia tetap melanjutkan kegiatan PMI di rumahnya, dengan dibantu oleh para dokter dan juru rawat dan petugas rumah sakit lainnya yang masih setia kepada Republik. PMI harus melanjutkan kegiatannya, sesuai dengan misi yang dibawanya, yaitu menolong manusia yang menderita, baik kawan maupun lawan sekalipun.

Kemudian Bahder Djohan juga mendirikan perhimpunan dokter-dokter dan perawat yang diberi nama "Bahkti Mulia". Ia menghimpun tenaga medis yang ada pada waktu itu, guna membantu rakyat yang perlu pertolongan tanpa dipungut bayaran. Ia bersama-sama para teman sejawatnya dan para pembantunya memberikan pertolongan kepada masyarakat dengan peralatan dan obat-obat yang berhasil diselamatkan dari rumah sakit.⁶⁴⁾

Pada waktu melancarkan Agresi Militer II, Belanda makin bertindak kejam. Banyak korban yang jatuh, baik di pihak Indonesia, maupun di pihak Belanda. Rakyat Indonesia tidak gentar menghadapi kekejaman Belanda itu, Belanda terus men-

dapat perlawanan yang gigih dari rakyat, meskipun banyak korban yang berjatuhan. Dengan kenyataan ini jelas peranan para dokter dan aparat medis lainnya tidak kalah pentingnya dalam perjuangan kemerdekaan.

Dalam pada itu Bahder Djohan bersama kaum Republikan lainnya di Jakarta juga aktif mengumpulkan sumbangan, baik berupa obat-obatan maupun makanan guna dikirimkan ke garis depan. Sumbangan yang berhasil dikumpulkan oleh kaum Republikan di Jakarta sangat berarti bagi para pejuang di garis depan. Selain itu di Jakarta juga banyak orang Indonesia yang bekerja pada Pemerintah Belanda yang tidak mau ikut membantu perjuangan rakyat Indonesia.

Sesudah pengakuan kedaulatan, Bahder Djohan kembali bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia. Alat-alat kedokteran dan obat-obatan yang masih tersisa, yang dulu diselamatkan oleh Bahder Djohan dan dibawa ke rumahnya, sekarang dikembalikan lagi ke rumah sakit. Perjuangan fisik telah selesai, dan tugas pokok sekarang adalah mengisi kemerdekaan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing.^{6 5})

CATATAN BAB II

- 1). S.Z. Hadisutjipto, *Gedung STOVIA sebagai Cagar Sejarah*. Dinas Musium dan Sejarah DKI Jakarta 1973, hal 25.
- 2). Mohammad Hatta, *Memoir*, Tintamas Jakarta 1978, hal 44
- 3). *Ibid*, hal 42.
- 4). *Ibid*, hal 41.
- 5). *Ibid*, hal 41.
- 6). Bahder Dohan, *Gerakan Pemuda Membawa Perobahan Mental*, Dalam 45 Tahun Sumpah Pemuda Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta 1974, hal 172.
- 7). *Ibid*, hal 172.
- 8). Mohammad Hatta, *opcit*, hal 44.
- 9). *Ibid*, hal 45.
- 10). Mardanas Safwan, *Peranan Gedung Kramat Raya 105 Dalam Melahirkan Sumpah Pemuda*, Dinas Musium dan Sejarah DKI Jakarta 1973, hal 16.
- 11). Mohammad Hatta, *opcit*, hal 46.
- 12). *Ibid*, hal 48.
- 13). Bahder Djohan, *opcit*, hal 173.
- 14). Mohammad Hatta, *opcit*, hal 47.
- 15). *Ibid*, hal 55.
- 16). Bahder Djohan, *opcit*, hal 173.
- 17). *Ibid*, hal 173.

- 18). Mohammad Hatta, *opcit*, hal 78.
- 19). *Ibid*, hal 79.
- 20). *Ibid*, hal 78.
- 21). *Ibid*, hal 82.
- 22). *Ibid*, hal 86.
- 23). *Ibid*, hal 87.
- 24). *Ibid*, hal 88.
- 25). *Ibid*, hal 70.
- 26). *Ibid*, hal 72.
- 27). *Ibid*, hal 90.
- 28). *Ibid*, hal 99.
- 29). *Ibid*, hal 90.
- 30). S.Z. Hadisutjipto, *opcit*, hal 30.
- 31). Bahder Djohan, *Gerakan Pemuda Membawa Perubahan Mental*, Dalam 45 Tahun Sumpah Pemuda, Yayasan Gedung Gedung Bersejarah Jakarta 1974, hal 174.
- 32). *Ibid*, hal 174.
- 33). *Ibid*, hal 174.
- 34). Sutrisno Kutoyo dan Sunyata Kartadarmadja, *Suatu Catatan Tentang Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928*. ISA Dep P dan K Jakarta 1970 hal 25.
- 35). Mardanas Safwan, *Peranan Gedung Kramat Raya 106 Dalam Melahirkan Sumpah Pemuda*, Dinas Musium dan Sejarah DKI Jakarta 1973, hal 23.
- 36). Mohammad Tabrani, *Kongres Pemuda Indonesia Pertama*, Dalam 45 Tahun Sumpah Pemuda, Yayasan Gedung Gedung Bersejarah Jakarta 1974, hal 309.
- 37). Mardanas Safwan, *opcit*, hal 23.
- 38). Mohammad Tabrani, *opcit*, hal 310.
- 39). *Ibid*, hal 311.
- 40). *Ibid*, hal 313.
- 31). *Ibid*, hal 314.
- 42). Bahder Djohan, *Di Tangan Wanita, terjemahan Darsyaf Rahman* Yaysan Idayu Jakarta 1980, hal 5.
- 43). *Ibid*, hal 8.

- 44). *Ibid*, hal 10.
- 45). M. Tabrani, *opcit*, hal 312.
- 46). Bahder Djohan, *opcit*, hal 3.
- 47). Mardanas Safwan, *Peranan Gedung Menteng Raya 31 Dalam Perjuangan Kemerdekaan, Dinas Musium dan Sejarah DKI Jakarta* 1973, hal 31.
- 48). Sudiro, *Pengalaman saya sekitar 17 Agustus 1945*, Yayasan Idayu Jakarta 1972, hal 23.
- 49). *Wawancara* dengan Prof. Dr. Bahder Djohan, Jalan Kimia No. 9 Jakarta tanggal 29 Juli 1975, hal 1; dan *Ibid*, hal 23.
- 50). Sudiro, *opcit*, hal 24.
- 51). Adam Malik, *Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945*, Wijaya jakarta 1950, hal 58.
- 52). Thalib Ibrahim, *Jiwa Joang Bangsa Indonesia*, Ma'habudi Jakarta 1975, hal 73.
- 53). *Bunga Rampai Sumpah Pemuda*, Balai Pustaka jakarta 1978, hal 195.
- 54). Mardanas Safwan, *opcit*, hal 45.
- 55). *Ibid*, hal 48.
- 56). Tahlib Ibrahim, *opcit*, hal 73.
- 57). Sriyono Sumanto, Mardanas, WI Panji Indra; *Sejarah Tugu Peringatan Proklamasi RI*; Dinas Musium dan Sejarah DKI Jakarta 1972, hal 25.
- 58). *Ibid*, hal 23.
- 59). Nugroho Notokusanto (editor), *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Balai Pustaka Jakarta 1977, hal 274.
- 60). *Ibid*, hal 275.
- 61). Thalib Ibrahim, *opcit*, hal 72.
- 62). Sriyono Sumanto, Mardana, WI Panji Indra, *opcit* hal 37.
- 63). Thalib Ibrahim, *opcit*, hal 73.
- 64). *Ibid*, hal 74.
- 65). *Wawancara* dengan Prof. Dr. Bahder Djohan, *opcit*, hal 2.

BAB III PENGABDIAN BAHDER DJOHAN PADA MASA KEMERDEKAAN

3.1 Menjadi Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PPK)

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pemerintah RI segera menunjuk KH. Dewantara sebagai menteri PPK. Jabatan itu dipegangnya hanya tiga bulan. Ia diganti oleh Mr. TGSG. Mulia yang kemudian menjadi menteri PPK selama 5 bulan. Jabatan Menteri PPK kemudian diserahkan kepada Mohammad Syafei digantikan oleh Mr. Suwandi, yang kemudian membentuk Panitia Penyelidikan Pengajaran Republik Indonesia di Yogyakarta.¹⁾

Berdasarkan surat Keputusan Menteri PPK No. 60 Bagian Umum terhitung mulai tanggal 12 Mei 1946 telah disahkan anggota Penyelidik Pengajaran RI yang terdiri atas 52 orang anggota. Anggota panita tersebut diambil dari semua lapisan dan aliran yang ada dan mencakup semua lapangan dan tingkatan. Panitia ini bertugas meninjau masalah pendidikan dan pengajaran mulai dari taman kanak-akanak hingga perguruan tinggi. Soal agama, budi pekerti, budaya, angkatan perang, dan soal pendidikan orang dewasa menjadi pembicaraan penting dalam rapat.

Tujuan pendidikan adalah mendidik anak menjadi warga negara yang berguna yang kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dasar pendidikan adalah demokrasi, kemerdekaan dan keadilan sosial. Pendidikan dibagi menjadi 4 tingkatan : pendidikan rendah dinamai Sekolah Rakyat (SR) yang lamanya 6 tahun, pendidikan menengah pertama dinamai Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang lamanya 3 tahun, pendidikan menengah atas, dinamai Sekolah Menengah Atas (SMA), lamanya 3 tahun, perguruan tinggi yang lamanya 4 hingga 6 tahun. Kemudian juga didirikan Sekolah Industri yang lama pendidikannya 3 hingga 6 tahun.²⁾

Sesudah Mr Suwandi meletakkan dasar-dasar pendidikan dan pengajaran, maka dalam kabinet kelima yang ditunjuk menjadi menteri PPK adalah Mr Ali Sastroamijoyo. Dalam kabinet keenam kembali Mr Ali Sastroamijoho ditunjuk menjadi menteri PPK. Dalam kabinet darurat di Sumatra yang menjadi menteri PPK adalah Mr Teuku M. Hasan. Kemudian dalam kabinet ketujuh yang ditunjuk menjadi menteri PPK adalah Sarmidi Mangunsarkoro. Selanjutnya dalam kabinet kedelapan yang ditunjuk menjadi Menteri PPK adalah Dr Abu Hanifah. Dalam kabinet kesembilan yang ditunjuk menjadi menteri PPK kembali Sarmidi Mangunsarkoro.³⁾

Sewaktu Abu Hanifah menjadi menteri PPK, ia menyusun suatu konsepsi pendidikan yang menitikberatkan spesialisasi. Menurut Menteri Abu Hanifah pada waktu itu bangsa Indonesia amat terkebelakang dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Pengetahuan umum juga dianggap penting, tetapi pengetahuan teknik mendapat prioritas pertama, karena dianggap membawa kunci kemajuan. Perbandingan sekolah umum dan sekolah teknik adalah 3 berbanding 1 yang diterima di sekolah teknik (ST) adalah anak-anak tamatan SR yang lama pendidikannya 3 tahun Sesudah ST dapat melanjutkan ke sekolah teknik atas yang lama pendidikannya juga 3 tahun. Sekolah teknik harus mempunyai rencana pelajaran yang lengkap, sehingga bila seorang murid selesai sekolah ia sanggup mengerjakan suatu pekerjaan.⁴⁾

Di samping itu perguruan tinggi juga mendapat perhatian Abu Hanifah. Di samping perguruan tinggi teknik juga direncanakan mendirikan Akademi Pelayaran, Akademi Oceanografi, dan Akademi Riset Laut. Juga direncanakan mengirinkan mahasiswa yang mempunyai kemampuan ke luar negeri. Sekolah tinggi pertanian juga mendapat tempat yang pantas, karena masyarakat Indonesia masih agraris.⁵⁾

Menteri PPK Abu Hanifah juga merencanakan kota universitas seperti di Paris untuk kota-kota: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bukittinggi. Untuk itu biaya pendidikan diusulkan sebanyak 15%, dan di samping itu juga diusulkan kepada pemerintah tambahan 1% pajak pada pembayaran pajak di seluruh Indonesia untuk perbaikan kesejahteraan guru. Fakultas Kedokteran dan fakultas eksakta lainnya juga mendapat perhatian.⁶⁾

Kemudian pada tanggal 6 September 1950 dibentuk kabinet ke-10 yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Mohammad Natsir. Dokter Bahder Djohan dalam kabinet ini ditunjuk menjadi menteri PPK yang kesepuluh.

Susunan lengkap dari Kabinet Natsir adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Perdana Menteri | : Mohammad Natsir |
| 2. Wakil Perdana Menteri | : Hamengku Buwono IX |
| 3. Menteri Luar Negeri | : Mr Mohammad Rum |
| 4. Menteri Dalam Negeri | : Mr Assaat |
| 5. Menteri Pertahanan | : Dr A. Halim |
| 6. Menteri Kehakiman | : Mr Wongsonegoro |
| 7. Menteri Penerangan | : MA Pellopepsy |
| 8. Menteri Keuangan | : Mr Syafruddin Prawiranegara |
| 9. Menteri Pertanian | : Tandiono Manu |
| 10. Menteri Perdagangan/
Perindustrian | : Dr Sumitro Joyohadikusumo |
| 11. Menteri Perhubungan | : Ir. Juanda |
| 12. Menteri Pekerjaan
Umum dan Pembangunan | : Ir. Johannes |

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 13. Menteri Perburuhan | : RP Suroso |
| 14. Menteri Sosial | : F. Haryadi |
| 15. Menteri PPK | : Dr Bahder Djohan |
| 16. Menteri Agama | : KH. A. Wahid Hasyim |
| 17. Menteri Kesehatan | : Dr J. Leimena |
| 18. Menteri Negara | : Harsono Cokroaminoto. ⁷⁾ |

Kabinet Natsir yang dibentuk tanggal 6 September 1950 itu, tidak mengikutkan PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen. Salah satu sebab PNI menolak turut dalam kabinet ialah karena merasa tidak diberi kedudukan yang sesuai. Inti dari kabinet ini ialah dari partai Masyumi, tetapi juga terdapat anggota kabinet yang non-partai. banyak anggota kabinet merupakan tokoh terkenal dalam masyarakat, dan mempunyai keahlian di bidangnya, sehingga kabinet ini termasuk yang kuat juga formasinya. Tokoh-tokoh terkenal dalam kabinet yang tidak berpartai di antaranya adalah: Hamengku Buwono IX, Mr. Assaat, Ir. Juanda, Dr. Sumitro Joyohadikusumo dan Dokter Bahder Djohan.

Di antara program yang penting dari Kabinet Natsir adalah :

1. Menggiatkan usaha mendapat keamanan dan ketentraman
2. Mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan
3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan bekas anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat
4. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian secepatnya
5. Mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi nasional yang sehat.⁸⁾

Kalau dilihat program umum dari Kabinet Natsir, memang masalah pendidikan dan kebudayaan tidak dicantumkan secara khusus, begitupun bidang-bidang kegiatan lainnya. Masalah yang mendesak untuk diselesaikan adalah masalah politik dan

keamanan dan masalah memajukan ekonomi nasional. Dalam masalah menyempurnakan susunan pemerintahan, jelas termasuk masalah pendidikan dan kebudayaan. Struktur dan personalia Kementerian (Departemen PPK) harus disempurnakan oleh Menteri Bahder Djohan. Dalam hal personalia, Bahder Djohan berusaha memanfaatkan personalia yang telah ada sebelumnya di Kementerian PPK. Mereka adalah tokoh-tokoh pendidikan dan kebudayaan yang ahli dalam bidangnya masing-masing.

Kementerin PPK waktu itu berkantor di Jalan Cilacap No. 4 Jakarta. Susunan organisasi dan personalia Kementerian PPK pada waktu itu adalah :

- A.
1. Menteri PPK : Dr Bahder Djohan
 2. Sekretaris Jenderal : Mr. Hadi
 3. Sekretariat : N. Suitinah
- B. Jawatan-jawatan
1. Jawatan Pengajaran, Kepala : Sugarda Purbakawaca
 2. Jawatan Pendidikan Masyarakat, Kepala : Sadaryun Siswomartoyo.
 3. Jawatan Kebudayaan, Kepala : Mr. Kuncoro
 4. Jawatan Perlengkapan alat-alat, Kepala : Atmodipurwo
- C. Inspeksi
1. Pendidikan Taman Kanak-kanak, Kepala :
 2. Inspeksi Sekolah Rakyat, Kepala : Sutarman
 3. Inspeksi SMP, Kepala : Ondang
 4. Inspeksi SMA, Kepala : Ali Marsaban
 5. Inspeksi Pendidikan Guru Kepala : Arbidin

6. Inspeksi Pendiakaan
Jasmani, Kepala : Puro Atmodipuro
7. Inspeksi Pengajaran
Teknik, Kepala : Ir. Sumani
8. Inspeksi Pengajaran
Kerajinan Wanita, Kepala : N. Erna Jayadiningrat
9. Inspeksi Pengajaran
Dagang dan Ekonomi,
Kepala : Jayaatmaja
10. Bahagian Naskah dan
Majalah, Kepala : S. Mardowo
11. Bahagian Kursus-kursus,
Kepala : M. Hutasoit
12. Bahagian Penyelenggaraan
Sekolah-sekolah, Kepala : Sunarya
13. Urusan Sekolah Asing,
Kepala :

Dasar-dasar pendidikan dan pengajaran telah mulai diletakkan pada tanggal 11 November 1947 dengan Surat Keputusan Menteri PPK No. 154/Yogya. Kemudian undang-undang itu disempurnakan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 yang dinamai : **UNDANG UNDANG TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH**

Undang-undang itu antara lain memuat :

Yang dimaksud dengan pendidikan dan pengajaran di sekolah ialah pendidikan dan pengajaran yang diberikan bersama-sama kepada murid-murid yang berjumlah 10 orang atau lebih.

Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas azas-azas yang termaktub dalam "Pancasila" Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia.

Menurut jenisnya, maka pendidikan dan pengajaran dibagi atas :

- a. Pendidikan dan Pengajaran Taman Kanak-kanak
- b. Pendidikan dan Pengajaran Rendah
- c. Pendidikan dan Pengajaran Menengah
- d. Pendidikan dan Pengajaran Tinggi
- e. Pendidikan dan Pengajaran Luar Biasa
- f. Pendidikan Jasmani

Tentang kewajiban belajar, dikatakan bahwa anak-anak yang sudah berumur 6 tahun berhak untuk belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya. Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama, dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.

Tentang Sekolah Swasta (partikular) dikatakan, bahwa atas dasar kebebasan tiap warga negara menganut suatu agama atau keyakinan hidup, maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah partikular.

Mengenai guru dikatakan bahwa di dalam sekolah guru harus menghormati tiap-tiap aliran agama atau keyakinan hidup. Mengenai murid dikatakan, bahwa tiap warga Negara RI mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Tentang pengajaran agama dikatakan, bahwa di sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. Sekolah negeri menerima murid laki-laki dan perempuan, kecuali sekolah keahlian yang khusus bagi anak laki-laki atau perempuan.

Menenai uang sekolah dikatakan bahwa di semua sekolah negeri kecuali sekolah rendah dan sekolah luar biasa, murid-murid membayar uang sekolah yang ditetapkan menurut kekuatan orang tuanya. Murid yang pandai tetapi tidak mampu dibebaskan dari pembayaran uang sekolah.

Tentang liburan sekolah, Menteri PPK menetapkan dengan mengingat kepentingan pendidikan, faktor musim, kepentingan agama dan hari raya kebangsaan. Sekolah swasta bebas menga-

tur libur sendiri asal jangan bertentangan dengan ketentuan pemerintah.

Mengenai pengawasan ditentukan bahwa pengawasan pendidikan dan pengajaran berarti memberi pimpinan kepada guru untuk mencapai kesempurnaan dalam pekerjaannya. Hubungan orang tua murid dan guru harus dijaga sebaik-baiknya dan untuk mewujudkan hubungan itu dibentuk "Panitia Pembantu Pemeliharaan Sekolah" yang terdiri atas beberapa orang tua murid.¹⁰⁾

Susunan sekolah waktu itu pada garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. **Sekolah Rendah**

Sekolah rendah yang dulu bermacam-macam diganti menjadi satu macam, ialah Sekolah Rakyat (SR) yang lama pelajarannya 6 tahun.

2. **Sekolah Menengah Umum**

a. **Sekolah Menengah Petama (SMP)**

Lama pelajaran 3 tahun sesudah SR, mulai kelas III diadakan perbedaan dalam susunan pelajaran, ialah bagian A (kesusastraan, administrasi, dan perdagangan), dan bagian B memusatkan rencana pelajarannya pada ilmu pasti dan ilmu alam. Pemegang ijazah SMP A dapat melanjutkan pelajarannya ke SMA bagian A dan bagian C atau pada sekolah kejuruan yang rencana pelajarannya tidak berdasarkan ilmu pasti.

b. **Sekolah Menengah Atas (SMA)**

Lama pelajarannya 3 tahun sesudah SMP, untuk menyiapkan para pelajar ke sekolah tinggi. Pada SMA diadakan 3 bagian yaitu :

Bagian A : jurusan kesusastraan

Bagian B : jurusan ilmu pasti/alam

Bagian C : jurusan ekonomi

Pemegang Ijazah SMA bagian A dapat melanjutkan pelajaran di Sekolah Tinggi (*faculteit*) Kesusastaan, Ijazah bagian B memberi jalan ke segenap juran, teru-

tama ilmu pasti/alam, teknik dan kedokteran, Ijazah bahagian C memberi jalan kejuruan hukum dan ekonomi.

3. Sekolah Menengan Kejuruan

a. Tingkat Pertama

- 1) Sekolah Pertukangan, 2 tahun sesudah SR dengan bagiannya sebagai berikut : ukir, besi, kayu, mobil, mebel, anyaman, montir, mesin, keramik.
- 2) Sekolah Teknik
Lamanya pelajaran 4 tahun sesudah SR, bahagian yang ada ialah : bangunan, listrik, dan kimia.
- 3) Sekolah Guru B (SGB)
Lama pelajaran 4 tahun sesudah SR, 3 tahun pelajaran umum dan 1 tahun pelajaran vak guru. Juga diterima taman SMP dengan tambahan pelajaran 1 tahun. Iulusan SGB disiapkan untuk menjadi guru SR.
- 4) Sekolah Kepandaian Putri (SKP)
Lama pelajaran 3 tahun sesudah SR, pengetahuan yang diajarkan ialah tentang rumah tangga dan menjahit. Pemegang ijazah ini dapat melanjutkan pelajaran ke Sekolah Guru Taman Kanak Kanak (SGTK) Sekolah Bidan dan kelas IV SKP yang memperdalam keahliannya.
- 5) Sekolah Dagang
Lama pelajaran 3 tahun sesudah SR
- 6) Sekolah Pertanian
- 7) Sekolah Pertambahan Geologi bagian pertama, lama pelajaran 3 tahun sesudah SR
- 8) Sekolah Pertambahan Geologi bagian Laboran.
- 9) Sekolah Perikanan lama pelajaran 4 tahun sesudah SR
- 10) Sekolah Tekstil Rendah, lama pelajaran 1 tahun sesudah tamat sekolah pertukangan 2 tahun dan 3 tahun sesudah tamat SR.

b. Tingkat Atas

- 1) Sekolah Teknik Menengah (STM)
Lama pelajaran 3 tahun sesudah SMP bagian B, juga dapat diterima murid kelas IV ST.
- 2) Sekolah Guru A (SGA)
Lama pelajaran 3 tahun sesudah bagian A atau B, jika diterima murid kelas IV SGB. Mereka disiapkan menjadi guru Sekolah Lanjutan Pertama.
- 3) Sekolah Guru Kepandaian Puteri (SGKP)
Lama pelajaran 4 tahun sesudah SMP dan SKP di kelas II diadakan pembagian, bagian A menjadi guru dan bahagian b memperdalam pelajaran menjahit.
- 4) Sekolah Ekonomi Menengah
Lama pelajaran 3 tahun sesudah SMP atau Sekolah Dagang
- 5) Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan
Lama pelajaran 3 tahun sesudah SMP atau SKP 4 tahun
- 6) Sekolah Pertanian Menengah
Lama pelajaran 3 tahun sesudah SMP bagian B atau sekolah pertanian.
- 7) Sekolah Kehutanan Menengah Tinggi
Lama Pelajaran 3 tahun sesudah SMP bahagian B
- 8) Sekolah Menengah Tinggi Peternakan
Lama pelajaran 3 tahun sesudah SMP bahagian B
- 9) Sekolah Pertambangan dan Geologi Menengah
Lama pelajaran 3 tahun sesudah SMP bahagian B
- 10) Sekolah Teknologi Menengah tinggi
Yang diterima menjadi murid adalah : pelajar SMP bagian B, Sekolah Teknik dan Sekolah Pertanian
- 11) Sekolah Assisten Ahli Obat.
Lama pelajaran 2 tahun sesudah SMP bahagian B.
- 12) Sekolah Polisi Menengah
Lama pelajaran 2 tahun sesudah SMP, tamatan sekolah ini diangkat menjadi Inspektur Polisi.

- 13) Sekolah Guru Agama dan Hakim Islam
Lama pelajaran 4 tahun sesudah SMP atau Sekolah Menengah Islam.

4. Perguruan Tinggi

Waktu itu di Indonesia baru ada 2 universiteit (universitas) Negeri yaitu Universitas Indonesia di Jakarta dan Universitas Gajah Mada di Yogyakarta.

a. Universitas Indonesia (UI)

Universitas ini berpusat di Jakarta dengan mempunyai cabang di berbagai kota di Indonesia; bahagian (Fakultas) dari UI adalah :

- 1) Fakultas Hukum, Kedokteran, Ekonomi dan Sastra di Jakarta.
- 2) Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan di Bogor.
- 3) Fakultas Teknik di Bandung.
- 4) Fakultas Kedokteran Gigi di Surabaya.
- 5) Fakultas ekonomi di Makassar.

b. Universitas Gajah Mada (UGM)

- 1) Fakultas Kedokteran
- 2) Fakultas Hukum
- 3) Fakultas Teknik
- 4) Fakultas Sastra dan Filsafat
- 5) Fakultas Pertanian

Lama pelajaran pada Fakultas Kedokteran adalah 6½ tahun Kedokteran Giri 5 tahun dan Fakultas lainnya umumnya 5 tahun.

c. Sekolah Tinggi dan Akademi

- 1) Sekolah Teknik Tinggi
Lama pendidikan 4 tahun sesudah SMA bahagian B
- 2) Akademi Ilmu Politik
Lama pelajaran 4 tahun sesudah SMA.
- 3) Akademi Pendidikan Guru.
Lama pelajaran 3 tahun sesudah SMA dan SGA.

- 4) **Akademi Pertanian dan Kehutanan**
Lama pelajaran 4 tahun sesudah SMA bahagian B
 - 5) **Akademi Polisi**
Lama pelajaran 4 tahun sesudah SMA
 - 6) **Akademi Militer**
Lama pelajaran 3 sampai 4 tahun, tergantung jurusan yang dipilih
 - 7) **Sekolah Pertambangan Geologi Tinggi**
Lama pelajaran 2 tahun sesudah SMA bahagian B
 - 8) **Sekolah Teknologi Tinggi**
Lama pelajaran 2 tahun sesudah SMA bahagian B
 - 9) **Sekolah Kimia**
Lama pelajaran 2 tahun sesudah SMA bahagian B
 - 10) **Sekolah Pendidikan Ahli Hukum**
Lama pelajaran 2 tahun sesudah SMA
 - 11) **Sekolah Tinggi Hukum**
Lama pelajaran 4 tahun sesudah SMA
 - 12) **Akademi Pendidikan Jasmani**
Lama pelajaran 4 tahun sesudah SMA
 - 13) **Akademi Seni Rupa**
Lama pelajaran 3 tahun sesudah SMA
 - 14) **Konservatorium Karawitan**
Lama pelajaran 3 tahun sesudah SMA
- d. **Kursus pengetahuan Umum (KPU)**
Kursus ini dibagi atas 3 jenis yaitu :
- 1) **KPU A**, di tiap kota kewedanaan yang diperuntukkan bagi pemuda berumur 14–18 tahun.
 - 2) **KPU B**, di tiap kota kabupaten yang diperuntukkan bagi pemuda berumur 19–25 tahun yang berijazah SMP dan KBU A.
 - 3) **KBU C (Balai Pengetahuan Umum atau *Volk universiteit*)**. Kursus ini diperuntukkan bagi mereka yang sungguh-sungguh mempunyai minat untuk mempelajari suatu pengetahuan. Yang diterima adalah yang berijazah SMA.

e. Pengajaran Luar Sekolah

Pengajaran ini diberikan oleh "Jawatan Pendidikan Masyarakat" Kementerian PPK Pendidikan Masyarakat bekerja di lapangan :

- 1). Pemberantasan Buta Huruf
- 2). Penyelenggaraan Kursus Pengetahuan Umum
- 3). Penyelenggaraan Perpustakaan Rakyat
- 4). Pengembangan Kepanduan.^{1 1)}

Dasar-dasar pendidikan dan pengajaran telah diletakkan oleh Menteri PPK Mr Suwandi dan kemudian dilanjutkan oleh Dokter Abu Hanifah. Menteri PPK Dokter Bahder Djohan menyempurnakan dasar yang telah disiapkan dan melanjutkan usaha pendidikan dan pengajaran, sesuai dengan kemampuan dan biaya yang tersedia.

Dalam kedudukannya sebagai Menteri PPK Dokter Bahder Djohan bersama pejabat teras Kementerian lainnya seperti Sekjen Mr Hadi, Sugarda, Sadaryun dan lain-lain sering mengadakan kunjungan ke daerah. Dalam kunjungan itu Bahder Djohan secara langsung dapat menyaksikan keadaan pendidikan yang keadaannya masih jauh dari memuaskan. Banyak kekurangan yang perlu diperbaiki baik sarana maupun prasarana pendidikan. Tetapi karena kekurangan biaya, Bahder Djohan belum banyak dapat berbuat. Sesuai dengan kemampuan yang ada pada waktu itu, biaya kementerian hanya dikeluarkan untuk hal-hal yang sangat perlu dan mendesak untuk diselesaikan.

Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi hanya berjalan dengan biaya dan perlengkapan yang belum memadai. Tetapi karena dedikasi yang tinggi dari pimpinan kementerian beserta para guru dan aparat kementerian lainnya, sekolah-sekolah dapat berjalan sebagaimana biasa untuk mendidik tunas bangsa.^{1 2)}

Pada masa itu keamanan belum seluruhnya dapat dicapai, yang menyebabkan tugas kabinet (pemerintah) semakin berat.

Masalah dalam negeri lainnya yang paling berat dihadapi oleh pemerintah adalah masalah Aceh. Pada masa perang kemerdekaan Aceh tidak pernah diduduki oleh Belanda, dan kedudukan daerah itu setingkat dengan propinsi. Tetapi sesudah pengakuan kedaulatan kedudukan Aceh diturunkan menjadi satu keresidenan di bawah Sumatra Utara. Aceh di bawah Gubernur Militer Daud Beureuh tidak dapat menerima keputusan ini, Aceh tetap menuntut satu propinsi.

Selain soal keamanan yang menjadi beban pemerintah ialah soal pengembalian Irian Barat ke tangan Indonesia. Perundingan pengembalian Irian Barat antara Indonesia dan Belanda tidak mencapai hasil karena Belanda tidak bermaksud mengembalikan daerah itu. Kabinet Natsir kemudian mendapat mosi tidak percaya dari Hadikusumo (PNI), sehingga kabinet pada tanggal 21 Maret 1951 terpaksa mengembalikan mandat kepada Presiden Sukarno.^{1 3)}

Pada anggota kabinet termasuk Menteri PPK Bahder Djohan belum banyak dapat berbuat untuk melaksanakan programnya. Ia hanya menjadi menteri PPK selama 6 bulan. Dalam Kabinet Sukiman yang dibentuk tanggal 26 April 1951 yang menjadi menteri PPK adalah : Mr Wongsonegoro.^{1 4)}

Kabinet Sukiman juga tidak berusia lama, banyak soal yang mendapat tantangan dalam parlemen, maupun dari Masyumi dan PNI sendiri. Yang menjadi lantaran bagi jatuhnya Kabinet Sukiman ialah ditandatanganinya bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat pada Indonesia atas dasar "*Mutual Security Act*" 1951 (MSA), yang berarti bertentangan dengan program kabinet yaitu politik luar negeri bebas aktif. Dengan jatuhnya Kabinet Sukiman sudah barang tentu program kabinet yang sudah disusun tidak dapat dilaksanakan, termasuk program bidang pendidikan.^{1 5)}

Sesudah Kabinet Sukiman menyerahkan mandatnya, maka dibentuklah Kabinet Wilopo. Dalam kabinet ini Bahder Djohan

kembali ditunjuk menjadi menteri PPK. Susunan lengkap dari kabinet ini adalah sebagai berikut :

1. Perdana Menteri : Mr. Wilopo
2. Wakil Perdana Menteri : Prawoto Mangkusasmito
3. Menteri Luar Negeri : Mukarto
4. Menteri Dalam Negeri : Mr Mohammad Rum
5. Menteri Pertahanan : Hamengku Buwono IX
6. Menteri Keuangan : Dr. Sumitro Joyohadikusumo.
7. Menteri Perekonomian : Mr Sumanang
8. Menteri Pertanian : Mohammad Sarjan
9. Menteri PPK : Dr. Bahder Djohan
10. Menteri Penerangan : Arnold Mononutu
11. Menteri Agama : K.H. Faqih Usman
12. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Suwarto
13. Menteri Perburuhan : Iskandar Teja Sukmana
14. Menteri Sosial : Anwar Cokroaminoto
15. Menteri Kehakiman : Mr Lukman Wiriadinata
16. Menteri Kesehatan : Dr. J. Leimena
17. Menteri Perhubungan : Ir Juanda
18. Menteri Urusan Pegawai : R.P. Suroso¹⁶⁾

Kabinet Wilopo dilantik pada tanggal 3 April 1952, setelah Wilopo berusaha selama dua minggu untuk menyusun kabinet itu. Program Kabinet Wilopo terutama ditunjuk pada persiapan pelaksanaan pemilihan umum, kemakmuran pendidikan rakyat dan keamanan. Sedang program luar negeri terutama ditujukan pada penyelesaian masalah hubungan Indonesia—Belanda dan pengembalian Irian Barat (Jaya) ke Indonesia serta menjalankan politik bebas aktif menuju perdamaian dunia.¹⁷⁾

Salah satu program Kabinet Wilopo adalah melaksanakan pendidikan. Sebagai menteri PPK dalam kabinet ini Bahder Djohan berusaha melaksanakan program kabinet di bidang pendidikan dan pengajaran. Sebagai menteri PPK dalam kabinet Natsir, ia juga telah berpengalaman dalam bidang pendidikan

dan pengajaran. Program bidang pendidikan boleh dikatakan tidak mengalami perubahan, begitupun struktur dan personalia. Yang menjadi masalah sekarang adalah pelaksanaannya dan biaya yang mendukung pelaksanaan itu.

Dengan penuh dedikasi dan pengabdian pimpinan Kementerian PPK dengan dibantu oleh pejabat teras dan semua aparat kementerian melaksanakan tugas mereka dengan baik. Masalah umum yang ditemui pada waktu itu dalam melaksanakan pendidikan adalah kekurangan biaya, gedung sekolah dan guru. Tetapi walaupun begitu menteri PPK Bahder Djohan dengan gigi mengatasi masalah itu, yang penting pada waktu itu bagaimana anak-anak agar bisa sekolah. Agar anak-anak bisa bersekolah harus disediakan gedung sekolah dan guru. Kementerian PPK mengemban amanat undang-undang dasar dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.¹⁸⁾

Seperti halnya kabinet terdahulu, maka Kabinet Wilopo juga menghadapi masalah politik dalam negeri dan politik luar negeri. Kabinet Wilopo menghadapi masalah provinsialisme dan bahkan separatisme yang membahayakan persatuan. Di daerah timbul perkumpulan yang berlandaskan semangat kedaerahan seperti "Paguyuban Daya Sunda" di Bandung dan Gerakan Pemuda Federal Republik Indonesia di Makassar.¹⁹⁾

Selain soal kedaerahan dan kesukuan, Kabinet Wilopo juga menghadapi peristiwa 17 Oktober 1952, di mana pimpinan Angkatan Darat menuntut agar parlemen dibubarkan oleh presiden. Peristiwa ini cukup menggoncangkan kabinet sebagai penanggung jawab pemerintahan. Kedudukan kabinet yang telah goyah, semakin goyah lagi, karena soal tanah di Sumatra Timur yang terkenal dengan nama Peristiwa Tanjung Morawa.

Berdasarkan Persetujuan KMB, maka perkebunan asing di perbolehkan mengusahakan perkebunan mereka kembali. Untuk melaksanakan maksud itu, maka polisi terpaksa mengusir para penghuni liar yang menempati areal perkebunan tersebut. Penduduk yang menempati tanah itu dihasut oleh PKI untuk

melawan alat negara, sehingga di pihak petani jatuh 5 orang korban yang terbunuh. Peristiwa ini mendapat sorotan yang tajam dan emosional dari pers dan parlemen. Mosi tidak percaya dilancarkan pada tanggal 2 Juni 1953, Wilopo terpaksa mengembalikan mandatnya kepada Presiden.²⁰⁾

Dengan demikian berakhirilah tugas Kabinet Wilopo yang hanya berumur lebih kurang satu tahun. Tugas Bahder Djohan sebagai menteri PPK dengan demikian menjadi berakhir pula. Banyak tugas dan program yang belum sempat diselesaikannya dalam mengelola masalah pendidikan dan kebudayaan.²¹⁾

Sewaktu Bahder Djohan berhenti sebagai menteri PPK dalam Kabinet Natsir, ia kembali mencurahkan perhatiannya kepada bidang kebudayaan yang mulai disenanginya semenjak ia memimpin *Jong Sumatranen Bond*. Karena perhatian dan kegiatan Bahder Djohan di bidang kebudayaan, ia akhirnya diangkat menjadi ketua Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI).

LKI kemudian mengadakan Kongres Kebudayaan II di Bandung yang dilaksanakan dari tanggal 6 sampai 11 Oktober 1951. Kongres ini dihadiri oleh wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri PPK Mr. Wongsonegoro beserta para pejabat tinggi lainnya. Sebelumnya telah diadakan Kongres Kebudayaan I di Magelang pada bulan Agustus 1948. Sebagai tindak lanjut dari Kongres Kebudayaan I, maka di Jakarta pada bulan Maret 1950 didirikan Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI).²²⁾

Dalam Kongres Kebudayaan II, Bahder Djohan sebagai ketua LKI antara lain mengatakan : Keinsyafan akan harga diri menjadi titik pangkal perjuangan kemerdekaan bangsa selama 40 tahun, pun tidak luput menjelma dalam lapangan kebudayaan. Semenjak zaman penjajahan telah timbul kesadaran akan kepribadian manusia Indonesia. Pada kongres Kebudayaan I, kebudayaan telah ditempatkan sebagai bagian, dari pembangunan negara dan masyarakat.

Kemudian Bahder Djohan mengatakan bahwa LKI harus menunjukkan perhatiannya pada soal yang kongkrit yang dite-

mui oleh masyarakat Indonesia dalam perkembangan ke segala jurusan hidup. Masalah itu adalah hak pengarang, kritik seni, dan sensor film.

Menurut Bahder Djohan, kebudayaan adalah masalah perhubungan manusia dan alam, antara adab dan kodrat, antara kultur dan natur, antara akal dan budi. Dalam masyarakat manusia peradaban adalah penjelmaan dari kebudayaan. Di dalam kebudayaan Indonesia masa lampau, banyak tempat yang kelihatan kabur, tetapi adapula puncak yang disinari cahaya gemilang yang menyebabkan getaran jiwa kita sendiri. Akhirnya Bahder Djohan mengatakan bahwa bangsa Indonesia benar-benar tengah menyongsong zaman jaya.^{2 3})

Keputusan Kongres Kebudayaan II, tidak jauh berbeda dari pidato pembukaan dan pengarahan Ketua LKI Bahder Djohan. Masalah pokok yang diputuskan oleh kongres adalah:

1. Mengenai Hak Pengarang
2. Mengenai Perkembangan Kesusasteraan
3. Mengenai Kritik Seni
4. Mengenai Sensor Film
5. Mengenai Organisasi Kebudayaan^{2 4})

Kemudian sesudah berhenti menjadi menteri PPK dalam Kabinet Wilopo, Bahder Djohan kembali kepada profesinya semula yaitu bidang kesehatan. Pada tahun 1953 Dokter Bahder Djohan diangkat menjadi direktur Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP). Bidang kesehatan telah digeluti oleh Bahder Djohan sejak tahun 1927 sampai pengakuan kedaulatan tahun 1950. Di rumah sakit ia bertemu kembali dengan teman sejawat, kolega dan para pembantunya yang dalam masa-masa sulit menghadapi tugas berat, khususnya dalam perang kemerdekaan.

Sementara itu Bahder Djohan juga diangkat menjadi guru besar di bidang Penyakit Tanah Panas dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1954 Prof. Dr. Bahder Djohan diangkat menjadi residen (rektor) Universitas Indonesia (UI). Dengan diangkatnya Bahder Djohan sebagai

presiden UI, jabatannya sebagai direktur RSUP terpaksa dilepaskan.²⁵⁾

Universitas Indonesia (UI) diresmikan pada tanggal 2 Februari 1950, gabungan dari Balai Perguruan Tinggi RI di Jakarta dengan "*Universiteit van Indonesie*" yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1947. Di Jakarta UI mempunyai Fakultas : Hukum, Kedokteran, Ekonomi, dan Sastra, di Bogor Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan, di Bandung Fakultas Teknik, di Surabaya Fakultas Kedokteran Gigi dan di Makassar Fakultas Ekonomi. Sebagai presiden (rektor) UI pertama adalah Ir. Surachman.²⁶⁾

Sewaktu Prof. Dr. Bahder Djohan diangkat menjadi presiden (rektor) UI pada tahun 1954. Perguruan tinggi ini telah berkembang pesat. Fakultas Teknik UI di Bandung, telah berdiri sendiri dengan nama Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bogor Fakultas Pertanian menjadi Institut Pertanian Bogor (IPB), sedangkan di Surabaya Fakultas Kedokteran Gigi menjelma menjadi Universitas Airlangga. Kemudian pada tahun 1956 Fakultas Ekonomi UI di Makassar menjadi Universitas Hasanudin.²⁷⁾

Pengembangan universitas juga memerlukan pengembangan kampus dan tenaga pengajar (dosen) dan guru besar (professor). Setelah cabang UI di luar Jakarta telah berdiri sendiri, maka tugas UI tidak semakin ringan. UI juga mengembangkan dirinya dengan mendirikan Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Sosial, di samping fakultas yang telah ada. Untuk mengembangkan UI, Bahder Djohan di samping mencari dana dalam negeri, juga mencari bantuan luar negeri. Guna keperluan mencari bantuan uang dan tenaga pengajar dari universitas terkenal negeri itu.²⁸⁾

Sebagai ketua LKI, Bahder Djohan pernah mengunjungi beberapa negara, seperti Muangthai dan Cina. Kemudian dari tahun 1954—1957 Bahder Djohan juga diangkat menjadi ketua Palang Merah Indonesia (PMI), karena kecintaannya kepada kemanusiaan dan jiwa pengabdian yang tinggi.²⁹⁾

Dalam pada itu situasi politik tanah air pada akhir tahun 1956 semakin mengalami krisis. Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 1 Desember 1926 mengundurkan diri dari jabatannya, karena tidak dapat menerima konsepsi Presiden Sukarno. Kemudian pada tanggal 20 Desember 1956 di Sumatra Tengah berdiri Dewan Banteng, dan 22 Desember 1956 di Sumatra Utara berdiri Dewan Gajah, seterusnya pada tanggal 18 Februari 1957 di Sulawesi Utara berdiri Dewan Manguni. Gerakan daerah ini akhirnya memuncak dengan didirikannya "Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia" (PRRI), di Padang oleh Ahmad Husin tanggal 10 Februari 1958. Kemudian di Manado juga berdiri Dewan Permesta yang dipimpin oleh Vence Sumual. PRRI kemudian membentuk kabinet yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara, dengan beberapa menteri antara lain : Sumitro Joyohadikusumo dan Burhanuddin Harahap.^{3 0})

Untuk menghadapi gerakan PRRI ini, pemerintah pusat memutuskan untuk menggunakan senjata, perang saudara pasti berkecamuk. Bahder Djohan melihat masalah ini bukan dari sudut politik, tetapi dari sudut kemanusiaan semata-mata. Bahder Djohan waktu itu juga bukan menduduki jabatan politik, tetapi memegang jabatan akademis (rektor UI). Menurut Bahder Djohan penggunaan kekerasan akan menimbulkan kehancuran bagi rakyat Indonesia. Rakyat yang telah menderita selama perang kemerdekaan (1945-1950) akan lebih menderita lagi karena timbulnya perang saudara. Perang saudara biasanya lebih kejam dari perang dengan bangsa asing. Dalam situasi seperti ini yang akan banyak mengambil keuntungan adalah orang-orang PKI. Tokoh-tokoh PRRI sebagian besar adalah musuh-musuh PKI dan orang-orang anti komunis seperti Syafruddin Prawiranegara, Sumitro Joyohadikusumo dan Burhanuddin Harahap.^{3 1})

Walaupun Bahder Djohan bukan tokoh politik dan sejak muda tidak pernah memasuki partai politik, dan waktu diangkat menjadi menteri PPK dan Presiden UI juga bukan sebagai orang

politik, tetapi sekarang ia ikut memasuki kancah politik. Ia berusaha dengan sekuat tenaga agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali keputusannya untuk mempergunakan kekerasan. Bahder Djohan telah berusaha menemui pejabat tinggi negara, terutama yang berhubungan dengan masalah keamanan, seperti Jenderal AH. Nasution. Usaha Bahder Djohan untuk menemui Presiden Sukarno tidak pernah tercapai.

Dalam pada itu pemerintah pusat tetap akan menggunakan kekerasan dengan melancarkan operasi militer, jalan musyawarah telah tertutup sama sekali. Setelah usahanya tidak berhasil untuk menggagalkan penggunaan kekerasan dalam masalah PRRI, maka Bahder Djohan akhirnya terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya. Pada bulan Februari 1958 Prof. Dr. Bahder Djohan meletakkan jabatan sebagai presiden (rektor) Universitas Indonesia.³²⁾

3.2 Pengabdian Bahder Djohan Selama Masa Pensiun

Semenjak meletakkan jabatan sebagai rektor Universitas Indonesia tahun 1958, Bahder Djohan juga mengajukan permintaan pensiun sebaagai pegawai negeri. Dengan demikian terputuslah hubungan Bahder Djohan dengan pemerintah, ia hidup sebagai warga negara biasa di rumahnya yang sederhana, Jalan Kimia No. 9 Jakarta.

Tindakan Bahder Djohan meletakkan jabatan sebagai pejabat negara menimbulkan rasa terkejut masyarakat pada waktu itu. Umumnya orang tidak mengira bahwa Bahder Djohan akan bertindak setegas itu, dalam menegakkan prinsip hidupnya. Hampir seluruh surat kabar yang terbit di Jakarta memuat berita ini di halaman pertama, dengan memberikan komentar dan ulasan. Bahkan surat kabar daerah, khususnya di Padang memuat berita penting ini dengan disertai ulasan dan penilaian. Tiap-tiap surat kabar memberikan ulasan sesuai dengan selera dan misi politik yang dibawa oleh surat kabar itu. Ada yang pro dan ada yang kontra terhadap tindakan Bahder Djohan ini.

Walaupun jabatan rektor UI bukan jabatan politik, tetapi dampak dari pengunduran diri Bahder Djohan juga mempengaruhi situasi politik. Pengaruh dari pengunduran diri Bahder Djohan ini, tentu tidak sama dengan pengaruh pengunduran diri dari Bung Hatta sebagai wakil presiden. Pengaruh pengunduran diri Bung Hatta cukup menggoncangkan kehidupan politik, karena Bung Hatta adalah orang kedua di Indonesia dan proklamator kemerdekaan RI. Persamaan kedua tokoh ini adalah bahwa keduanya teguh dalam mempertahankan prinsip dan keyakinan masing-masing. Mereka berdua tidak segan-segan meninggalkan jabatan empuk, kalau sekiranya bertentangan dengan kata hatinya. Barangkali pemimpin seperti Mohammad Hatta dan Bahder Djohan ini jarang dan sulit ditemui di Indonesia ini. Secara kebetulan pula Bahder Djohan dan Mohammad Hatta telah berteman sejak kecil, kemudian dilanjutkan sampai menjadi pemuda dan sama-sama memimpin *Jong Sumatranen Bond* (JSB) di Padang dan akhirnya di Jakarta.

Sesudah pensiun Bahder Djohan hidup secara sederhana dari uang pensiunnya. Sebagai seorang dokter ia tidak bersedia membuka praktek di rumahnya seperti dokter-dokter lainnya, walaupun ia mempunyai kemampuan dan alat yang cukup untuk praktek. Tetapi kalau ada orang sakit yang datang ke rumahnya meminta bantuan, dengan senang hati ia akan membantu, tetapi Bahder Djohan tidak bersedia untuk dibayar. Ia membantu orang sakit itu semata-mata hanya karena kemanusiaan sesuai dengan panggilan hatinya.^{3 3})

Selama masa pensiun, Bahder Djohan mengisi waktu senggangnya dengan memperdalam agama Islam dan mempelajari masalah kebudayaan yang telah mulai digemarinya semenjak masa muda. Ia juga tidak melupakan olahraga, karena sebagai seorang dokter Bahder Djohan tahu betul manfaat olahraga bagi kesehatan badan.

Dengan segala kesederhanaan Bahder Djohan dan keluarganya melalui kehidupan ini dengan tabah dan penuh ketaqwa-

an kepada Tuhan. Setelah melalui masa suram dalam ekonomi rumah tangga selama 8 tahun, maka pada tahun 1966 datanglah tawaran dari Panca Niaga untuk membuka praktek di Jalan Kramat Raya sebagai dokter perusahaan itu. Akhirnya tawaran tersebut diterima oleh Bahder Djohan dengan segala senang hati.^{3 4})

Pada tanggal 28 September 1968 Prof. Nasrun SH, rektor Universitas Ibnu Khaldun (UIK) meninggal dunia. Pimpinan Yayasan Ibnu Khaldun kemudian menghubungi Prof. Dr. Bahder Djohan agar bersedia memimpin Universitas Ibnu Khaldun, menggantikan Prof. Nasrun SH. Setelah Bahder Djohan menyatakan kesediaannya, maka pada tanggal 10 Maret 1969 Bahder Djohan diangkat menjadi ketua Presidium Universitas Ibnu Khaldun (UIK). Kemudian pada tanggal 27 Juli 1971 Bahder Djohan diangkat menjadi rektor penuh. Ketika Bahder Djohan pertama kali diangkat, jumlah mahasiswa UIK sebanyak 900 orang dengan 6 fakultas.^{3 5})

UIK pertama kali didirikan pada tanggal 11 Juni 1956 oleh Yayasan Ibnu Khaldun. Ketika pertama kali dibuka, perguruan tinggi ini bernama Perguruan Tinggi Ilmu Kewartawanan dan Politik (PTIKP) yang dipimpin oleh Parada Harahap sebagai dekan. Nama Ibnu Khaldun diambil dari nama seorang sarjana muslim yang hidup (1322–1406) yang banyak mengarang buku dan salah satu yang terkenal adalah *Muqaddimah*.

Pada tanggal 11 Mei 1959 Parada Harahap meninggal dunia, dan PTIKP merasa kehilangan besar. Parada Harahap juga terkenal sebagai wartawan kawakan semenjak zaman Hindia Belanda. Kehilangannya bukan hanya dirasakan oleh PTIKP, tetapi juga oleh korp wartawan dan seluruh rakyat Indonesia.

Setelah Parada Harahap meninggal, pada tanggal 10 Desember 1959 PTIKP diganti menjadi Universitas Ibnu Khaldun (UIK) dengan Fakultas Publisistik, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan, Fakultas Ekonomi

dan Fakultas Ushuluddin. Sebagai rektor pertama UIK diangkat Dr. H. Ali Akbar.

Sampai tahun 1963 UIK mencatat kemajuan yang mengembirakan, jumlah mahasiswa 1000 orang dan tenaga pengajar 60 orang. Tempat kuliah sementara adalah beberapa lokal Fakultas Psikologi UI, Jalan Diponegoro dan beberapa lokal Yayasan Raden Saleh yang terletak di Jalan Medan Merdeka Timur. Pada tahun itu UIK merayakan Dies Natalis ke-6 di Bali Room Hotel Indonesia. Atas prestasi yang dicapainya, maka pada tanggal 1 Agustus 1963 Fakultas Publisistik dan Fakultas Ilmu Sosial Politik dinaikkan statusnya dari "terdaftar" menjadi "diakui".

Sejak tahun 1964 stabilitas UIK juga terganggu oleh intrik PKI, tetapi kegiatan UIK tetap berjalan. Tetapi semenjak tahun 1966 keadaan berubah, UIK mendapat gedung baru di Senen Raya 45-47, yaitu bekas sekolah Cina simpatisan PKI yang diambil alih.

Pada akhir tahun 1967 terjadi kegoncangan dalam tubuh UIK, Dr. H. Ali Akbar mengundurkan diri sebagai rektor UIK, dan kemudian digantikan oleh Prof. Nasrun SH sebagai ketua presidium. Dr. H. Ali Akbar kemudian mendirikan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) dengan Sekolah Tinggi Kedokteran. YASRI sampai saat ini mengalami kemajuan yang mengembirakan, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pengajarnya.

UIK kemudian dipimpin oleh Prof Nasrun SH dan Drs. Syarif Usman, tetapi yang mengendalikan UIK sebenarnya adalah Syarif Usman. Tidak lama memimpin UIK, Prof Nasrun SH meninggal dunia pada tanggal 28 September 1968. Pimpinan UIK buat sementara dipegang oleh Syarif Usman sebagai ketua presidium UIK.³⁶⁾

Kemudian pimpinan Yayasan Ibnu Khaldun meminta kesediaan Bahder Djohan untuk bersedia memimpin UIK. Tawaran itu akhirnya diterima oleh Bahder Djohan dengan motivasi ingin memajukan perguruan tinggi Islam itu. Menurut

Bahder Djohan, kemajuan perguruan tinggi Islam umumnya jauh terkebelakang dibandingkan dengan kemajuan perguruan tinggi Kristen. Pada waktu itu umat Kristen telah mempunyai 6 universitas di seluruh Indonesia, sedangkan unversitas Islam jumlahnya sedikit, dan dari yang sedikit itu tak ada yang patut dibanggakan. Umat Islam Indonesia banyak yang kaya, tetapi tidak seberapa yang bersedia untuk beramal dan mengeluarkan hartanya untuk kepentingan umat Islam. Fakta ini lebih mendorong Bahder Djohan untuk ikut membina perguruan tinggi Islam dengan menyumbangkan tenaga dan pikirannya.³⁷⁾

Meskipun telah menempati sebuah gedung di Senen Raya 45-47, tetapi UIK tetap saja goncang. Timbul pertentangan antara kelompok mahasiswa, yang berlarut-larut sampai tahun 1976. Untuk menyelesaikan masalah ini, maka pada tanggal 19 April 1977 dibentuk Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun (YPUIK). Badan ini kemudian mengadakan pembaharuan pimpinan UIK, dan Prof. Dr. Bahder Djohan tetap ditunjuk sebagai rektor.

Pada waktu itu jumlah Fakultas di UIK ada 6 buah yaitu: Fakultas Publisistik, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Kedokteran. Bahder Djohan di samping sebagai rektor UIK juga merangkap sebagai dekan Fakultas Kedokteran. Jumlah mahasiswa 500 orang, sedangkan tenaga pengajar sebanyak 100 orang. Kecuali Fakultas Kedokteran, semua fakultas di lingkungan UIK telah diakui sama oleh Kopertis Wilayah II.

Pada saat Dies Natalis ke-12 UIK bulan Juli 1977, telah mengangkat tiga orang pengajar UIK menjadi guru besar. Mereka itu adalah : Dr. H. Haryono SH, Dr. M. Ali Bey, MA. Phd, dan Drs. H. Amura. Pengangkatan ini telah disampaikan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mulai saat itu UIK terus membina kemampuannya, terutama ke dalam. Ke luar diusahakan membina kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dan dengan universitas di luar negeri serta lembaga internasional lainnya.

Dalam memasuki tahun 1980 UIK telah menghasilkan 220 orang sarjana dan 800 orang sarjana muda dari berbagai fakultas. Tahun ini juga direncanakan membuka Akademi Bahasa Arab dan Akademi Bahasa Inggris. Di samping itu UIK telah menyusun statuta yang telah disahkan dan dikukuhkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya telah disusun pula rencana induk bagi pengembangan Universitas Ibnu Khaldun sampai tahun 1985. Kemudian UIK juga telah memiliki sebidang tanah yang luas yang terletak di Jalan Pemuda Rawamangun Jakarta, berhadapan dengan kampus UI.³⁸⁾

Selain bidang pendidikan, bidang kebudayaan juga menarik perhatian Bahder Djohan dalam masa pensiun ini. Pada saat ini Bahder Djohan lebih menitikberatkan perhatiannya pada kebudayaan daerah khususnya kebudayaan daerah asalnya yaitu Minangkabau. Motto yang dibawakan oleh Bahder Djohan adalah memupuk kebudayaan daerah untuk mengembangkan kebudayaan nasional.

Pada tahun 1968 Bahder Djohan membantu kegiatan "*Centre For Minangkabau Studies*" (CMS) yang dipimpin oleh Muchtar Naim MA. CMS adalah suatu lembaga riset yang didirikan di Padang pada tanggal 25 Juli 1968. Lembaga ini bertujuan "menggerakkan, mengkoordinasi dan melakukan kegiatan penelitian ilmiah dalam rangka menggali, meneliti, mempelajari serta mempublisir unsur kebudayaan Minangkabau. Di dalam lembaga ini Bahder Djohan ditunjuk sebagai kurator beserta tokoh masyarakat Minang lainnya.³⁹⁾

CMS dengan dibantu oleh pemerintah daerah Sumatra Barat, kemudian mengadakan Seminar Hukum Adat Minangkabau tahun 1968 dan Seminar Masuknya Islam di Minangkabau tahun 1969. Kedua seminar itu diadakan di Padang dan berjalan dengan sukses. Pada tahun 1970 diadakan Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau yang diadakan di Batusangkar dari tanggal 1 - 8 Agustus 1970.

Bahder Djohan dipilih menjadi ketua *Steering Committee* dari Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, dengan dibantu oleh tenaga muda seperti Muchtar Naim MA dan Drs. Syafruddin Bahar. Seminar ini dihadiri oleh tokoh Minang terkemuka dari Jakarta seperti Mohammad Hatta, Hamka dan tokoh Minang lainnya seperti MD Mansur, Gazalba, Amura dan Lukman Ali. Seminar ini juga dihadiri oleh tokoh kebudayaan terkemuka di Indonesia pada waktu itu, yaitu Sukmono dan Kuncaraningrat.

Dalam seminar ini telah dibicarakan berbagai prasaran dan kertas kerja dari tokoh-tokoh ilmuwan tersebut diatas, termasuk prasaran dari Bahder Djohan. Bahder Djohan dalam seminar ini memajukan prasaran dengan judul "Manusia Minang sebagai suatu Fenomena Sosiobiologik".

Prasaran Bahder Djohan ini berjumlah 13 halaman yang disusun secara sistematis dan ilmiah. Sesudah membicarakan prasaran itu dapat disimpulkan bahwa Bahder Djohan mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai masalah kebudayaan. Sebagai kesimpulan dari prasaran itu dikemukakan sebagai berikut :

1. Dalam manusia Minang mungkin mengalir darah Mongol dari daratan tengah Asia, kira-kira 3000 tahun yang lalu
2. Sistem keibuan pada masyarakat Minang mungkin sudah sangat tua
3. Masyarakat Minang bersifat multi kompleks, mempunyai bipolaritas dan memiliki daya akulturasi dan daya asimilasi
4. Semangat mengembara Minang mungkin berdasarkan suatu porses kultural yang sangat dahsyat
5. Pertumbuhan kebudayaan Minang menuju sistem keayah-ibuan khusus secara Minang, bukan sistem parental
6. Minang kompleks merupakan tantangan bagi penyelidik
7. Perlu didirikan suatu lembaga Antropologi Minang secara tersendiri atau sebagai bagian dari badan yang lebih besar.⁴⁰⁾

Sebagai kelanjutan dari seminar sejarah dan kebudayaan Minangkabau, maka di Jakarta pada tahun 1972 didirikan Yayasan Kebudayaan Minangkabau atas inisiatif Bahder Djohan dengan dibantu oleh beberapa orang tokoh seperti Saifullah Alimin, Drs. HM. Kamal dan Drs. H. Amura. Pelindung Yayasan ini adalah Dr. H. Mohammad Hatta, ketua kehormatan, gubernur Sumatera Barat, penasihat, Ny. Nelly Adam Malik, Prod Dr Hamka, Drg. Ny. Yetty Rizali Noor dan Drs. Harun Zain. Tujuan yayasan adalah memupuk kebudayaan daerah untuk mengembangkan kebudayaan nasional.⁴¹⁾

Pada tanggal 1 Januari 1974 Yayasan Minangkabau berhasil menerbitkan majalah *Kebudayaan Minangkabau* yang juga dipimpin oleh Prof Dr Bahder Djohan. Pemimpin Redaksi Drs. H. Amura dengan anggota redaksi : H. Umar Bahry, Drs. H.M. Kamal, Drs. Mardanas Safwan, Drs. Amrin Imran, dan Drs. Zubei Usman. Pembantu Ahli adalah : Prof Dr Hamka, Ir M.O. Parlindungan, Dr. Taufik Abdullah dan Dr. Alfian. Pembantu luar negeri : Drs. MD. Mansur (Malaysia), Drs. Sidi Gazalba (Malaysia) dan Muchtar Naim MA (Singapura).⁴²⁾

Dalam kata sambutannya pada penerbitan pertama Majalah *Kebudayaan Minangkabau*, Prof. Dr. Bahder Djohan mengatakan : Berdasarkan Akte Notaris No. 3 tanggal 3 Nopember 1972, didirikan suatu badan ilmiah yang bernama Lembaga Kebudayaan Minangkabau yang akan memiliki bagian : Antropologi Kultural (Adat dan Agama), Antropologi Fisik, Sastra dan Bahasa, Purbakala dan Permuseuman, Kesenian, dan Penerbitan.

Untuk menampung usaha di bidang ilmiah, maka diperlukan suatu wadah, dan untuk itulah didirikan majalah *Kebudayaan Minangkabau*. Masih banyak yang harus digali dan dicari untuk dapat mengungkapkan harta kebudayaan. Masyarakat sekarang akan menghadapi modernisasi, banyak yang akan berubah termasuk nilai kebudayaan. Dalam menghadapi perubahan nilai inilah pentingnya kehadiran majalah *Kebudayaan*

Minangkabau dalam mengadakan dokumentasi dan inventarisasi.⁴³)

Langkah besar yang ditempuh oleh Yayasan Kebudayaan Minangkabau ialah mendorong berdirinya Fakultas Sastra di lingkungan Universitas Andalas, Padang. Usaha ke arah itu ternyata tidak mudah, banyak halangan yang ditemui, tetapi Prof. Dr. Bahder Djohan pantang mundur dalam usahanya. Akhirnya pada tahun 1981 berdirilah Fakultas Sastra di Universitas Andalas yang telah lama dicita-citakan oleh Bahder Djohan.

Memasuki tahun 1980 keadaan fisik dan kesehatan Prof. Dr. Bahder Djohan telah mulai mundur. Ia tidak dapat lagi aktif memimpin Universitas Ibnu Khaldun, tetapi masih tetap mengikuti kegiatan Lembaga Pendidikan Tinggi dari rumahnya. Bahder Djohan masih tetap mengikuti dan memimpin UIK sebagai rektor, walaupun kegiatannya lebih banyak dilakukan di rumah. Secara periodik para pembantu dan stafnya seperti Prof. Drs. H. Amura melaporkan kegiatan UIK. Begitu juga yayasan dan majalah *Kebudayaan Minangkabau* tetap dipimpin oleh Prof. Dr. Bahder Djohan. Seperti halnya dengan UIK, maka kegiatan ini juga dilaporkan secara periodik ke rumahnya. Fisik Prof. Dr. Bahder Djohan telah makin melemah, tetapi semangatnya masih tetap menyala.

CATATAN BAB III

- 1) Nugroho Notosusanto (editor), *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka, Jakarta 1977, hal 266.
- 2) *Ibid*, hal 268
- 3) *Almanak Umum Nasional 1955*, Endang Jakarta 1955; hal 51 – 57.
- 4) Nugroho Notosusanto, *opcit*, hal 274.
- 5) *Ibid*, hal 276.
- 6) *Ibid*, hal 276.
- 7) *Almanak Umum Nasional 1955*, *opcit* hal 58 – 59.
- 8) Nugroho Notosusanto, *opcit* hal 82.
- 9) *Almanak Umum Nasional 1952*. Nusantara Jakarta 1952, hal 106 – 107.
- 10) Disarikan dari *Undang Undang No. 4 Tahun 1950* dalam, *Ibid*, hal 165 – 172.
- 11) Disarikan dari, *Ibid*, hal 175 – 181, dan Nugroho Notosusanto, *opcit* hal 274 – 275.
- 12) *Wawancara* dengan Prof Dr Bahder Djohan, Jalan Kimia No. 9 Jakarta 29 Juli 1975, hal 5.
- 13) Nugroho Notosusanto, *opcit*, hal 86.
- 14) *Almanak Umum Nasional 1955*, *opcit*, hal 59.
- 15) Nugroho Notosusanto, *opcit*, hal 86.
- 16) *Almanak Umum Nasional 1955*, *opcit*, hal 60 – 61.

- 17) Nugroho Notosusanto, *opcit*, hal 88.
- 18) Wawancara dengan Prof Dr Bahder Djohan, *opcit* hal 5.
- 19) Nugroho Notosusanto, *opcit*, hal 88.
- 20) *Ibid*, hal 90.
- 21) Wawancara dengan Prof Dr Bahder Djohan, *opcit*, hal 6.
- 22) Dr Bahder Djohan, *Pidato Pembukaan Kongres Kebudayaan II*, Bandung 1950, hal 2.
- 23) *Ibid*, disarikan dari hal 2 – 5.
- 24) *Putusan Kongres Kebudayaan Indonesia ke II*, Bandung 6 – 11 Oktober 1951.
- 25) *Bunga rampai Sumpah Pemuda*. Balai Pustaka Jakarta 1978, hal 195.
- 26) Nugroho Notosusanto, *opcit*, hal 277.
- 27) *Ibid*, hal 277.
- 28) Wawancara dengan Prof Dr Bahder Djohan, *opcit* hal 4.
- 29) *Bunga Rampai Sumpah Pemuda*, *opcit*, hal 195.
- 30) Nugroho Notosusanto, *opcit*, disarikan dari hal 98 – 99.
- 31) Wawancara dengan Prof Dr Bahder Djohan, *opcit*, hal 3.
- 32) *Ibid*, hal 4.
- 33) Wawancara dengan Prof Dr Bahder Djohan, Jalan Kimia No. 9 Jakarta, tanggal 19 Maret 1977, hal 1.
- 34) *Ibid*, hal 1.
- 35) Bahder Djohan, *Pidato Rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta pada Dies Natalis ke XXIV UIK*, Jakarta 1980, hal 5.
- 36) *Ibid*, disarikan dari hal 1 – 5.
- 37) Thalib Ibrahim, *Jiwa Joang Bangsa Indonesia*, Mahabudi Jakarta 1975, hal 74.
- 38) Bahder Djohan *opcit*, disarikan dari hal 5 – 10.
- 39) *Akte Notaris pendirian CMS*, Padang 25 Juli 1968.
- 40) Disarikan dari prasaran Bahder Djohan didalam Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau di Batusangkar dengan judul "Manusia Minang sebagai Suatu Fenomena Sosiobiologik" tahun 1970.

- 41) Susunan Pengurus *Yayasan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta 1972.
- 42) Susunan Redaksi *Majalah Kebudayaan Minangkabau*, dalam No. 1 Th I Januari 1974.
- 43) Disarikan dari, *Ibid*, hal 1 - 2.

PENUTUP

Pada akhir Februari 1958 hampir seluruh surat kabar yang terbit di Jakarta, lebih-lebih lagi yang terbit di Padang, memuat berita mengenai pengunduran diri Presiden (Rektor) Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Bahder Djohan. Tindakan pengunduran diri ini dilakukan karena Bahder Djohan tidak setuju dengan kebijaksanaan pemerintah dalam masalah penyelesaian PRRI. Menurut Bahder Djohan masalah PRRI sebaiknya diselesaikan dengan jalan musyawarah, tetapi pemerintah tetap memutuskan akan menyelesaikan masalah PRRI dengan kekuatan senjata.

Sebelumnya, pada tanggal 1 Desember 1956 Mohammad Hatta juga telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden, karena tidak dapat menyetujui gagasan dan kebijaksanaan Presiden Sukarno. Pengunduran diri wakil presiden ini cukup menggoncangkan masyarakat pada waktu itu. Walaupun pengunduran diri Bahder Djohan tidak begitu menggoncangkan masyarakat kalau dibandingkan dengan Mohammad Hatta, tetapi berita ini cukup mencengangkan dan mencemaskan.

Tanda tanya yang timbul di hati penulis ialah mengapa Bahder Djohan yang bukan tokoh politik dan tidak memegang jabatan politik ikut pula dalam masalah politik. Rasa kagum yang timbul di hati penulis pada waktu itu ialah bahwa Bahder

Djohan seorang tokoh yang tegas dan konsekuen. Ia rela meninggalkan jabatan dan kedudukan demi mempertahankan keyakinannya. Pada waktu itu penulis sangat kagum terhadap Mohammad Hatta dan Bahder Djohan. Dalam hati kecil penulis timbul keinginan untuk mengenal kedua tokoh ini lebih dekat.

Kesempatan untuk mengenal Bapak Mohammad Hatta tidak kesampaian, tetapi kesempatan untuk mengenal Bapak Bahder Djohan, penulis peroleh tahun 1970. Waktu itu di Jakarta diadakan persiapan untuk menyelenggarakan Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau yang akan diadakan di Batusangkar. Dalam rangka persiapan seminar, maka dibentuklah dua tim kerja yaitu Tim Sejarah dan Tim Kebudayaan yang akan mempersiapkan seminar sesuai dengan bidang masing-masing. Tim sejarah dipimpin oleh Drs. M. D. Mansur dengan anggota antara lain : Ir. M. D. Parlindungan, Dra. Asmaniar, Drs. Amtan Imran dan saya sendiri. Tim kebudayaan dipimpin oleh Prof. Dr. Bahder Djohan, dengan anggota antara lain : Drs. H. Amura dan Drs. Zuber Usman.

Dalam rapat-rapat yang diadakan oleh Tim Sejarah, Prof. Dr. Bahder Djohan juga ikut menghadiri rapat tersebut. Pada waktu inilah penulis memperoleh kesempatan mengenal Prof. Dr. Bahder Djohan secara langsung. Kesan pertama yang penulis peroleh sesudah mengenal Prof. Dr. Bahder Djohan ialah bahwa ia orang yang ramah, mudah bergaul, menghargai pendapat orang lain dan tidak memandang enteng orang, walaupun orang tersebut orang kecil. Dalam diskusi yang diadakan oleh Tim Sejarah, Bapak Bahder Djohan juga banyak mengemukakan pendapatnya. Menurut pendapat penulis waktu itu, ia mempunyai pengetahuan yang luas mengenai masalah sejarah dan kebudayaan. Selama pensiun rupanya Bapak Bahder Djohan mendalami masalah ini sehingga banyak pendapatnya yang berbobot mengenai masalah sejarah dan kebudayaan khususnya Minangkabau.

Sebelumnya, di Sumatra Barat juga telah pernah diadakan seminar, yaitu "Seminar Adat Minangkabau" yang diadakan

pada tahun 1968, dan "Seminar Islam di Minangkabau" yang diadakan pada tahun 1969 di Padang. Kedua seminar ini diprakarsai dan dipimpin oleh Muchtar Naim MA, seorang pemuda asal Minangkabau yang pernah belajar di Amerika Serikat. Karena Seminar tahun 1970 ini jangkannya lebih luas, maka yang ditunjuk menjadi ketua *Steering Committee* adalah Prof. Dr. Bahder Djohan, dan Muchtar Naim MA diangkat sebagai ketua II.

Setelah persiapan telah dianggap cukup, maka diadakanlah Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau di Batusangkar dari tanggal 1 – 8 Agustus 1970. Rombongan dari Jakarta antara lain terdiri atas: Dr. H. Mohammad Hatta, Prof. Dr. Bahder Djohan, Prof. Dr. Hamka, Prof. Dr. Kuncaraningrat, Drs. R Sukmono, Drs. MD Mansur, Drs. H. Amura, Dr. Sidi Gazelba, Drs. Lukman Ali, dan saya juga termasuk di antara rombongan itu. Rombongan dari Padang antara lain terdiri atas : Muchtar Naim MA, Drs. Syafruddin Bahar, Rasyid Manggis, Zainuddin St. Kerajaan dan AA. Maramis.

Seminar ini sebenarnya diadakan oleh swasta, dengan mendapat bantuan dari pemerintah daerah Sumatra Barat yang jelas biaya pesawat pulang pergi ke Padang bagi orang swasta dan penyiunan ditanggung oleh panitia, sedang rombongan yang berasal dari pegawai pemerintah ditanggung oleh jawatan tempat peserta seminar bekerja. Sebagai ketua pengarah, Prof. Dr. Bahder Djohan juga ikut memikirkan biaya bagi peserta untuk itu Bapak Bahder Djohan tidak segan-segan meminjam uang agar seminar ini dapat berjalan lancar.

Dalam seminar sejarah dan kebudayaan Minangkabau ini Prof. Dr. Bahder Djohan juga menyampaikan prasarannya yang berjudul "Manusia Minang sebagai Fenomena Socio Biologik". Menurut Bapak Bahder Djohan dalam daerah orang Minang mungkin mengalir daerah Mongol, yang suka mengembara (merantau). Prasaran ini mendapat banyak tanggapan dari peserta, tetapi semua pertanyaan dan sanggahan dapat dijawab oleh Bapak Bahder Djohan.

Sebagai ketua peng-rah, Bapak Bahder Djohan selalu memimpin sidang untuk merumuskan hasil seminar. Dalam salah satu sidang dewan perumusan yang dihadiri oleh antara lain: Dr. H. Mohammad Hatta, Prof. Dr. Hamka, Drs. R Sukmono, Drs. MD Mansur, Dr. Deliar Noor, Muchtar Naim MA, Drs. Syafruddin Bahar, Drs. H. Amura, Drs. HM. Kamal, Drs. Sidi Gazalba dan penulis sendiri, sidang juga dipimpin oleh Bapak Bahder Djohan.

Formasi duduk telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan kehendak Bapak Bahder Djohan. Tetapi sebelum sidang dimulai, salah seorang peserta mengusulkan agar duduk diatur agak bebas, tidak perlu seperti sidang resmi. Menanggapi usul ini Bapak Bahder Djohan sangat marah. Ia mengatakan, "Saudara saja yang memimpin sidang ini". Mendengar jawaban Bapak Bahder Djohan, orang yang mengusulkan tadi menjadi merah-padam mukanya, dan para peserta lain hening tidak bersuara.

Waktu itu penulis melihat dengan nyata sikap tegas Bapak Bahder Djohan dalam menjalankan kebijaksananya. Ia tidak segan-segan menghadapi orang tersebut, walaupun orang itu termasuk tokoh penting juga. Menurut Bapak Bahder Djohan, usul itu dibuat-buat dan cenderung mengguruinya. Akhirnya rapat diadakan sesuai dengan susunan dan formasi semula. Sesudah sidang, Bapak Bahder Djohan tidak marah lagi, dan ia tetap bersikap sebagaimana biasa.

Hasil keputusan seminar kemudian dirumuskan, dan hasil rumusan itu sebagian besar adalah buah pikiran Bapak Bahder Djohan. Menurut pendapatnya, seminar hendaknya dapat mendorong pemerintah untuk mendirikan Fakultas Sastra dalam lingkungan Universitas Andalas guna menggali kebudayaan daerah dalam rangka memupuk kebudayaan nasional. Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau ternyata kemudian berhasil berkat bimbingan dan pimpinan Bapak Bahder Djohan.

Setelah selesai seminar, para peserta kembali ke tempat masing-masing, begitu juga para peserta dari Jakarta. Dengan

berakhirnya seminar, masalah keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan seminar masih belum selesai. Panitia harus menyelesaikan sebagian dari beban keuangan yang dipinjam sebelum seminar. Pinjaman ini harus dibayar kembali, dan Bapak Bahder Djohan bertanggung jawab menyelesaikannya. Akhirnya Bapak Bahder Djohan dapat menyelesaikan masalah ini, walaupun beban pikiran ini ikut mempengaruhi kesehatannya untuk beberapa waktu.

Sebagai kelanjutan dari Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau di Batusangkar tahun 1970, maka di Jakarta pada tanggal 3 Nopember 1972 didirikan suatu badan ilmiah yang bernama Lembaga Kebudayaan Minangkabau, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Bahder Djohan. Selain dari Prof. Dr. Bahder Djohan, pendiri yayasan ini adalah : Saifullah Alimin, Drs. H. Mohammad Kamal dan Drs. H. Amura. Pelindung adalah Dr. H. Mohammad Hatta, dan beberapa orang penasihat dan anggota pengurus.

Salah satu kegiatan yayasan adalah menerbitkan majalah ilmiah yang diberi nama majalah *Kebudayaan Minangkabau* pada tanggal 1 Januari 1974. Majalah ini langsung dipimpin oleh Prof. Dr. Bahder Djohan sebagai pemimpin umum dan Drs. H. Amura sebagai pemimpin redaksi. Penulis ditunjuk sebagai salah seorang anggota Dewan Redaksi dari majalah ini.

Dalam nomor pertama dari majalah *Kebudayaan Minangkabau* penulis juga ikut menyumbangkan tulisan dengan judul "TaHER Marah Sutan Tokoh yang Dilupakan". Bahan untuk menyusun tulisan ini penulis peroleh dari bahan tulisan dan wawancara dengan Bapak Bahder Djohan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bahder Djohan, maka salah satu bagian dari tulisan itu mengatakan :

"Pada tahun 1932, salah seorang bekas murid beliau yaitu Mohammad Hatta yang telah menjadi tokoh penting pergerakan kebangsaan Indonesia pulang ke Minangkabau"

Setelah membaca tulisan itu, Bapak Mohammad Hatta tidak setuju. Ia tidak bersedia dikatakan bekas murid TaHER

Marah Sutan. Di samping menyalahkan penulis ia juga menyalahkan Bapak Bahder Djohan yang telah memberikan wawancara kepada penulis mengenai masalah itu. Bapak Mohammad Hatta yang khusus mengunjungi Bapak Bahder Djohan mengatakan ketidaksetujuannya. Sebaliknya Bapak Bahder Djohan tetap mengatakan bahwa Taher Marah Sutan bekas guru mereka termasuk Mohammad Hatta. Bapak Bahder Djohan dengan tegas mengatakan kepada Bapak Mohammad Hatta bahwa seorang guru itu bukan hanya yang berdiri di depan kelas. Kedua tokoh ini tetap berbeda pendapat mengenai masalah itu, masing-masing tidak mau mundur dengan keyakinannya. Akhirnya Bapak Bahder Djohan mengatakan kepada Bapak Mohammad Hatta (dalam bahasa Minang) "*Apo pulo di Hatta Go Nan Bapa debatkan*" (Apa pula ini oleh Hatta yang diperdebatkan).

Selain memimpin yayasan dan majalah *Kebudayaan Minangkabau*, Bapak Bahder Djohan juga menjadi rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Dalam lembaga perguruan tinggi ini saya juga ikut membantu Bapak Bahder Djohan sebagai dosen dalam Ilmu Politik dan Antropologi Budaya. Ia mengatakan bahwa tugas mengajar lebih banyak merupakan tugas pengabdian. Dengan kepemimpinannya yang mantap dan meyakinkan Bapak Bahder Djohan telah berhasil memimpin perguruan tinggi ini. Hal ini dapat penulis saksikan dalam beberapa kali rapat yang diadakan antara pimpinan universitas dengan tenaga pengajar.

Selama Bapak Bahder Djohan memimpin Universitas Ibnu Khaldun, keadaan universitas ini secara fisik material memang tidak begitu menggemirakan. Keadaan gedung dan peralatan sederhana, tetapi walaupun begitu, tenaga pengajarnya tidak kalah dengan perguruan tinggi swasta yang lain, mutu universitas ini tetap terjaga. Universitas Ibnu Khaldun tidak pernah dilanda masalah ijazah palsu. Universitas ini tetap bersih selama kepemimpinan Bapak Bahder Djohan.

Mengenai majalah *Kebudayaan Minangkabau* waktu itu hanya dapat terbit sampai nomor lima, karena mengalami kesu-

litan keuangan yang disebabkan pemasaran tidak lancar. Walaupun majalah sudah tidak terbit lagi, tetapi Bapak Bahder Djohan terus berusaha agar majalah dapat terbit kembali. Berkat bantuan Bapak H. Umar Bakry, (direktur utama) Penerbit Mutiara, maka majalah *Kebudayaan Minangkabau* dapat terbit kembali dengan No. 6 pada bulan Agustus 1979.

Untuk menjamin lancarnya penerbitan majalah, maka Bapak H. Umar Bakry mengusulkan agar dimuat iklan dalam majalah itu. Bapak Bahder Djohan dapat menyetujui dimuatnya iklan, tetapi yang berhubungan dengan masalah kebudayaan. Kalau iklan komersial ia tidak setuju; bahkan ia dengan tegas mengatakan bahwa majalah kita ini adalah majalah ilmiah, bukan majalah populer.

Kepada penulis berkali-kali ia mengatakan, bahwa ia seorang yang idealis, dan tugas kita mengelola majalah ini tidak pernah mengharapkan materi, mengharapkan jasa dan mencari untung. Selanjutnya Bapak Bahder Djohan mengatakan bahwa ia tidak takut hidup kekurangan dalam materi. Dalam masa pensiun ia tidak pernah membuka praktek sebagai seorang dokter, walaupun Bapak Bahder Djohan memerlukan uang. Tetapi kalau ada yang memerlukan bantuannya, akan selalu dibantu dengan cuma-cuma. Ia miskin dalam harta, tetapi kaya dalam cita-cita.

Tokoh yang termasuk dekat dengan Bapak Bahder Djohan adalah Bapak Drs. H. Amura, yang mempunyai cita-cita yang sama dengan Bapak Bahder Djohan. Kehidupan Bapak H. Amura juga sederhana seperti Bapak Bahder Djohan. Sampai saat terakhir majalah *Kebudayaan Minangkabau* di bawah pimpinan Bapak Bahder Djohan dan Bapak H. Amura tetap mempertahankan identitasnya. Majalah ini dapat terbit sampai No. 11 bulan Januari 1980.

Memasuki tahun 1980 kesehatan Bapak Bahder Djohan semakin mundur, tetapi semangatnya masih tetap tinggi. Kegiatan Yayasan Kebudayaan Minangkabau dan Universitas Ibnu

Khaldun lebih banyak ia pimpin dari rumah. Rapat-rapat sering diadakan di rumahnya dan adakalanya di rumah pengurus lainnya. Dalam keadaan kesehatan yang telah semakin mundur, Bapak Bahder Djohan pernah menghadiri rapat pengurus yayasan di rumah Bapak Drs. H.M. Kamal. Sewaktu rapat sedang berlangsung datang telepon dari istri Bapak Bahder Djohan yang meminta agar ia segera pulang, karena kesehatan tidak mengizinkannya untuk bekerja berat.

Dalam membentuk pengurus Yayasan Kebudayaan Minangkabau periode 1980—1985, Bapak Bahder Djohan memasukkan nama penulis sebagai pengurus. Ia secara resmi mengirim surat agar penulis bersedia duduk sebagai anggota pengurus. Penulis yang selama ini telah ikut membantu Prof. Dr. Bahder Djohan bersedia menerima tawaran itu.

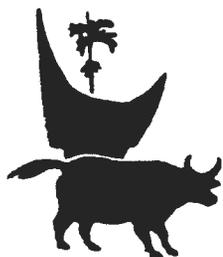
Salah satu kegembiraan Bapak Bahder Djohan yang tidak dapat dilukiskan ialah akan dibukanya Fakultas Sastra di Universitas Andalas Padang. Tahun 1980 dilangsungkan loka karya di Bukittinggi guna membentuk fakultas tersebut. Kegembiraan itu juga ia sampaikan kepada penulis dengan mengatakan : "Usaha kita selama ini tidak sia-sia, tidak lama lagi di Padang akan dibuka Fakultas Sastra. Walaupun saya tidak dapat menyaksikan pembukaannya nanti, saya telah puas usaha kita telah berhasil". Yayasan Kebudayaan Minangkabau telah berhasil membangkitkan dan mendorong pemerintah untuk mendirikan Fakultas Sastra di Sumatra Barat guna menggali secara ilmiah kebudayaan Minangkabau.

Pada tahun 1980 Universitas Ibnu Khaldun Jakarta akan memperingati "78 Tahun Prof. Dr. Bahder Djohan" dengan menerbitkan sebuah buku kenang-kenangan. Buku itu direncanakan selesai tepat pada ulang tahunnya yaitu 30 Juli 1980. Dalam rangka ikut untuk mengisi buku kenang-kenangan tersebut, maka panitia juga mengirim surat kepada penulis agar bersedia membuat tulisan mengenai Prof. Dr. Bahder Djohan.

Menurut pengamatan penulis, walaupun umur Bapak Bahder Djohan telah 78 tahun, pemikirannya masih jernih dan berbobot. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia pikun. Penulis mengenal dia sebagai seorang berhati bersih, tidak pernah mendendam, menghadapi hidup dengan penuh optimisme, dan yang sangat penting tidak melupakan olahraga. Fisiknya kelihatan kokoh dan kuat, walaupun telah berusia lanjut. Bapak Bahder Djohan paling senang berjalan kaki untuk berolahraga.

Memasuki tahun 1981, keadaan kesehatannya semakin mundur. Akhirnya ia terpaksa dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pada akhir Februari 1981 penulis menjenguk Bapak Bahder Djohan di rumah sakit. Pada waktu itu ia telah memakai mesin jantung. Fisiknya kelihatan lemah sekali, tetapi semangatnya tampak masih tetap menyala-nyala. Kemudian ia menanyakan tentang yayasan dan majalah *Kebudayaan Minangkabau*. Untuk menyenangkan hatinya, maka penulis menjawab bahwa yayasan dan majalah tetap berjalan, walaupun sebenarnya tidak demikian. Waktu penulis minta diri untuk pulang, maka penulis cium keningnya dengan perasaan haru bercampur sedih.

Ternyata pertemuan adalah pertemuan yang terakhir. Pada tanggal 8 Maret 1981 ia dipanggil oleh "Maha Pencipta" untuk menghadapnya selama-lamanya. Ia dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir bersama-sama dengan orang biasa. Semoga arwahnya diterima oleh Allah subhanahu wataala sesuai dengan amal dan perbuatannya. Amin.



majalah kebudayaan

MINANGKABAU

Memupuk kebudayaan daerah untuk mengembangkan Kebudayaan Nasional.

DAFTAR ISI

No. 11, Januari 1980.

SEKAPUR SIRIH

SEJARAH ISLAM DI MINANGKABAU

MESJID DI MINANGKABAU

CERITA ASAL-USUL DATU KETEMANG-
GUNGAN DAN DATUK PERPATIH NAN
SEBATANG

TUAN KU SYEKH BURHANUDDIN ULAKAN
RANG MINANG DI LUAR TANAH LELU-
HURNYA

MASIH DAPATKAH KESENIAN TARI MI-
NANGKABAU TETAP HIDUP DAN TERUS
DIKEMBANGKAN ?

ADAT MARAPULAI

MINANG MAIMBAU

DAFTAR ISI MAJALAH KEBUDAYAAN
MINANGKABAU No. 1 - 10 (1974 - 1979).

Prof.Drs. H. Amura

Prof.Dr. HAMKA

Drs. Edward Djamaris

Prof.Drs. H. Amura

Lazuardi Anwar

M. Joesfik Helmy

Bahri Rangkyo Mulia

Majalah ini menerima karangan-karangan yang mengandung unsur kebudayaan daerah Minangkabau atau kebudayaan daerah lain yang ada hubungannya dengan kebudayaan Minangkabau. Karangan yang dimuat akan diberi imbalan sekedarnya.

Redaksi berhak mengadakan perubahan atas karangan yang masuk tanpa mengubah maksud isinya. Pemuatan sesuatu karangan tidak berarti Redaksi setuju akan isinya.

Setiap karangan yang dimuat dalam majalah ini boleh dikutip, setelah mendapat izin dari Redaksi dan Penerbit.

Karangan yang tidak dimuat akan dikembalikan kepada penulisnya, bila disertakan perangko secukupnya.

MAJALAH BULANAN "KEBUDAYAAN MINANGKABAU"

MOTTO : Memupuk kebudayaan daerah untuk mengembangkan Kebudayaan Nasional.

- Diterbitkan oleh : Yayasan Kebudayaan Minangkabau bekerjasama dengan Penerbit MUITARA Jakarta.
- Pelindung : Dr. Mohammad Hatta.
- Ketua Kehormatan : Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat.
- Pemimpin Umum : Prof.Dr. Bahder Djohan.
- Pem. Red/Pen. Jawab : Prof.Drs. H. Amura.
- Pemimpin Redaksi : Drs. H.M. Kamal, Drs. Mardanas Safwan, Prof.Drs. H. Amura, Drs. M.D. Mansur, Drs. Amrin Imran.
- Sekretaris Redaksi : J. Munir.
- Pembantu-pembantu ahli : Prof.Dr. Hamka, Dr. Taufik Abdullah, Dr. Alfian, dan Dr. Mochtar Naim.
- Pembantu Luar Negeri : Drs. H. Sidi Gazalba (Kuala Lumpur, Malaysia) Anas Mar'ruf (Jepang).
- Izin Terbit : S.K. Menpen No. 584/SK/DITJEN PPG/STT/1979.
- Alamat Redaksi : Jalan Teuku Umar No. 66 Jakarta
Telp. 345299.
- Alamat Penerbit/T.U. : Penerbit MUTIARA, Jl. Salemba Tengah 38,
Jakarta Pusat, Telp. 882441.

Lampiran 2.

Nomor : 03/PB—R/79.

H a l : Mohon bantuan tulisan untuk
penerbitan buku "Kenang-kenangan
78 tahun prof. Dr. Bahder Djohan

Kepada
yth. Ibu/Bapak/Saudara
Drs Mardanas Safwan
di

Jakarta

Assalamu'alaikum W. W.

Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun Jakarta No. 003/SK/YOYIC/79 tanggal 27 September 1979 untuk menerbitkan buku Kenang-kenangan 78 Th. Prof. Dr. Bahder Djohan selaku Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, telah ditetapkan pelaksanaan sebagai berikut :

- a. **Bidang Tedaksi :**
 1. Pimpinan Umum merangkap penulis/penyusun Biografi Prof. Dr. Bahder Djohan diserahkan kepada Prof. Drs. H. Amura.
 2. Sekretaris bidang Administrasi dan pengumpulan bahan Drs. W.I. Pandji Indra.
 3. Sekretaris bidang pengumpulan naskah dan koreksi Drs. H.T. Yousli Syah.
- b. **Bidang Produksi :**
Drs. H. Anzas S.H. dan Drs. H. Abd. Salam.
- c. **Sebagai Konsultan :**
Prof. Dr. H. Anwar Harjono SH.

Sehubungan dengan rencana penerbitan buku tersebut, kami mohon dengan hormat, sudilah kiranya Bapak/Ibu/Sdr. untuk dapat menyumbangkan tulisan mengenai Prof. Dr. Bahder Djohan yang Bapak/Ibu/Sdr. kenal selama ini.

Di samping itu juga kami mohon kalau sekiranya Bapak/Ibu/Sdr masih memiliki foto-foto, tulisan-tulisan, kliping atau dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut dan pas foto diri Bapak/Ibu sebagai pelengkap dari tulisan yang akan kami muat dalam buku tersebut.

Rencana penerbitan buku tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Judul buku : KEHIDUPAN DAN PERJUANGAN 78
TAHUN PROF. Dr. BAHDER DJOHAN
- b. Ukuran : 14 x 21½ Cm.
- c. Tebal : Sekitar 500 halaman.
- d. Cetak : Offsett.
- e. Kertas : HVS / HHI.

Harapan kami tulisan dan bahan-bahan/dokumentasi tersebut sudah dapat kami terima selambat-lambatnya akhir bulan Januari 1980.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian.

A m i n;

Jakarta, 24 Desember 1979

Hormat Kami,

Prof. Drs. H. A m u r a
K e t u a

Drs. H. Teuku Yousli Syah.
Sekretaris

DAFTAR SUMBER

A. BUKU

1. *Almanak Umum nasional 1952*, Nusantara Jakarta 1952.
2. *Almanak Umum Nasional 1955*, Endang Jakarta 1955.
3. Akte Notaris Pendirian *Centre For Minangkabau Studies (CMS)* Padang 25 Juli 1968.
4. Bahder Djohan, *De Positie Van de Vrouw in de Indonesische Samenleving*, Berslaag van het Eerste Indonesische Jongdecongres, Terjemahan Dar-syaf Rahman, Yayasan Idayu Jakarta 1980.
5. ----, *Suatu Kisah Sedih Yang Menuntut Peninjauan Kembali*, Dalam drama Kedokteran Terbesar, Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta 1976.
6. ----, *Gerakan Pemuda Membawa Perobahan Mental*, Dalam 45 Tahun Sumpah Pemuda, Yaysan Gedung-gedung Bersejarah, Jakarta 1974.
7. ----, *pidato Pembukaan Ketua Kongres Kebudayaan II*, Bandung 1950.
8. ----, *Pidato Rektor UIK Pada Dies Natalis UIK ke XXIV*, Bandung 1980.

9. ---, *Manusia Minang Sebagai Suatu Fenomena Biologik*, Prasaran Pada Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970.
10. *Bung Rampai Sumpah Pemuda*, Balai Pustaka Jakarta 1978.
11. Mardanas Safwan, Sutrisno Kutoyo (editor), *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatra Barat*, Depdikbud Sumbar, Padang 1983.
12. Mardanas Safwan, *Peranan Gedung Kramat Raya 106 Dalam Melahirkan Sumpah Pemuda*, Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta 1973.
13. ---, *Peranan Gedung Menteng Raya 31 Dalam Perjuangan Kemerdekaan*, Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta 1973.
14. Mohammad Hatta, *Memoir*, Tintamas Jakarta 1978.
15. Mohammad Tabrani, *Kongres Pemuda Pertama, Dalam 45 Tahun Sumpah Pemuda*, Yayasan Gesung-gedung Bersejarah Jakarta 1976.
17. Nugroho Notosusanto (editor), *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka Jakarta 1977.
18. *Putusan Kongres Kebudayaan II*, Bandung 1950.
19. *Susunan Pengurus Yayasan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta 1972.
20. *Susunan Redaksi Majalah Kebudayaan Minangkabau*, dalam No. I Th I Januari 1974.
21. Sriyono Sumanto, Mardanas, WI Panji Indra, *Serjarah Tugu Peringatan Proklamasi*, Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta 1972.
22. Sudiro, *Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945*, Yayasan Idayu Jakarta 1972.
23. Sutrisno Kutoyo, M. sunyata Kartadarmadja, *Suatu Catatan Tentang Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928*, L S A Dep P dan K Jakarta 1970.
24. S.Z. Hadisutjipto, *Gedung STOVIA Sebagai Cagar Sejarah*, Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta 1973.

PERPUSTAKAAN

DIREKTORAT PERPUSTAKAAN DAN PERKUTUBAN
DIREKTORAT JERAMBA BUKU DAN PERKUTUBAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN

110

25. Thalib Ibrahim, *Jiwa Joang Bangsa Indonesia*, Mahabudi Jakarta 1975.

B. WAWANCARA

Wawancara dengan Prof. Dr. Bahder Djohan Jalan Kimia No. 9 Jakarta, pada tanggal 29 Maret 1973, 15 April 1974, 29 Juli 1975, dan 19 Maret 1977.



